



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONTRA INTELJEN INDIA
TERHADAP TERORISME YANG DISPONSORI PAKISTAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains dalam bidang Kajian Intelijen Stratejik**

PANJI AGUNG DEWANATA

NPM: 0806449191

**PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN INTELJEN STRATEJIK
JAKARTA
DESEMBER 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Panji A. Dewanata
NPM : 0806448112
Tanda Tangan : 
Tanggal : Desember 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Panji Agung Dewanata
NPM : 0806449191
Program Studi : Kajian Strategik Intelijen
Judul Tesis : Kontra Intelijen India terhadap Terorisme yang
Diseponsori oleh Pakistan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Intelijen, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Dra. Fadjari Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si



Pembimbing : Dr. Hariyadi Wirawan



Penguji : Andi Widjajanto, M.A.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2011

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas waktu, kesehatan, dan pikiran yang masih tetap terjaga, dimana tanpa tiga hal tersebut maka thesis yang berjudul Kontra Intelijen India terhadap Terorisme yang Disponsori Pakistan ini tidak akan pernah terwujud. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Kajian Intelijen Stratejik.

Kepedulian terhadap India dan Pakistan dimulai sejak sekitar empat tahun lalu, dimana penulis berkesempatan berkenalan dengan sebuah pribadi yang unik yang kebetulan bertempat tinggal di India. Dari sana kemudian berkembang dengan pengetahuan tentang India yang cukup 'unik' karena dalam sejarahnya, pertumpahan darah merupakan hal yang jamak. Pada akhirnya, dengan menambahkan sedikit sentuhan, maka diambilah India sebagai fokus utama dalam pembuatan thesis ini, dimana permasalahan diantara India dan Pakistan yang tidak kunjung selesai, dan telah berusia hampir sama tuanya dengan usia kedua negara tersebut.

Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada Bp. Hariyadi Wirawan, selaku dosen pembimbing utama, yang sempat memberikan waktunya, walaupun terus disibukkan oleh satu dan lain hal. Penulis sadar bahwa waktu merupakan hal yang sangat berharga, dan sepenuhnya berterimakasih atas waktu yang telah diberikan dalam membimbing thesis ini. Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada Bp. Andi Widjajanto, dimana mata kuliah yang beliau berikan dapat menjadi landasan berpikir bagi penulis dalam melihat suatu permasalahan.

Kepada kedua orang tua, papa dan mama, atas jasa beliau berdua lah kemudian penulis dapat menjadi seorang manusia yang berpikir. Kepada keluarga, adik dan kakak yang telah membentuk penulis menjadi individu mandiri, terima kasih.

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis ucapkan juga kepada saudara Fajar yang telah bersedia berbagi buku dan melakukan *brainstorming*, Mozes yang selalu mengingatkan, dan Arlog yang selalu menyediakan komputernya disaat otak telah beku. Dukungan moral pun penulis hargai dan berikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada Ayu Kusumastuti dan mamanya yang selalu memberikan dukungan yang sangat besar.

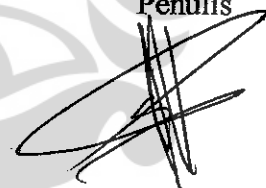
Terima kasih pula kepada seluruh civitas academica kampus KSI Universitas Indonesia, kepada saudara Wing, pada khususnya, tanpa anda penulis tidak akan sampai pada tahap ini, dan segala pihak yang telah membantu terwujudnya penyelesaian thesis ini.

Penulis sadar bahwa thesis yang disusun dalam waktu singkat ini memiliki banyak kekurangan. Namun dari kekurangan itulah kita senantiasa mampu untuk menjadi lebih baik.

Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Jakarta, Desember 2010

Penulis



Panji Agung Dewanata

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANJI AGUNG DEWANATA
NPM : 0806449191
Program Studi : Kajian Intelijen Strategik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Kontra Intelijen India terhadap Terorisme yang Disponsori Pakistan**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Desember 2010

Yang menyatakan



(Panji Agung Dewanata)

ABSTRAK

Nama : Panji Agung Dewanata
Program Studi : Kajian Intelijen Strategik
Judul : Kontra Intelijen India terhadap Terorisme yang
Disponsori Pakistan

Thesis, 119 halaman, 25 buku, 10 jurnal, 55 halaman elektronik.

Pakistan dan India merupakan dua negara bertetangga yang memiliki sejarah konflik sejak berdirinya kedua negara tersebut. Hingga saat ini, permasalahan di kedua negara yang menyangkut masalah Kashmir masih belum bisa diselesaikan dengan baik.

Dua tahun lalu, pada tahun 2008, terjadi peristiwa yang menggegerkan dunia internasional, dimana Mumbai, sebagai kota yang pusat perekonomian India, dan juga sebagai kota dengan populasi terbesar di India diserang oleh sepuluh orang bersenjata otomatis, yang dengan tenangnya melepas tembakan ke arah kerumunan orang di beberapa tempat di Mumbai. Kejadian tersebut berhasil di atasi oleh aparat keamanan India setelah dua hari. Namun kemudian, hal tersebut memicu ketegangan diantara India dan Pakistan karena dari hasil investigasi menunjukkan bahwa ke sepuluh orang yang melakukan serangan terhadap Mumbai tersebut berasal dari Pakistan.

Disini dilakukan analisis mengenai keterkaitan faktor aksi terorisme yang terjadi diantara kedua negara terhadap hubungan kedua negara, dan kemudian disajikan bagaimana pola yang efektif guna melakukan upaya anti-teror di dalam kedua wilayah negara yang bersangkutan.

Kata kunci: India, Pakistan, Terorisme, anti-teror

ABSTRACT

Name : Panji Agung Dewanata
Study Program : Strategic Intelligence Study
Title : *India's Counter-Intelligence in Combating Pakistan's State-Sponsored Terrorism*

Thesis, 119 pages, 25 books, 10 journals, 55 electronic pages.

Pakistan and India, are two neighboring countries which its story of conflicts colors its history since the day they gained their independence from the United Kingdom. Their ongoing problems, Kashmir related in particular, has not been yet comprehensively solved.

Two years ago, in 2008, the international world shocked by the act of terrorism in Mumbai, India. India's economic symbol and most populated city were attacked by ten gunmen, armed with heavy-full automatic firearms. These gunmen shot sporadically toward the crowds at certain place in Mumbai. The assault then ended by Indian security apparatus two days later, but then the investigation on this matter provoked another tension between these two neighboring countries as all of the gunmen were Pakistani.

This thesis will analyze the involvement of terrorism in the relationship between two countries, and how an effective solution can be provided in order to establish an anti-terror acts in the two countries.

Key word: India, Pakistan, terrorism, anti-terror

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR MODEL | xiii |
| 1. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Penelitian | 2 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 2 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 3 |
| 1.5. Kajian Pustaka | 3 |
| 1.6. Kerangka Pemikiran | 6 |
| 1.7. Metodologi Penelitian | 8 |
| 1.8. Sistematika Penulisan | 8 |
| 2. KERANGKA TEORI | |
| 2.1. Perspektif Realisme dalam Hubungan Internasional | 10 |
| 2.2. Teori Konflik | 16 |
| 2.3. <i>Balance of Power</i> | 21 |
| 2.4. Konsep Keamanan | 24 |
| 2.5. Security Dilemma | 26 |
| 2.6. Konsep <i>Deterrence</i> | 28 |
| 2.7. Teori Konflik – Eskalasi – Negosiasi | 30 |
| 2.8. Terorisme dan Konsep Teroris sebagai <i>Non-state Actor</i> | 35 |
| 2.9. <i>State-Sponsored Terrorism</i> | 39 |
| 3. INDIA, PAKISTAN, DAN TERORISME | |
| 3.1. India | 42 |
| 3.2. Pakistan | 46 |
| 3.3. Sejarah Eskalasi Konflik India dan Pakistan | 54 |
| 3.3.1. Perang India-Pakistan 1947 | 54 |
| 3.3.2. Sengketa di Wilayah Perbatasan 1965 | 55 |
| 3.3.3. Perang India-Pakistan 1965 | 55 |
| 3.3.4. Perang India-Pakistan 1971 | 56 |
| 3.3.5. Konflik Siachen 1984 | 56 |
| 3.3.6. Konflik Kargil: Perang Terbatas India dan Pakistan 1999 | 56 |
| 3.4. Kashmir: Akar Permasalahan | 57 |
| 3.5. Terorisme sebagai Aktor Pemicu Ketegangan Dua Negara | 63 |
| 3.6. Kronologi Serangan Aksi Terorisme Mumbai 26/11 | 69 |
| 3.6.1. Chatrapati Shivaji Terminus | 70 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 3.6.2. | Cafe Leopold | 70 |
| 3.6.3. | Ledakan bom di dalam taksi | 70 |
| 3.6.4. | Hotel Taj Mahal Palace dan Oberoi Trident | 70 |
| 3.6.5. | Nariman House | 72 |
| 4. | ANALISA KETERKAITAN AKSI TERORISME YANG MELIBATKAN PAKISTAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDIA DAN PAKISTAN | |
| 4.1. | Terorisme di India dan Pakistan | 74 |
| 4.2. | <i>Lashkar-e-Taiba</i> | 79 |
| 4.3. | Dukungan Pemerintah Pakistan terhadap Militansi Kashmir | 82 |
| 4.4. | Hubungan India dan Pakistan Pascaperistiwa 26/11 | 86 |
| 4.5. | Pola Hubungan Ideal antara India dan Pakistan dalam Penangan Permasalahan Terorisme | 103 |
| 4.6. | India dan Pakistan Sebagai Refleksi Terhadap Keadaan Indonesia dan Malaysia | 107 |
| 5. | PENUTUP | |
| 5.1. | Kesimpulan | 110 |
| 5.2. | Saran | 112 |
| | DAFTAR REFERENSI | 115 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Perbedaan Antar Perspektif dalam Hubungan Internasional | 11 |
| Tabel 2.2. Tabel Bentuk Resolusi Konflik Negara dalam Berbagai Perspektif | 20 |
| Tabel 3.1. Kejadian Aksi Terorisme Besar di India Periode 1990-an hingga 2010 | 64 |



DAFTAR MODEL

| | | |
|------------|-----------------------------|----|
| Model 2.1. | Model Morrow 1 | 32 |
| Model 2.2. | Model Morrow 2 | 32 |
| Model 2.3. | Model Morrow 2 | 32 |
| Model 4.1. | Pola Eskalasi Konflik Faure | 97 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

India dan Pakistan merupakan dua negara tetangga yang memiliki latar belakang sejarah panjang mengenai hubungan diplomatik kedua negara. Persaingan dilakukan oleh kedua negara yang dapat kita lihat dengan persaingan pengembangan fasilitas nuklir sebagai arsenal militer kedua Negara yang nampaknya diperuntukkan bagi upaya deterrence oleh masing-masing pihak.

Kondisi hubungan diplomatik kedua negara menjadi semakin buruk dengan terjadinya teror bom Mumbai di India pada 26-29 November 2008. Hotel, rumah sakit, kafe, tempat ibadah dan stasiun kereta api menjadi target aksi teror. Di dalam tragedi teror Mumbai yang terjadi di India lebih dari 190 orang meninggal. Dari kejadian ini India menuding bahwa teror Bom Mumbai yang terjadi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pakistan. Namun Pakistan menolak tuduhan yang dilontarkan oleh India atas kejadian teror Mumbai yang terjadi di India.

Sebelum terjadinya tragedi teror Bom Mumbai, sebelumnya sudah ada perang diantara kedua negara kawasan Asia Selatan tersebut yaitu pada tahun 1948, 1967 dan 1972. Dari ketiga perang yang sudah terjadi sebelumnya dengan aksi teror yang terjadi pada tahun 2008 tersebut dilatarbelakangi perebutan daerah Kashmir. Kashmir yang terletak diantara perbatasan India dengan Pakistan merupakan awal permasalahan konflik yang terjadi antara India dengan Pakistan selama lebih dari 60 tahun. Kashmir yang mayoritas berpenduduk Muslim sama-sama diklaim India (didominasi Hindu) dan Pakistan (didominasi Islam) sebagai salah satu bagian dari wilayahnya.

Ini yang menyebabkan keduanya berperang hingga tiga kali sejak merdeka dari Inggris tahun 1947. Akibat gejolak kekerasan kelompok perlawanan Kashmir,

sedikitnya 47.000 orang tewas. India menuding kelompok itu di dukung oleh Pakistan.

Pakistan dan India bagi Indonesia merupakan dua negara yang mempunyai potensi kerjasama yang cukup baik. India terkenal akan tenaga kerja yang baik dan murah dengan kualitas setara dengan tenaga kerja Eropa, sementara Pakistan memiliki latar belakang sejarah Islam yang cukup baik untuk dijadikan referensi dalam menuntut ilmu keagamaan/studi literatur Islam yang secara *de facto* Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

1.2. Perumusan Penelitian

Penelitian terhadap hubungan diplomatik kedua negara difokuskan pada "bagaimana pola hubungan diplomatik kedua negara di masa depan, dan bagaimana Indonesia mampu mengambil manfaat yang optimum dari pola tersebut?". Terkait dengan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Adakah keterkaitan antara aksi terorisme yang melibatkan kedua belah pihak dengan hubungan bilateral kedua negara tersebut?
- b. Bagaimana pola hubungan bilateral kedua negara di masa depan?
- c. Bagaimana pola relasi kekuatan yang efektif guna menjembatani hubungan diplomatik kedua negara sehingga kekuatan *non-state actor* (teroris) tidak bisa berkembang diantaranya, dan bagaimana cara tersebut dapat diaplikasikan ke Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ilmiah ini dilakukan untuk memprediksi hubungan negara India dan Pakistan dimasa depan dan mengkaji bentuk pola relasi kekuatan yang dapat diaplikasikan terhadap kedua negara agar kekuatan lain diluar negara tidak dapat mengganggu stabilitas negara-negara berdaulat tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk melihat hubungan diplomatik kedua negara di masa depan dan membantu para pembuat kebijakan dalam mengaplikasikan pola kekuatan yang bagaimana yang dapat dipakai dalam hubungan internasional dua negara guna mengantisipasi ancaman terorisme yang mungkin datang dan mengancam negara yang bersangkutan.

1.5. Kajian Pustaka

a. Konsep Perang Asimetris

Pada dasarnya perang asimetris adalah perang antara dua pihak dengan kekuatan yang tidak seimbang dengan pola yang tidak beraturan dan bersifat tidak konvensional. Masing-masing pihak berusaha untuk mengembangkan taktik dan strategi untuk mengeksploitasi kelemahan lawannya dalam mencapai kemenangan.

Perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara-cara berfikir yang tidak lazim, dan diluar aturan-aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas, terbuka dan mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan.

Terminologi perang asimetris digunakan untuk membedakan dengan perang konvensional, dimana musuh yang dihadapi jelas, aktornya negara, yang didukung oleh pasukan dengan aturan yang jelas dan peralatan militer yang dibolehkan oleh konvensi internasional, sementara, perang asimetris menekankan perang yang terjadi antara negara, dengan aktor non-negara. Ini lah yang kemudian akan digunakan dalam menjelaskan fenomena state-sponsored terrorism yang akan dibahas.

b. Teori Realis Hubungan Internasional

Teori realis dalam hubungan internasional memandang hubungan dengan beberapa prinsip seperti tersebut dibawah ini;

- 1) Negara selalu mempunyai kepentingan yang berbenturan.
- 2) Perbedaan kepentingan akan menimbulkan perang atau konflik.
- 3) Kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi penyelesaian konflik, dan menentukan pengaruhnya atas negara lain.
- 4) Politik didefinisikan sebagai memperluas, mempertahankan, dan menunjukkan kekuatan.
- 5) Setiap negara dianjurkan untuk membangun kekuatan, beraliansi dengan negara lain, dan memecah belah kekuatan negara lain (*divide and rule*).
- 6) Perdamaian akan tercapai jika telah terwujud *Balance of Power* atau Perimbangan Kekuatan yaitu keadaan ketika tidak ada satu kekuatan yang mendominasi sistem internasional.
- 7) Setiap negara akan selalu bergerak dan berbuat berdasarkan kepentingan nasionalnya (*national interest*)

c. Teori *Balance of Powers*

Balance of power adalah salah satu teori hubungan internasional yang menekankan pada efektifitas kontrol terhadap kekuatan sebuah negara oleh kekuatan negara-negara lain. Terminologi *balance of power* merujuk pada distribusi kapabilitas negara pesaing maupun aliansi yang ada. Semisal, Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang memiliki perimbangan kekuatan yang sama selama masa Perang Dingin tahun 1970an-1980an. Persaingan kedua adidaya tersebut semasa itu, membentuk sebuah keberlangsungan kontrol terhadap perimbangan kekuatan militer internasional.

Adapun teori *balance of power* (perimbangan kekuatan) memiliki asumsi dasar bahwa ketika sebuah negara atau aliansi negara meningkatkan atau menggunakan kekuatannya secara lebih agresif, negara-negara yang merasa

terancam akan merespon dengan meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini dikenal dengan istilah *counter balancing coalition*. Contoh kasus seperti munculnya kekuatan Jerman menjelang Perang Dunia I (tahun 1914-1918) yang memicu formasi koalisi anti-Jerman yang terdiri dari Uni Sovyet, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain.

d. Konsep *Security Dilemma*

Keamanan tentu saja menjadi suatu hal yang diperjuangkan oleh negara. Terutama untuk mengatasi ancaman yang sifatnya militer. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, negara sering dihadapi pada pilihan kebijakan yang sifatnya dilematis. Dikarenakan usaha untuk mengamankan negara dengan meningkatkan kemampuan militer baik daya tangkal maupun daya serang menimbulkan kecurigaan. Terlebih bila hal ini terjadi di masa Perang Dingin.

Keadaan dilematis ini disebut sebagai *security dilemma*, yang berarti peningkatan pengamanan suatu negara yang mempengaruhi negara lain. Hal ini sepaham dengan asumsi realis dalam konsep *balance of power* antar negara. Agar lebih jelas, *security dilemma* dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana usaha untuk memajukan keamanan nasional memiliki efek yang terlihat sebagai ancaman bagi negara lain, sehingga memprovokasi untuk melakukan tindakan balik.

e. Teori *Deterrence* dalam Utilisasi Nuklir

Teori *deterrence* (pencegah) pada prinsipnya adalah upaya mencegah lawan menggunakan apa yang ingin dilakukan pihak lainnya. Dalam teori utilisasi nuklir, teori *deterrence* digunakan dalam upaya sebuah negara mencegah negara lain untuk tidak menyerang negara-negara yang sama-sama memiliki nuklir. Konsep *deterrence* disini akan membuat negara nuklir jika menyerang negara lain yang memiliki nuklir maka akan terjadi kehancuran bersama bagi kedua belah pihak.

f. Konsep *State-Sponsored Terrorism*

“State-sponsored Terrorism”, juga sering disebut sebagai *“state terrorism.”* Istilah ini dipakai oleh sebagian pakar-pakar terorisme Barat, khususnya Amerika Serikat, sering dirumuskan sebagai tindakan suatu negara mensponsori aktivitas terorisme terhadap negara lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam kerangka ini terorisme adalah alat yang digunakan pemerintah (bertindak atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur. Dinas intelejen Uni Soviet (kini Rusia), KGB, dan CIA memakai terminologi terorisme sebagai instrumen politik negeri kedua negara adidaya itu guna memukul lawan politik dan kepentingan mereka.

1.6. Kerangka Pemikiran

Hubungan antara India dan Pakistan tidaklah dapat dikatakan cemerlang dalam konteks hubungan internasional. Kedua negara tersebut telah lama bertikai sejak kemerdekaan Pakistan dengan permasalahan pembagian wilayah Kashmir.

Sebuah kelompok resistensi terhadap India kemudian timbul dengan nama *Lashkar-e-Taiba (LeT)*. Kelompok ini pada mulanya beroperasi di wilayah Kashmir dan melakukan kegiatan insurgensi di wilayah Kashmir-India yang didominasi oleh masyarakat Muslim. Hal tersebut terus berlanjut hingga terjadinya peristiwa penyerangan di Mumbai, 2008, yang menyisakan satu pelaku penyerangan yang kemudian diketahui berasal dari kelompok LeT.

India menuding bahwa Pakistan lah yang berada di balik kejadian tersebut dengan tertangkapnya satu teroris dari 10 orang teroris yang selamat dari kejadian penyerangan Mumbai tersebut. Diketahui bahwa pelaku teror yang tertangkap tersebut berkewarganegaraan Pakistan dan karenanya pemerintah India menuduh adanya campur tangan pemerintah Pakistan di balik aksi teror Mumbai kali ini. Namun pemerintah Pakistan menolak tuduhan ini, tetapi dengan adanya bukti kontak komunikasi antara para teroris dengan seseorang di Pakistan pada saat

terjadinya aksi teror memperkuat dugaan adanya keterlibatan orang/kelompok di luar India dalam eksekusi aksi teror di Mumbai.

India menuduh bahwa para peneror bom Mumbai tersebut adalah kelompok *Lashkar-e-Taiba* (LET) yang berpangkalan di Pakistan berada di balik serangan tersebut. Namun Pakistan dan kelompok *Lashkar-e-Taiba* (LET) menolak tuduhan yang ditujukan oleh India terhadap mereka. Mereka juga mengutuk aksi teror yang terjadi di India khususnya daerah Mumbai yang menjadi korban. Namun India tetap bersikukuh dengan pandangannya bahwa Pakistan masih membiarkan kegiatan terorisme berkembang di wilayah kedaulatannya, karenanya secara sepihak India menuduh Pakistan sebagai negara yang menyponsori kegiatan terorisme.

Beberapa bulan setelah kejadian terror tersebut, hubungan kedua negara semakin memburuk. Ditambah dengan serangan ofensif militer Amerika terhadap kekuatan Taliban di Pakistan, menambah berat tuduhan bahwa Pakistan membiarkan kelompok-kelompok perlawanan radikal tersebut dengan sengaja dibiarkan hidup dalam negaranya.

Kini, kedua negara mulai menata perbincangan bilateral kedua negara. Ada sinyal yang disuarakan untuk menuju arah perdamaian. Namun, sinyal tersebut dikeluarkan satu hari setelah penarikan diplomat India di Pakistan dengan tuduhan melakukan kegiatan mata-mata bagi Pakistan. Apakah hal tersebut hanya digunakan sebagai lobi-lobi politik internasional?

Namun, satu hal yang perlu diingat adalah eksistensi kelompok radikal/teroris yang masih ada diantara kedua negara tersebut. Disini timbul pentingnya pengkajian atas relasi kekuatan guna meminimalisir ancaman dari kelompok-kelompok tersebut.

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan terhadap data-data primer dan sekunder yang dikumpulkan, baik dari sumber-sumber yang terpercaya, media, dan juga analisis-analisis dari berbagai organisasi keamanan.

Analisa dilakukan terhadap kecenderungan hubungan diplomatik dan bagaimana pola relasi kekuatan yang tepat untuk digunakan dalam meminimalisir ancaman kelompok-kelompok radikal yang ada.

1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I merupakan pendahuluan tesis yang berisi latar belakang penulisan, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menggambarkan rumusan teori yang dipakai sebagai dasar pijakan pola berpikir guna didialektikakan dengan fakta-fakta yang ada.

Bab III membahas mengenai permasalahan Terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militan Paksitan di India, khususnya *Lashkar-e-Taiba* (LeT) sebagai pemicu kembali ketegangan diplomatik diantara kedua negara tersebut, didalamnya juga akan dilakukan analisis mengenai adanya indikasi *state-sponsored terrorism* dalam kasus serangan Mumbai 2008.

Bab IV berupaya memberikan analisis terhadap arah hubungan bilateral kedua negara dan relasi kekuatan yang bagaimana yang bisa diambil guna meminimalisir ancaman kelompok-kelompok radikal/teroris secara optimum.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai India dan Pakistan, juga kepada pengambil kebijakan negara mengenai upaya kontrateror yang berkaitan dengan kondisi lintas negara dan indikasi *state-sponsored terrorism*.



BAB 2 KERANGKA TEORI

Berikut merupakan teori-teori yang dipakai sebagai landasan berpikir guna didialektikakan dengan fakta-fakta yang dikaji pada bab-bab selanjutnya.

2.1. Perspektif Realisme dalam Hubungan Internasional

Penulis menggunakan kerangka berpikir dalam perspektif realisme dalam mengaplikasikan tulisan dalam thesis ini. Teori ini digunakan sebagai kerangka acuan karena dalam kenyataannya, hubungan antar manusia dilandasi oleh sifat pesimisme dan skeptisisme. Pesimisme dan skeptisisme tersebut terutama tentang peluang yang sangat kecil dalam kemajuan politik internasional dan politik domestik. Kenyataan lain yang dapat dipelajari dari sejarah menunjukkan bahwa dunia ini terdiri atas negara-negara berdaulat yang saling terlibat konflik anarkis. Perang lah yang kemudian menjadi penyelesaian dari konflik tersebut. Dan sebagaimana seorang manusia ingin agar hidupnya aman dan damai, maka perspektif realisme juga menjunjung tinggi keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara (Jackson dan Sorensen, 1999). Dalam konteks ini, perspektif realisme menggunakan keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara sebagai dasar normatif penyebaran doktrin dan pengambilan kebijakan luar negerinya.

Negara (*state*) adalah aktor utama dalam hubungan internasional, sekaligus menekankan pada hubungan antarnegara (*interstate relations*). Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal (*unitary*) dan rasional. Dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara, sedangkan negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil yang maksimal.

Realisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga, berdasarkan intensitas dan eksklusifitasnya dalam menjalankan komitmen terhadap nilai-nilai pokok realisme. Pertama, realisme radikal yang hanya fokus pada *power* dan kepentingan pribadi dalam politik internasional. Kedua, yaitu realisme yang kuat (*strong realism*) yang menekankan pada dominasi *power*, kepentingan pribadi, dan konflik antar negara. Sedangkan ketiga, yaitu realisme lemah (*hedged realism*) masih memperhitungkan aspek lain yang penting (selain *power* dan *interest*) dalam politik internasional.

Teori realisme dipilih dibandingkan teori dalam hubungan internasional yang lain karena memang teori tersebut yang mampu merefleksikan kenyataan yang ada lewat sejarah, dan akan terus berulang di masa depan. Beberapa perbandingan dengan teori yang lain dapat dilihat dalam table yang dibuat dalam tabel berikut (Waltz, 1998):

Tabel Perbedaan Antar Perspektif dalam Hubungan Internasional

| <i>Competing Paradigm</i> | <i>Realism</i> | <i>Liberalism</i> | <i>Constructivism</i> |
|-------------------------------------|--|--|---|
| <i>Main theoretical proposition</i> | <i>Self-interest states compete constantly for power or security</i> | <i>Concern for power overridden by economic/political considerations (desire for prosperity, commitment to liberal values)</i> | <i>State behaviour shaped by elite beliefs, collective norms, and social identities</i> |
| <i>Main unit of analysis</i> | <i>States</i> | <i>States</i> | <i>Individual (especially elites)</i> |
| <i>Main instruments</i> | <i>Economic and especially military power</i> | <i>Varies (international institutions, economic exchange, promotion democracy)</i> | <i>Ideas and discourse</i> |

| <i>Modern theories</i> | <i>Hans Morgenthau Kenneth Waltz</i> | <i>Michael Doyle Robert Keohane</i> | <i>Alexander Wendt John Ruggie</i> |
|------------------------------------|---|--|--|
| <i>Representative modern works</i> | <i>Waltz, Theory of International Politics. Mearsheimer, "Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War" (International Security, 1990)</i> | <i>Keohane, After Hegemony. Fukuyama, "The End of History?" (National Interest, 1989)</i> | <i>Wendt, "Anarchy Is What States Make of It" (International Organization, 1992) Koslowski & Kratochwil, "Understanding Changes in International Politics" (International Organization, 1994)</i> |
| <i>Post-cold war prediction</i> | <i>Resurgence of event great power competition</i> | <i>Increased cooperation as liberal values, free market, and international institution spread.</i> | <i>Agnostic because it cannot predict the content of ideas</i> |
| <i>Main limitation</i> | <i>Does not account for international change</i> | <i>Tends to ignore the role of power</i> | <i>Better of describing the past than anticipating the future</i> |

Tabel 2.1. Perbedaan Antar Perspektif dalam Hubungan Internasional

Realisme klasik dikemukakan oleh ilmuwan sosial dan politik seperti Thucydides, Niccolo Machiavelli, dan Thomas Hobbes. Thucydides melihat bahwa perang merupakan langkah rasional dan masuk akal untuk mencapai keamanan dan kelangsungan hidup negara karena negara tidak memiliki pilihan lain selain politik kekuasaan yang harus mereka jalankan dalam kondisi yang anarkis. Sedangkan

asumsi dasar Machiavelli adalah bahwa nilai politik tertinggi adalah kebebasan nasional, yaitu kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, penguasa dituntut untuk memiliki kekuatan mempertahankan kepentingan negara bagaikan singa, sekaligus harus mampu berperilaku cerdik seperti rubah.

Dalam bukunya yang berjudul *Leviathan* (1651), Thomas Hobbes menguraikan tentang tiga asumsi dasar realisme, yaitu (1) manusia adalah sama, (2) manusia berinteraksi dalam lingkungan yang anarkis, dan (3) manusia diarahkan oleh kompetisi, rasa ketidakpercayaan diri (*diffidence*), dan kemuliaan (*glory*). Oleh karena itu kemudian muncul konsep *bellum omnium contra omnes*, atau *war of all against all*, semua manusia pada dasarnya berkompetisi demi kepentingannya sendiri¹. Secara singkat realisme klasik menurut Hobbes menekankan pada kekuatan politik dan hukum internasional. Akan tetapi, upaya untuk menyelesaikan masalah politik, terutama politik internasional, melalui aturan hukum atau kebijakan politik bersifat tidak permanen. Pemikiran Hobbes tersebut didasari oleh realitas dilema keamanan (*security dilemma*) yang terjadi saat pencapaian keamanan perseorangan dan domestik melalui penciptaan negara selalu disertai dengan ketidakstabilan keamanan nasional dan internasional yang berakar dari sistem anarki negara.

Tidak jauh berbeda dengan pandangan sebelumnya, realisme neoklasik Morgenthau mengasumsikan bahwa sifat dasar manusia adalah *animus dominandi* (manusia haus akan kekuasaan) dan mementingkan diri sendiri (Morgenthau, 1985). Walaupun pada awalnya Morgenthau berfokus pada penguasaan kekuatan (*power*), ia menggeser pandangannya tentang politik internasional dan kepentingan nasional. Ia membagi kepentingan nasional (yang semula hanya didefinisikan sebagai '*power*') menjadi dua:

- a. Kepentingan nasional dalam bentuk hard core, yang meliputi fisik, politik, dan identitas kultural.

¹ Wikipedia bahasa Inggris: Leviathan,
[http://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_\(book\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(book)) diakses pada 10 Oktober 2010

- b. kepentingan nasional dalam bentuk variabel, yaitu tujuan kebijakan negara (*goals of the state policy*) yang sesuai dengan konteks budaya sebuah negara, tradisi politik, standar moral, serta personality para pemimpin negara. Tujuan (*goals*) ini subjektif, fleksibel, dan tidak selalu rasional, karenanya tidak bisa diprediksikan.

Selanjutnya, ia mengemukakan asumsinya dalam “enam prinsip realisme politik”, yaitu:

- a. politik berakar dari sifat dasar manusia yang mementingkan diri sendiri,
- b. politik adalah wilayah tindakan otonom yang tidak dapat terlepas dari masalah ekonomi dan moral,
- c. politik internasional adalah arena bagi konflik kepentingan-kepentingan negara,
- d. etika hubungan internasional berbeda jauh dari moralitas pribadi,
- e. tidak ada negara yang mampu memaksakan ideologinya, dan
- f. manusia terbatas dan tidak sempurna. Bagi kaum realisme klasik, perimbangan kekuatan (*balance of power*) dianggap penting karena dapat mencegah adanya hegemoni yang dikhawatirkan akan menguasai dunia.

Di samping itu, Thomas Schelling (1980) mengemukakan ide realisme strategis yang pada intinya fokus pada pembuatan kebijakan luar negeri. Realisme strategis versi Schelling ini muncul pada era nuklir, yang dalam praktiknya lebih menggunakan analisis strategis yang behavioral dibandingkan kerangka normatif realisme dalam hubungan internasional. Alat-alat dalam realisme strategis adalah kecerdasan, ketegangan antar negara yang terlibat, dan keberanian untuk mengambil resiko.

Era realisme kontemporer yang dibawa oleh Schelling juga diikuti oleh Kenneth Waltz (1979) yang membawa konsep neorealisme. Bagi Waltz, fokus utama hubungan internasional bukan lagi terletak pada aktornya, tetapi pada sistem di mana aktor-aktor tersebut berinteraksi. Fokus utama dalam neorealisme adalah struktur

sistem dan distribusi kekuatan relatif. Waltz lebih menganggap bahwa sistem bipolar lebih menjamin keterjaminan keamanan dunia dibandingkan dengan sistem multipolar. Sekali lagi, konsep perimbangan kekuatan menjadi fokus utama bagi konsep perdamaian dunia versi Waltz. Akan tetapi, Waltz tidak memberikan arah kebijakan praktis bagi penyelesaian konflik dunia. Hal ini sejalan dengan terbatasnya pilihan yang disebabkan oleh struktur internasional yang membatasi gerak para aktor yang terlibat di dalamnya. Bagi Waltz, negara yang berkekuatan besar adalah negara yang sejalan dan menganut sistem yang berlaku dalam skala internasional.

Secara umum, poin-poin berikut merupakan pandangan-pandangan umum yang dipakai dalam melihat negara dalam hubungan internasional.

- a. Negara selalu mempunyai kepentingan yang berbenturan.
- b. Perbedaan kepentingan akan menimbulkan perang atau konflik.
- c. Kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi penyelesaian konflik, dan menentukan pengaruhnya atas negara lain.
- d. Politik didefinisikan sebagai memperluas, mempertahankan, dan menunjukkan kekuatan.
- e. Setiap negara dianjurkan untuk membangun kekuatan, beraliansi dengan negara lain, dan memecah belah kekuatan negara lain (*divide and rule*).
- f. Perdamaian akan tercapai jika telah terwujud *Balance of Power* atau Perimbangan Kekuatan yaitu keadaan ketika tidak ada satu kekuatan yang mendominasi sistem internasional.
- g. Setiap negara akan selalu bergerak dan berbuat berdasarkan kepentingan nasionalnya (*national interest*)

2.2 Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat

adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula (Raho, 2007).

Sementara Johan Galtung (Galtung, 2007) memberikan pengertian dua definisi konflik sebagai berikut:

- a. konflik sebagai benturan fisik dan verbal dimana akan muncul penghancuran
- b. konflik sebagai sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penyelesaian yang merupakan penciptaan baru.

Konflik dapat muncul dari hubungan antaraktor yang dimanifestasikan dalam keterlibatan kerjasama (*cooperative engagements*) yang membawa pada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut kemudian mencetuskan kekerasan yang terakumulasi menjadi konflik (Schelling, 1980).

Konflik juga bisa terjadi akibat keterbatasan dan ketidakmerataan sumber daya, perbedaan tujuan diantara dua atau lebih pihak, dan perbedaan nilai dalam tiap sistem sosial (Mitchell, 1996). Konflik digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Situasi Konflik (*Conflict Situations*), yaitu situasi ketika terdapat dua pihak atau lebih merasa menguasai suatu tujuan, saling bertentangan.
- b. Sikap Konflik (*Conflict Attitudes*), menggambarkan orientasi emosional, proses kesadaran (*cognitive processes*), yakni suatu penolakan informasi untuk memelihara struktur yang konsisten tentang kepercayaan mengenai dunia luar.
- c. Tingkah Laku Konflik (*Conflict Behaviour*) mendeskripsikan tentang tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dalam segala situasi dari konflik yang diarahkan di pihak lawan dengan niat membuat lawan itu melepaskan atau memodifikasi tujuannya.

Konflik dapat termanifestasi dalam dua bentuk jika dilihat dari jumlah aktor dan jumlah tujuannya. Bentuk pertama adalah *dispute* atau sengketa. Bentuk semacam ini dapat timbul apabila terdapat dua aktor yang memperebutkan satu tujuan yang sama.

Kemudian bentuk yang kedua adalah dilemma, dimana terdapat aktor tunggal yang memilih satu diantara dua tujuan yang berbeda.

Konflik dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain:

- a. Timbulnya sumber konflik, dimana sesuatu yang menyebabkan konflik bisa terjadi, tetapi bukan merupakan penyulut konflik.
- b. Timbulnya isu/permasalahan konflik yang dapat menjadikan konfrontasi konflik dapat terjadi guna memicu konflik lebih lanjut.
- c. Eskalasi konflik, merupakan peningkatan konflik menuju puncak konflik. Tahapan ini terjadi ketika ada peningkatan jumlah aktor dan sarana konflik.
- d. Puncak konflik, merupakan kondisi ketika konflik mencapai pada tingkatan tertinggi dengan adanya aktor yang maksimal dan sarana konflik telah maksimal.
- e. Terminasi konflik. Adalah keadaan penurunan konflik dimana konflik menuju pada penyelesaian. Hal ini terjadi jika aktor menarik diri dari konflik atau terdapat pengurangan sarana konflik.
- f. Penyelesaian konflik, merupakan proses terselesaikannya konflik melalui negosiasi (tukar menukar informasi dan kepentingan), mediasi (penengahan konflik melalui pihak ketiga), dan atau arbitrase (pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang ditunjuk pelaku konflik)

Dalam menyelesaikan konflik, ada beberapa panduan yang dapat digunakan antara lain dengan memakai metoda Galtung (Galtung, 2007) yang berisi pokok-pokok antara lain:

- a. mengidentifikasi konflik tersebut untuk mengetahui bagaimana *conflict formation*-nya. Hal ini dapat dipahamai sebagai pencarian terhadap siapa yang terlibat dalam konflik tersebut, apa tujuan mereka, dan bagaimana bentuk kontradiksinya.

- b. Untuk memudahkan, maka aktor yang terlibat harus setuju dengan poin-poin penyelesaian yang telah disepakati dengan membuat *new formation* (solusi). Pun, hal tersebut dilakukan secara terus menerus.
- c. Perlu adanya penghindaran terhadap kompleksasi atau reduksi terhadap fakta yang ada selama dan pada masa penyelesaian konflik.
- d. Jika terjadi kesalahan identifikasi konflik, maka bentuk penyelesaian tersebut diatas hanya sementara, akhirnya akan terjadi perubahan bentuk konflik atau *conflict deformation*.

Sementara itu, Andi Widjajanto (Widjayanto, 2000) mengemukakan empat tahapan penyelesaian konflik antara lain sebagai berikut:

- a. Mencari de-eskalasi konflik. Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (*entry point*) proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.
- b. Intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik. Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik.
- c. *Problem solving approach*. Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah *problem-solving* yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi.
- d. *Peace – building*. Tahap keempat adalah *peace-building* yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan

tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.

Konflik ada dalam tingkatan individu dan lembaga. Negara sebagai salah satu instrumen yang berperan sebagai sebuah lembaga memiliki tingkat konflik yang cukup tinggi dalam kaitannya terhadap negara lain dalam konteks hubungan internasional. Berikut diberikan resolusi konflik negara dalam berbagai perspektif (Farnham dan Pimlott, 1995).

| Kerangka Analisis | <i>Unitary Theory</i> | <i>Pluralist Theory</i> | <i>Marxist Theory</i> |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Situasi Negara | Negara terintegrasi terpusat dan harmonis dalam mencapai tujuan bersama | Negara terdiri dari beberapa kelompok kepentingan yang diperjuangkan dalam arena yang kompetitif | Negara diwarnai konflik antar kelas pekerja (proletar) melawan kelas kapitalis (borjuis) |
| Pandangan tentang hakikat konflik | Konflik adalah fatologi yang muncul akibat miskomunikasi interpersonal. Perbedaan hanyalah perbedaan cara bukan perbedaan tujuan | Konflik itu normal terjadi dalam pluralisme kelompok dan kepentingan | Konflik adalah keniscayaan sebagai refleksi kontradiksi kelas sosial |
| Resolusi konflik | Kepemimpinan yang kuat demi memelihara harmoni dan | Regulasi aturan main yang akomodatif terhadap kompetisi | Perebutan faktor-faktor produksi dari para kapitalis melalui perjuangan |

| | | | |
|--|--|---|--------------|
| | pencapaian tujuan bersama. Otoritarianisme bisa jadi resolusi efektif | antar kepentingan, kelompok dan kekuatan sosial | revolusioner |
|--|--|---|--------------|

Tabel 2.2 Tabel Bentuk Resolusi Konflik Negara dalam Berbagai Perspektif

2.3. *Balance of Power*

Balance of power atau perimbangan kekuatan adalah salah satu teori hubungan internasional yang menekankan pada efektifitas kontrol terhadap kekuatan sebuah negara oleh kekuatan negara-negara lain. Terminologi *balance of power* merujuk pada distribusi kapabilitas negara pesaing maupun aliansi yang ada. Seperti pada Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang memiliki perimbangan kekuatan yang sama selama masa Perang Dingin tahun 1970an-1980an. Persaingan kedua adidaya tersebut semasa itu, membentuk sebuah keberlangsungan kontrol terhadap perimbangan kekuatan militer internasional.

Teori perimbangan kekuatan memiliki asumsi dasar bahwa ketika sebuah negara atau aliansi negara meningkatkan atau menggunakan kekuatannya secara lebih agresif, negara-negara yang merasa terancam akan merespon dengan meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini dikenal dengan istilah *counter-balancing coalition*².

Berlandaskan pada teori perimbangan kekuatan, negara dituntut untuk merespon ancaman yang muncul terhadap pertahanan dan keamanannya dengan jalan meningkatkan kapabilitas kekuatan militer sambil melakukan aliansi dengan negara-negara lain. Kebijakan sebuah negara dalam usaha membangun aliansi berbasis geo-

² Contoh kasus seperti munculnya kekuatan Jerman menjelang Perang Dunia I (tahun 1914-1918) yang memicu formasi koalisi anti-Jerman yang terdiri dari Uni Sovyet, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain.

strategi guna mempertahankan territorial dari ancaman ekspansi dikenal dengan istilah *containment policy*³.

Secara teoritis, perimbangan kekuatan menganggap bahwa perubahan status dan kekuatan internasional khususnya upaya sebuah negara yang hendak menguasai sebuah kawasan tertentu, akan dapat merangsang aksi *counter-balancing* dari satu negara atau lebih. Dalam keadaan yang demikian, proses perimbangan kekuatan dapat mendorong terciptanya dan terjaganya stabilitas hubungan antar Negara yang beraliansi alias merasa terancam.

Terdapat dua keadaan dimana sistem *balance of power* dapat berfungsi secara efektif. Pertama, sekelompok negara dapat membentuk perimbangan kekuatan ketika aliansi telah mencair. Dengan begitu menjadi relatif mudah untuk pecah maupun terbentuk kembali tergantung pada landasan pragmatis masing-masing negara. Meskipun harus mengabaikan faktor nilai, agama, sejarah, hingga bahkan bentuk pemerintahan. Kedua, yakni dua negara berbeda dapat saling melakukan perimbangan kekuatan dengan cara menyesuaikan kekuatan militer masing-masing antara yang satu dengan yang lain.

Terdapat sebuah kelemahan dari konsep perimbangan kekuatan yakni karakteristiknya yang menilai kekuatan sebuah negara sebagai ukuran dari sebuah proses perimbangan kekuatan. Meski dapat dikatakan secara sederhana, seperti yang dipaparkan oleh Morgenthau, bahwa kekuatan nasional diukur dari ukuran geografi wilayah, populasi penduduk yang dimiliki, serta tingkat kemajuan teknologi sebuah negara atau aliansi sebuah kekuatan. Konsepsi perimbangan kekuatan tidak melihat faktor kapasitas ekonomi dalam negara. Oleh Morgenthau, ekonomi dinilai hanya sebagai unsur pembangun kapabilitas militer (Morgenthau, 1985).

³ Hal ini dapat dilihat secara kongkrit ketika Amerika Serikat menerapkan *containment policy* terhadap ancaman sosialisme komunis Uni Sovyet dengan melakukan aliansi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Juga upaya Amerika Serikat yang meningkatkan kapasitas kekuatan militer dan persenjataannya selama Perang Dingin.

Konsepsi perimbangan kekuatan telah nampak sejak dahulu. Sejarah menunjukkan terjadinya praktek perimbangan kekuatan selama periode Perang di Cina tahun 403-221 Sebelum Masehi, antara lima negara di daratan Cina yang saling bersaing kekuatan militer serta hendak saling menguasai antara satu dengan yang lain. Juga dalam perang Peloponnesian tahun 431-404 Sebelum Masehi, tentang kemunculan kekuatan Athena merangsang formasi koalisi negara kota sekitar yang terancam.

Runtuhnya Uni Sovyet yang menjadi pertanda berakhirnya Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Dengan merujuk kepada teori perimbangan kekuatan, dominasi kekuatan Amerika akan menstimulir munculnya koalisi baru di dunia internasional yang memunculkan konsep Uni Eropa juga kekuatan Cina, Russia, India, dan Perancis. Namun, kekuatan dan koalisi tersebut belum signifikan dibandingkan dengan kekuatan militer Amerika yang begitu jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Juga, tendensi koalisi negara-negara Eropa lebih berwarna dan bermotivasi ekonomi. Sehingga, faktor kekuatan militer Amerika tidak merangsang upaya perimbangan oleh koalisi negara-negara lain di dunia, termasuk Eropa.

Secara lebih ringkas, terdapat beberapa irrelevansi teori perimbangan kekuatan dalam konteks kekinian⁴.

- a. Kekuatan Militer bukan lagi menjadi perhatian utama negara bangsa. Di era globalisasi multi dimensional, kecenderungan negara bangsa berubah drastik. Kekuatan militer tidak lagi menjadi sebuah perhatian utama. Faktor geo-strategi yang dulu menjadi pertimbangan penting begitu memudar secara signifikan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Sebagai gantinya, negara bangsa lebih memperhatikan bagaimana membangun produktifitas ekonomi dan perdagangan secara lebih terbuka. Jadi bukan lagi

⁴ Hal ini jika ditinjau dalam konteks negara yang sudah terlanjur besar, seperti negara Amerika Serikat. Namun dalam konteks dua negara yang berhubungan dan memiliki interest yang sama, maka konsep perimbangan kekuatan klasik akan tetap berlaku, seperti dalam konteks negara India dan Pakistan yang memperebutkan penguasaan atan wilayah Kashmir.

untuk menjadi yang terkuat secara militer, namun lebih kepada yang terkuat secara ekonomi.

- b. Kecenderungan agresif lebih kepada bidang ekonomi dan perdagangan. Kecenderungan agresif yang digambarkan oleh perimbangan kekuatan tidak lagi menjadi faktual di era sekarang ini. Agresifitas lebih diwarnai dengan upaya membangun pasar baru di negara luar untuk kebutuhan distribusi barang dan ekspansi modal. Pelembagaan Uni Eropa dengan menyatukan mata uangnya menjadi Euro, merupakan sebuah indikator yang nyata. Disusul kemudian regionalisasi ekonomi kawasan-kawasan baik dalam bentuk Pasar Bebas seperti AFTA, FTA, dan lain sebagainya.
- c. Respons *counter-balancing* sangat dipengaruhi oleh faktor domestik sebuah negara. Respon *counter-balancing* dipandang sudah tidak berlaku lagi⁵.

2.4. Konsep Keamanan

Pascaberakhirnya perang dingin, konsep dan isu keamanan internasional mulai berkembang, dimana konsep ini sebelumnya selalu diasosiasikan dengan pendekatan militeristik dan saat ini mulai bergeser ke isu *human security*, *societal security*, *environmental security* dan *economics security*. Isu-isu keamanan pada saat dan sebelum perang dingin didominasi oleh isu-isu pertahanan, *security dilemma*, *arm race*, *nuklir*, *persenjataan* dan lain sebagainya.

Isu keamanan internasional secara tradisional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik, dalam konteks ini konsep keamanan berbicara bagaimana untuk bertahan hidup. Dalam agenda keamanan yang lebih luas definisi keamanan

⁵ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini tidak berlaku bagi perselisihan perbatasan antara India dan Pakistan yang kemudian menimbulkan perlombaan persenjataan antara kedua negara tersebut. Namun hal ini merupakan hal yang spesifik dan dilatarbelakangi oleh sejarah yang cukup panjang.

menyangkut isu-isu yang lebih luas yakni isu keamanan tidak hanya dititikberatkan pada isu keamanan militer tetapi juga menyangkut keamanan lainnya. Seiring dengan perkembangan interaksi antar aktor-aktor di dalam arena dunia internasional baik *state actor* maupun *non-state actor*, interaksi yang dibangun tidak lagi hanya bermain pada tataran politik, militer, ataupun ideologi (isu-isu *high politics*), akan tetapi mulai meluas kepada aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, informasi dan komunikasi, teknologi dan lain-lain. Interaksi tidak lagi bersifat *state centric* tetapi juga melibatkan aktor-aktor *non-state* dan lebih mengglobal. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan gagasan globalisasi, dimana adanya saling keterkaitan antar aktor-aktor di dunia internasional di dalam isu-isu yang beragam baik politik, ekonomi, sosial, pertahanan, lingkungan dan lain sebagainya.

Kata keamanan memiliki pengertian universal yang beraneka ragam, sehingga pengertiannya bergantung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari tatarannya, paling tidak dapat dikategorikan sebagai:

- a. *International Security*, untuk level dunia
- b. *National (State) Security*, untuk level negara,
- c. *Public Security (and Order)*, untuk level masyarakat, dan
- d. *Human Security*, untuk level individu.

Secara sederhana konsep keamanan sendiri dapat dipahami bahwa suatu kondisi yang aman (*secure*) adalah suatu kondisi yang bebas akan adanya ancaman baik itu dari aspek militer maupun aspek lainnya dan keadaan yang tidak aman (*insecure*) dapat didefinisikan adanya ancaman terhadap kehidupan manusia di dalam sebuah kelompok, masyarakat dan negara di segala aspek kehidupan manusia. Selain itu, terdapat beberapa alternatif dalam melihat keamanan itu sendiri (Jones, 1999), yakni :

- a. *Deeper* (lebih dalam) bahwa perlunya pemahaman bahwasanya keamanan adalah sebuah konsep yang dibangun (*derivative concept*) dimana keamanan merefleksikan asumsi yang lebih dalam mengenai keadaan alamiah politik dan peran konflik dalam kehidupan politik.

- b. *Broader* (lebih luas), adanya pengakuan bahwa kekuatan militer tidak hanya sebagai satu-satunya ancaman potensial terhadap keamanan dan bahwa ancaman lainnya sama pentingnya dan sama-sama dipertimbangkan didalam kajian keamanan.
- c. *Extended* (diperluas), bahwa adanya perluasan terhadap objek terancam lainnya dibandingkan negara, kehidupan individu manusia dan bagaimanapun semuanya dianggap sebagai objek yang paling terancam (*ultimate referents*).
- d. Adanya pemfokusan bahwasanya antara teori dan praksis keamanan dapat terlihat sebagai sebuah kesatuan.

2.5. Security Dilemma

Seperti telah dikemukakan diatas, keamanan menjadi suatu hal yang diperjuangkan oleh negara, terutama untuk mengatasi ancaman yang sifatnya militer. Untuk memenuhi tuntutan tersebut negara sering dihadapi pada pilihan kebijakan yang sifatnya dilematis. Dikarenakan usaha untuk mengamankan negara dengan meningkatkan kemampuan militer baik daya tangkal maupun daya serang menimbulkan kecurigaan.

Keadaan dilematis ini disebut sebagai *security dilemma*, yang berarti peningkatan pengamanan suatu negara yang mempengaruhi negara lain (Hough, 2004). Lebih jelas dapat dikatakan bahwa *security dilemma* merupakan suatu kondisi dimana usaha untuk memajukan keamanan nasional memiliki efek yang terlihat sebagai ancaman bagi negara lain, sehingga memprovokasi untuk melakukan tindakan balik.

Adalah tindakan alamiah negara terutama kaitannya dengan upaya untuk bertahan hidup untuk menciptakan rasa aman terhadap dirinya dan menjadikan hal tersebut sebagai potensi ancaman. Kemudian, berdasarkan perpektif realisme dalam lingkungan yang menuntut adanya upaya bertahan hidup, negara menghadapi ketidakpastian yang tidak dapat dipecahkan mengenai keberadaan militer yang

disiapkan negara lain. Hal ini dimaksudkan untuk pertahanan maupun tujuan lain. Karenanya, peningkatan kemampuan militer suatu negara merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh suatu negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembelian senjata baru untuk menambah atau memperbaharui alat utama sistem pertahanan. Lebih lanjut, pemenuhan kemampuan pertahanan dalam penyediaan teknologi dan senjata bagi militer merupakan suatu keharusan selama negara itu ada. Disini, dalam memandang peningkatan militer, negara lain sering kali paranoid untuk kehilangan pengaruhnya di suatu kawasan. Dan menganggap tindakan tersebut sebagai ancaman. Sehingga menjadikan *security dilemma* sebagai potensi penyulut konflik di kawasan tertentu, namun tidak demikian di kawasan yang memiliki perekonomian yang maju.

Konsep *security dilemma* akan selalu ada terutama bila sebuah negara memerlukan peningkatan atau penjaminan keamanan negaranya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan negaranya juga memiliki hak untuk melakukan apapun untuk mewujudkannya selama sesuai dengan konstitusi negara tersebut.

2.6. Konsep *Deterrence*

Jika diterjemahkan secara literal dalam bahasa Indonesia, *deterrence* berarti penolakan, penangkisan dan pencegahan. Dalam studi militer, *deterrence* diartikan sebagai sebuah 'strategi penangkal' supaya pihak lawan merasa segan dan takut sehingga mereka akan berpikir panjang untuk melakukan serangan kepada pihak kita⁶.

Dalam studi keamanan internasional, *deterrence* berkembang menjadi sebuah teori besar dalam paradigma realis. Asumsi dan konsep-konsep yang digunakan dalam teori *deterrence* selaras dengan asumsi dunia yang anarkhis, kecenderungan egoisme manusia, serta keinginan setiap negara untuk memupuk kekuatan. Dalam keadaan dunia internasional yang anarkhis, maka untuk menciptakan perdamaian diperlukan

⁶ Echols, John M dan Shadily, Hassan. Kamus Inggris Indonesia. PT. Gramedia, Jakarta: 1996

suatu keadaan dimana setiap negara harus memiliki kekuatan yang setara⁷. Menurut paradigma ini, jika negara itu kuat maka ia cenderung akan mendominasi negara yang lemah. Disinilah kemudian letak penting teori *deterrence* demi mewujudkan perdamaian dalam asumsi paradigma realis.

Teori *deterrence* berkembang luas di kalangan ilmuwan hubungan internasional dan diterapkan dalam kebijakan-kebijakan militer terutama pada masa perang dingin. Karenanya, asumsi dan konsep-konsep dalam teori *deterrence* begitu mempengaruhi para pembuat kebijakan sehingga memicu terjadinya perlombaan persenjataan antara negara-negara yang berkonfrontasi secara ideologis. Setiap kali suatu negara meningkatkan kapasitas militernya, maka negara lain yang berbeda ideologis akan merasa terancam karena tidak mempunyai kekuatan penangkal lagi sehingga ia pun akan memperbesar pengeluaran negaranya untuk keperluan belanja militer.

Pengaruh teori *deterrence* pascaperang dingin tidak sebesar masa lalu. Namun dalam kerangka berpikir militer, hal ini masih dianggap merupakan strategi ampuh yang paling masuk akal. Dalam kenyataannya, meski berbagai pertemuan internasional digelar dan banyak konvensi telah dihasilkan seputar pembatasan penggunaan senjata tertentu (seperti ranjau darat, bom biologis, senjata pemusnah massal/ WMD) dan perlucutan persenjataan (*disarmament*), namun pembangunan sistem rudal antar benua (*intercontinental missiles*) misalnya masih terus saja dilakukan.

Doktrin utama teori *deterrence* bergantung kepada kemampuan sebuah negara untuk melakukan serangan ke-dua (*second strike*) meski telah mendapat serangan dahsyat pada serangan pertama (*first strike*) dari pihak musuh. Teori *deterrence* seperti ini telah menjadi asumsi utama kebijakan strategis selama empat dekade perang dingin.

Terdapat dua aspek yang menjadikan teori *deterrence* berjalan dengan baik, yakni kapabilitas dan kredibilitas. Kapabilitas berarti untuk mewujudkan *deterrence* yang efektif maka sebuah negara harus memiliki kapasitas untuk dapat merespon

⁷ Lihat konsep Balance of Power (Perimbangan Kekuatan)

pascaserangan yang dilakukan pihak musuh kepadanya. Dalam hal ini isu yang mengemuka bukanlah pada seberapa banyak manusia yang bisa terbunuh oleh sebuah senjata, namun lebih kepada berapa banyak senjata musuh yang masih tersisa setelah mereka diserang. Jika kemudian sebuah negara meningkatkan jumlah persenjataan demi keamanan negaranya, maka hal ini akan diikuti oleh negara lain untuk juga menambah persenjataan mereka⁸ dengan alasan demi memastikan kemampuan mereka untuk dapat melakukan serangan balasan (*retalitionary second srike*) ketika mereka diserang negara tersebut. Pada akhirnya, perilaku negara tadi akan menekan negara pertama untuk menambah persenjataan pula sehingga terciptalah perlombaan persenjataan.

Adapun kredibilitas berarti keyakinan pihak musuh bahwa kita benar-benar akan menggunakan persenjataan yang kita miliki. Dengan demikian, persepsi adalah faktor kunci. Banyak kalangan berpendapat bahwa penghentian aktivitas pembuatan nuklir, pergerakan dan persebarannya selama Perang Dingin membuat Uni Soviet berpikir bahwa Barat tidak memiliki keinginan sama sekali untuk merespon jika terjadi serangan meskipun kapabilitasnya belum dihancurkan. Dalam teori *deterrence*, persepsi demikian bisa lebih berbahaya dibanding dengan situasi perlombaan persenjataan.

Dua aspek tersebut diyakini telah membuat teori *deterrence* berjalan dengan baik dan menghindarkan terjadinya Perang Dunia di masa Perang Dingin. Ide dasarnya adalah masing-masing pihak memiliki kapasitas untuk tetap memiliki senjata setelah diserang serta masing-masing pihak memiliki keinginan untuk merespon dan melakukan pembalasan setimpal sehingga pihak lawan akan tercegah untuk melakukan serangan terlebih dahulu.

⁸ Lihat kembali pada konsep *Security Dilemma*

2.7. Teori Konflik – Eskalasi – Negosiasi

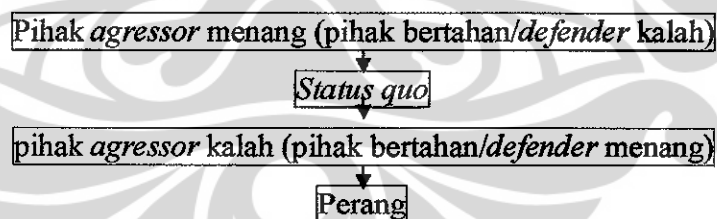
Eskalasi dan negosiasi adalah dua hal yang bertolak belakang. Eskalasi adalah proses upaya untuk meningkatkan atau memperluas konflik, sementara negosiasi adalah proses untuk meredakan konflik (Zartman, 2005). Dalam bukunya *Escalation and Negotiation in International Conflict*, Zartman dan Faure (2005) mengatakan bahwa konflik internasional akan selalu mengalami fasa naik dan turun, Eskalasi menunjukkan keadaan dimana terjadinya proses menuju puncak konflik yang senantiasa mengikuti bentuk yang dinamis. Eskalasi dimulai dengan adanya konflik dari dua atau lebih aktor, dimana aktor-aktor yang berkonflik tersebut melakukan eskalasi guna

- a. memenangkan konflik,
- b. berupaya agar tidak kalah, atau mengupayakan terjadinya negosiasi diantara aktor, mempercepat proses negosiasi, dalam kaitannya untuk menghindari *deadlock*,
- c. melindungi investasi, memperkecil biaya, dan juga mengakhiri segala biaya yang telah dikeluarkan selama konflik dan atau biaya dari eskalasi sebelumnya,
- d. memperoleh dukungan, baik dari kawan atau lawan, di daerah sendiri atau di luar negeri,
- e. merebut keuntungan dari kesempatan yang bisa digunakan pada saat itu atau di masa depan,
- f. memberikan kepuasan diri
- g. memberikan kesan superioritas kepada aktor lain yang berkonflik.

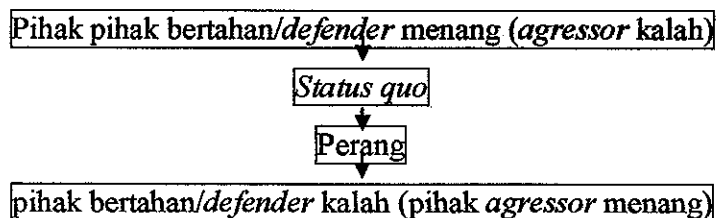
Salah satu faktor yang tidak dapat dielakan dari eskalasi konflik internasional adalah keberadaan faktor keinginan untuk membalas dendam. Pengambilan keputusan untuk menyerang pihak lain sebagai balasan atas penyerangan pihak sendiri telah menjadi model konflik sejak negara-negara lahir. Pada dasarnya, faktor balas dendam dalam eskalasi konflik internasional dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, kepada pihak

yang lebih lemah, dimana pihak yang lebih kuat lebih dulu diserang oleh yang lemah. Pola ini merupakan pola yang dapat digunakan secara terbalik, dimana pihak yang lemah akan membalas dendam kepada pihak yang lebih kuat, dimana pihak yang lebih lemah lebih dulu diserang oleh pihak yang lebih kuat. Namun, hal ini jarang terjadi, dan apabila terjadi, maka proses pembalasan dendam ini akan menjadi suatu peristiwa yang sangat dramatis (Kim, 2005).

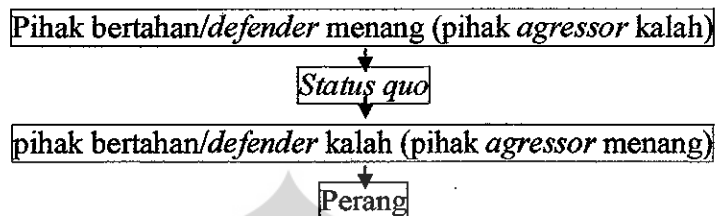
Morrow (1994) memberikan tiga model perang sebagai bentuk dari eskalasi dengan mengikuti pola bahwa pihak *agressor* melakukan agresi pertama. Hal ini diikuti dengan pihak bertahan/*defender* yang memutuskan apakah ia harus menanggapi tantangan pihak *agressor* (melakukan eskalasi) dengan *status quo*. Jika tanggapan terhadap agresi tidak ditanggapi (tidak ada krisis) maka akan terjadi *status quo*. Jika pihak *agressor* bertindak, dan pihak bertahan tidak melakukan perlawanan, maka kemenangan berada di pihak *agressor*. Jika pihak bertahan melakukan perlawanan dan mampu memukul mundur pihak *agressor*, maka kemenangan berada di pihak bertahan. Sementara apabila pihak bertahan terus terdesak, maka kemenangan perang berada pada tangan pihak *agressor*:



Model 2.1. Model Morrow 1



Model 2.2. Model Morrow 2



Model 2.3. Model Morrow 3

Dalam penggunaan motif balas dendam, terdapat beberapa penyebab utama seperti yang dikatakan Kim (2005) sebagai berikut:

- a. Mengembalikan harga diri yang jatuh atas penyerangan yang dilakukan oleh pihak lawan.
- b. Menangkal bahaya yang mungkin terjadi di masa depan dengan menunjukkan bahwa pihak yang membalas dendam masih mampu untuk bereaksi atas serang awal.
- c. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan apabila pihak lain menyerang pihaknya. Hal ini lebih banyak mengarah pada keyakinan prinsipal satu pihak.

Dalam proses negosiasi yang melibatkan unsur balas dendam, satu hal yang perlu ditekankan adalah prinsip untuk memaafkan pihak lawan. Memberikan maaf disini dapat dipersepsikan dalam proses bilateral ataupun unilateral. Dalam proses bilateral, pihak korban (*victim/defender*) memaafkan pihak agresor yang harus memenuhi kontribusi yang diajukan oleh pihak korban. Sementara dalam proses unilateral, pihak *agresor* memberikan kontribusi yang tidak diminta oleh pihak korban, dan ini kemudian diberikan maaf oleh pihak korban, walaupun pihak *agresor* tidak meminta maaf, dan pihak korban pun tidak meminta permintaan maaf kepada pihak *agresor* (Pruit dan Kim, 2004).

Konsep strategi penangkalan (*deterrence*) memiliki peran yang sangat kuat dalam kerangka eskalasi konflik dan negosiasi (Morgan, 2005). Disini harus dibedakan mengenai strategi penangkalan sebagai taktik (bagian dari strategi) dan penangkalan

sebagai strategi fundamental dalam sebuah upaya pengamanan sebuah negara. Namun, bagi kedua bentuk strategi penangkalan tersebut, strategi ini tetap digunakan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya konflik yang dimanifestasikan dalam pertempuran yang lebih besar. Hal ini kemudian akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bertikai karena proses penyampaian pada tahapan negosiasi akan menjadi lebih cepat.

Di lain sisi, strategi penangkalan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah eskalasi pada saat pertempuran telah terjadi. Disini, strategi penangkalan berfungsi agar pihak yang bertahan (*defender*) tidak melakukan serangan balasan atas upaya agresi pihak penyerang (*agressor*) setelah serangan pertama, atau agresi pertama dilakukan.

Namun, disamping sebagai sarana pencegah eskalasi konflik, strategi penangkalan juga dapat berakibat sebagai provokator bagi sebuah konflik untuk menjadi lebih luas (Morgan, 2005). Hal ini diakibatkan oleh adanya perasaan security dilemma yang dialami oleh pihak-pihak yang bertikai. Tetapi apabila digunakan dengan baik, strategi penangkalan juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam men-deskalisasi sebuah konflik. Hal ini dapat terwujud jika strategi penangkalan digunakan untuk menurunkan niatan dari satu pihak atau pihak-pihak yang bertikai untuk melanjutkan konflik, dengan cara memberikan ancaman yang serius dan mendesak untuk dilakukannya negosiasi oleh pihak-pihak yang bertikai.

Selanjutnya, Morgan (2005) memberikan gambaran mengenai kondisi dimana strategi penangkalan dapat dijadikan sebagai katalisator negosiasi bagi negara-negara yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam hubungannya yang diliputi konflik, seperti dalam kondisi persaingan:

- a. Pihak-pihak yang memiliki strategi penangkalan yang mutual dan kondisi negaranya stabil dan mampu menjaga setiap konflik dalam tataran yang relatif dimaklumi, namun terdapat potensi bahwa salah satu atau banyak pihak yang

- bertikai, atau justru pihak luar, berpotensi untuk merusak keseimbangan keamanan yang telah terjaga
- b. Strategi penangkalan yang digunakan merupakan strategi yang memberatkan bagi pihak lawan. Disini tidak akan terjadi konflik secara langsung, namun konflik akan mendekati kondisi yang tidak dapat diterima.
 - c. Strategi penangkalan yang digunakan merupakan strategi yang memberatkan bagi pihak sendiri. Hal ini kemudian menimbulkan ketakutan akan hilangnya kontrol akan strategi penangkalan tersebut.
 - d. Jika strategi penangkalan membuat para pihak yang bertikai mau untuk melakukan negosiasi dalam rangka penghindaran eksploitasi untuk meredakan atau mengakhiri konflik.

2.8. Terorisme dan Konsep Teroris sebagai *Non-state Actor*

Pascaterjadinya peristiwa 11 September, dunia seakan berubah dari segi perencanaan keamanan dan penggarisan kebijakan. Hal tersebut secara praktis merupakan repetisi dari berakhirnya perang dingin, dimana kebijakan dan armamen yang telah disiapkan sebagai strategi *deterrence* menjadi mencair begitu saja. Pascaperistiwa 11 September, pola hubungan antar negara juga mulai berubah seiring dengan meningkatnya level ancaman terhadap aksi non-konvensional terorisme. Ketegangan, kecurigaan, dan kontrol keamanan dilakukan lebih ketat akan mewarnai interaksi antar negara dan antar kelompok di berbagai bidang. Sebaliknya kerjasama keamanan lebih dilakukan baik bilateral, regional bahkan pada level internasional yang bersifat multilateral.

Hingga saat ini, definisi yang jelas mengenai terorisme belum dapat diberikan dengan sempurna. Meskipun belum ada kesamaan, dapat disarikan definisi terorisme bahwa terorisme dapat diidentifikasi dengan beberapa parameter seperti; tindakan terorisme yang selalu memiliki tujuan-tujuan politik, dilakukan dengan cara-cara kekerasan, dan tidak dapat membedakan antara sasaran kombatan dan non-kombatan. Yang

menarik dari persoalan terorisme adalah, meskipun aksi-aksi terorisme selalu dengan kekerasan, tidak mudah untuk mencapai kesepakatan mengenai cara-cara memerangi terorisme ini.

Salah satu alasan utama dari kesulitan dalam mendefinisikan terorisme adalah bahwa terorisme lebih merupakan persoalan moral. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pandangan terhadap kasus-kasus terorisme, antara yang dapat dimaklumi (*justifiable*) dan yang tidak dapat ditolelir sama sekali. Hal ini juga yang menyebabkan pandangan seseorang terhadap terorisme menjadi sangat subyektif, tergantung seberapa besar arti kasus terorisme tersebut bagi dirinya.

Perdebatan juga terjadi dalam bagaimana membedakan antara teroris (*terrorist*) dengan pejuang kemerdekaan (*freedom fighter*)⁹. Perdebatan ini menciptakan keberpihakan terhadap aksi-aksi teror tertentu. Seperti bagaimana kebanyakan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengatakan bahwa *Palestine Liberation Organization* (PLO) bukanlah kelompok teroris, melainkan pejuang kemerdekaan. Sebaliknya kebanyakan negara-negara Eropa dan terutama Amerika Serikat jelas menyatakan PLO adalah teroris internasional. Contoh lain adalah *Irish Republic Army* (IRA) dan jaringan Al-Qaeda yang disebut-sebut sebagai teroris internasional.

Terorisme bukan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tidak ada terorisme untuk terorisme, kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan (*madness*)¹⁰. Itu sebabnya, dalam aksi terorisme selalu mengandung motif-motif tertentu, seperti motif perang suci, motif politik, ekonomi, balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu.

⁹ Lihat tulisan Paul Wilkinson pada "Terrorism Versus Democracy: The Liberal States Response", 2006

¹⁰ Lihat Jurgen Habermas, "Fundamentalism and Terror" dalam Barradori, Giovanna, *Philosophy in a Time of Terror: Dialogue with Jurgen Habermas and Jaques Derrida*, 2004

Ada banyak definisi terorisme yang ditawarkan, sehingga yang pertama kali harus dibedakan adalah subjek masalah atau apa yang tujuannya serta sifat-sifat subjektif dari terornya. Motivasi akan selalu menyertai aksi-aksi teror yang dilakukan teroris. Terorisme sebagai sebuah proses teror dapat dibedakan melalui tiga elemen: tindakan atau ancaman kekerasan, reaksi emosional seperti ketakutan yang ekstrem dari korban, dan efek atau dampak sosial serta konsekuensi ketakutan dari kekerasan/ancaman.

Secara politis, teror dan terorisme dapat dibagi kedalam empat tipe:

1. *Sub-revolutionary*. Motif-motif politik fundamental singkat dari perubahan revolusioner: sebagai contoh, memaksa pemerintah merubah kebijakan atau hukum, menghukum pejabat, dan untuk perang politik dengan kelompok lawan. Biasanya dijalankan oleh kelompok/grup yang kecil, bahkan mungkin dilakukan secara individual, sangat *unpredictable*, seringkali susah dibedakan antara *psychopathological* dan kekerasan yang bersifat kriminal.
2. *Revolutionary* (Revolusi), atau upaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis revolusi tersebut. Selalu merupakan fenomena kelompok, dengan seorang pemimpin dan sebuah ideologi atau program tertentu, meskipun tidak beraturan. Terorisme jenis ini membangun struktur institusi alternatif. Organisasi teroris biasanya dijalankan oleh para spesialis secara korespirasional dan organ-organ kemiliteran dalam pergerakan revolusinya.
3. *Repressive*: Menekan atau mengekang kelompok-kelompok, individu tertentu atau terhadap sikap dan perilaku yang tidak memuaskan mereka. Harapan yang sangat tinggi diperlihatkan dengan teror pada massa. Biasanya spesialis teror, polisi rahasia, dihidupkan untuk mengusut kelompok ini, sekalipun kelompok ini sering melibatkan partai resmi dan militer/tentara. Pola dasar tekniknya adalah kekerasan. Dalam sebuah negara negara ideologi yang totaliter, terorisme, menakuti, dan kondisi saling curiga dapat meresap dan dikonsumsi dengan mudah, dan dapat menjadi kendaraan paranoid para pemimpin.

4. *Epiphenomenal*. Tidak ada tujuan yang spesifik: dengan menghasilkan kekerasan yang berskala besar. Terlihat lebih serampangan dan tidak hati-hati dalam merencanakan dan mengorganisirnya: Terjadi dalam konteks perjuangan yang penuh harapan dalam mana terorisme dapat saja hanya sebagai element yang menyertai.

Pada perkembangannya istilah terorisme dipakai dalam ruang yang lebih luas. Karena aksi yang dilakukan oleh teroris semakin meluas melewati batas-batas satu wilayah negara, akibatnya ancaman kekerasan yang menyertai aksinya dirasakan lebih mengglobal, artinya wilayah-wilayah ikut merasa terancam. Terorisme internasional juga merupakan eksekusi dari berakhirnya Perang Dunia II, dimana keamanan negara tidak lagi diukur secara konvensional. Keamanan negara juga sangat memperhitungkan isu-isu lain diluar perang antarnegara, seperti konflik internal, globalisasi, pasar bebas, termasuk ancaman terorisme.

Terorisme internasional adalah bentuk kekerasan politik yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara. Ia juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan diluar ketentuan, diplomasi internasional dan perang. Terminologi terorisme internasional seringkali digunakan dengan tidak hati-hati dalam arti bahwa terorisme tidak hanya masalah-masalah melibatkan antar-wilayah saja, tetapi setiap terorisme mempunyai pengaruh dalam persoalan internasional, tidak peduli apakah ia hanya kelompok marginal atau kelompok teroris secara tidak langsung.

Persoalan terminologi ini juga mengalami perdebatan dimana ada penulis yang menyatakan bahwa penggunaan istilah tersebut tidak perlu, karena kata "internasional" tidak pernah secara eksklusif diartikan sebagai hubungan-hubungan antarpemerintah (*inter-governmental relations*), sebagai contoh internasional secara umum juga dipergunakan untuk budaya, ekonomi, dan aktivitas-aktivitas lain serta transaksi-transaksi lain yang melibatkan warga dari negara yang berlainan. Sehingga beberapa penulis lebih suka memakai kata "transnational" bagi kelompok teroris yang

secara internasional beroperasi dengan tujuan jangka panjang revolusi global atau menciptakan revolusi dunia.

Tindakan terorisme juga dapat dikatakan internasional jika secara diam-diam berkolaborasi atau beraliansi sesama teroris dan pemerintah, serta dengan gerakan terorisme di negara lain. Singkatnya, terorisme menjadi internasional dengan beberapa tindakan or yang mendukungnya, antara lain:

- a. Secara langsung di luar negeri atau dengan target luar negeri;
- b. Diselenggarakan oleh pemerintah atau faksi lebih dari satu negara;
- c. Juga mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara lain.

2.9. *State-Sponsored Terrorism*

“*State-sponsored Terrorism*”, juga sering disebut sebagai “*state terrorism*.” Istilah ini dipakai oleh sebagian pakar-pakar terorisme Barat, khususnya Amerika Serikat, sering dirumuskan sebagai tindakan suatu negara mensponsori aktivitas terorisme terhadap negara lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam kerangka ini terorisme adalah alat yang digunakan pemerintah (bertindak atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur. Dinas intelejen Uni Soviet (kini Rusia), KGB, dan CIA memakai terminologi terorisme sebagai instrumen politik negeri kedua negara adidaya itu guna memukul lawan politik dan kepentingan mereka.

Sarana paksa itu sendiri diwujudkan dalam terorisme bermacam-macam, mulai bom-bom berkekuatan kecil hingga berbagai senjata pemusnah massal. Dari sarana paksa untuk menebar teror itulah lahir istilah-istilah *bioterrorism*, *macro terrorism*, *chemical terrorism*, *cyber terrorism*, bahkan ada yang disebut sebagai *military terrorism* dan sebagainya.

Dalam Lingkup *state terrorism* tidak hanya berupa suatu tindakan teror oleh suatu negara kepada negara lain, tetapi juga teror terhadap warga negaranya sendiri. Wujudnya bisa bermacam-macam, seperti penculikan, penyiksaan, atau penghilangan orang. Motifnya juga masih didominasi oleh tujuan politik dan ekonomi, yakni untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan.

Negara sponsor teroris merupakan salah satu faktor kendala penting dalam menganggulangi persoalan terorisme. Sejumlah pemerintah memberikan bantuan perlindungan, dokumen perjalanan, persenjataan, *training*, dan keterampilan teknis. Dalam rangka mendukung kelompok terorisme, beberapa pemerintah mengikat secara langsung terorisme sebagai alat kebijakan domestik dan luar negeri mereka.

Beberapa negara lain, meskipun tidak secara langsung mensponsori kelompok teroris, memberikan kontribusi seperti transit tanpa rintangan, memberikan izin untuk mengoperasikan perusahaan-perusahaan komersial, serta memperbolehkan mereka untuk melakukan rekrutmen dan aktivitas-aktivitas pendukung lainnya.

Amerika Serikat secara khusus mendata negara-negara sebagai sponsor teroris, antara lain: Cuba dengan *El Savador's Farabundo Marti National Front* (FMLN)-nya, Iran dan Iraq dengan kelompok-kelompok perjuangannya, Libya dan Korea yang diduga membantu PLO, serta Korea Utara yang dianggap membantu *Japanese Red Army* (JRA) dalam membajak pesawat di Korea Utara pada tahun 1970. Sementara India menyebut Pakistan memfasilitasi kelompok *Lashkar-e-Taiba* (LeT) Pakistan yang melakukan aksi teror di Mumbai.

BAB 3

INDIA, PAKISTAN, DAN TERORISME

3.1. India

India memiliki nama resmi "*Republic of India*". Negara ini memiliki penduduk sebanyak 1,2 milyar¹ yang 55% persen diantaranya, atau sekitar 645 juta orang, merupakan penduduk miskin². Beribukota di New Delhi, namun Mumbai menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar. India mempunyai luas wilayah sebesar 2,1 juta km², tidak termasuk wilayah Kashmir yang dikontrol oleh India, sebesar 100 ribu km². India memiliki kultur yang sangat beragam, termasuk bahasa dan agama. India memiliki setidaknya 18 bahasa utama, sementara agama didominasi oleh Hindu, Islam, Kristen, Sikh, Budha, dan Jain. Hasil ekspor banyak merupakan produk pertanian, tekstil, perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi, produk kimia, dan produk kulit.

Berdasarkan konstitusinya, India adalah negara yang "berdaulat, sosialis, sekuler, republik yang demokratis." India memiliki bentuk pemerintahan federal seperti Amerika Serikat, Namun, pemerintah pusat India yang didasarkan pada pola sistem parlementer Inggris memiliki kekuatan yang lebih besar dalam pengaturan negara.

India dibagi menjadi 28 negara bagian federal yang kemudian dibagi menjadi distrik-distrik, enam wilayah persatuan (*Union Territory*) dan Wilayah Ibu Kota Nasional (*National Capital Territory*) Delhi. Negara-negara bagian tersebut mempunyai pemerintah yang dilantik sendiri, sementara, wilayah-wilayah persatuan diperintah oleh seorang pengurus yang dilantik oleh pemerintah persatuan (*union government*). Negara-negara bagian tersebut antara lain, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana,

¹ UNdata World Information, "India", PBB, 2010

<http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=INDIA> diakses pada 21 November 2010

² Rukmini Shrinivasan, "55% of India's population poor: Report", Times of India, 2010

<http://timesofindia.indiatimes.com/india/55-of-Indias-population-poor-Report/articleshow/6169549.cms> diakses pada 21 November 2010

Himachal Pradesh, Jammu dan Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal, Uttar Pradesh, dan Bengal Barat. Sementara wilayah persatuan terdiri atas Kepulauan Andaman dan Nicobar, Chandigarh, Dadra dan Nagar Haveli, Daman dan Diu, Lakshadweep, dan Pondicherry.

Kekuasaan administratif Pemerintah berada ditangan presiden, yang sebagian besar tugasnya berupa hal-hal yang terkait dengantugas-tugas seremonial. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung untuk mengisi masa jabatan 5 tahun melalui pemilu khusus. Walaupun tampak demokratis, namun pada dasarnya kurang sesuai dengan kaidah demokrasi, dimana di India, wakil presiden tidak secara otomatis menjadi presiden apabila presiden meninggal atau diberhentikan dari jabatannya.

Kekuasaan eksekutif secara nyata berada ditangan Dewan Menteri (kabinet) yang dipimpin oleh perdana menteri. Perdana menteri ditunjuk oleh presiden dari calon-calon yang diangkat oleh para legislator partai politik atau koalisi memerintah mayoritas di dalam parlemen. Presiden kemudian juga menunjuk para menteri atas nasihat atau saran dari perdana menteri.

Sistem konstitusi India sangatlah fleksibel. Sejak 1950 hingga Agustus 1996, konstitusi India telah mengalami perubahan sebanyak 80 kali. Parlemen India menganut sistem bikameral yang terdiri dari *Rajya Sabha* (Dewan Negara) dan *Lok Sabha* (Perwakilan Rakyat), dimana dewan menteri bertanggung jawab kepada *Lok Sabha*. Badan legislatif negara bagian dan wilayah persatuan dalam prakteknya memilih 233 anggota *Rajya Sabha*, dan presiden menunjuk 12 anggota yang lain. Para anggota terpilih dari *Rajya Sabha* selanjutnya akan mengisi jabatannya selama enam tahun. *Lok Sabha* terdiri dari 545 anggota yang dipilih secara langsung untuk mengisi masa jabatan selama lima tahun³.

³ James Heitzman dan Robert L. Worden, "India: A Country Study", Federal Research Division, 1995
<http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/intoc.html> diakses pada 21 November 2010

Seperti telah disebutkan diatas, banyak negara bagian yang merasa bahwa penguasaan atas negara-negara federal tersebut masih sangat didominasi oleh negara. Hal ini berimplikasi pada metamorfosa negara-negara bagian menjadi oposisi utama dari lembaga eksekutif nasional. Perjuangan untuk itu diwujudkan dalam berbagai cara, baik yang legal, maupun yang tidak legal guna memperoleh otonomi daerah. Sebagian besar negara bagian telah mengembangkan identitas politik tertentu berdasarkan etnis mayoritasnya yang dicapai melalui sejarah yang panjang. Salah satu identitas etnik mereka adalah bahasa. Salah satu contohnya adalah terbentuknya negara bagian Andhra Pradesh pada tahun 1950-an, dimana bahasa kemudian dijadikan sebagai batas-batas negara-negara bagian di India. Sementara pada tahun 1960, identitas etnis Tamil menjadikan terbentuknya negara bagian Tamil Nadu⁴.

Di timur laut India, identitas-identitas kesukuan bersatu dan berjuang bersama yang mengakibatkan terbentuknya sejumlah negara-negara bagian kecil yang didasarkan atas dominasi kelompok suku tertentu. Di bagian selatan, di daerah Kerala dan Bengal Barat, partai komunis dengan mengatasnamakan perwakilan regional telah berhasil masuk kedalam elemen pemerintah pusat dan terus berupaya untuk melaksanakan program-program sosialis radikal yang bertentangan dengan keinginan pemerintah pusat⁵.

Pergerakan regional yang paling mengancam integrasi nasional India terjadi di bagian barat laut. Oleh pemerintah India, negara bagian Punjab telah dibagi sebanyak dua kali setelah kemerdekaan, dengan membagi negara bagian Haryana dan Himachal Pradesh. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi pencapaian mayoritas dari populasi Sikh yang memang menghuni wilayah Punjab. Perjuangan separatis melalui parlemen pernah terjadi ketika partai politik Sikh dibawah Akali Dal (Partai Abadi) menjadi salah satu elemen negara awal tahun 1980⁶. Kemudian, muncul elemen-elemen separatis radikal yang bertekad dan berjuang

⁴ Departemen Luar Negeri Amerika, "Background Note: India", Badan Hubungan Asia Selatan

⁵ Ibid

⁶ Ibid

untuk kemerdekaan Punjab oleh kelompok Sikh, salah satunya terwujud dengan adanya pendudukan *the Golden Temple* di Amritsar. Ketika Indira Gandhi memerintahkan untuk melakukan penyerbuan militer ke kuil tersebut, ia ditembak oleh oleh pengawal pribadinya yang merupakan etnis Sikh.

Selain Punjab, juga terdapat daerah yang rawan disintegrasi yang diwarnai oleh identitas agama, yaitu daerah Jammu dan Kashmir. Hal ini kemudian berkali-kali mejadi potensi ketegangan antara India dan Pakistan, yang juga sering kali melakukan klaim atas wilayah Kashmir. Pemerintah India mempunyai dua standar yang berbeda dalam menangani permasalahan dalam negerinya. Pemerintah pusat India bersedia untuk melakukan redefinisi batas-batas negara bagian dan memberikan jaminan pemerintahan otonomi daerah, termasuk pengendalian politik negara bagian oleh partai politik daerah, seperti yang terjadi pada pembentukan batas negara bagian berdasar garis bahasa asli pada tahun 1970-an. Namun, ketika kepentingan keamanan nasionalnya diganggu gugat, maka Pemerintah India tidak ragu untuk menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi di Punjab dan Jammu dan Kashmir.

Saat ini presiden India dijabat oleh Pratibha Patil. Pratibha Patil yang berasal dari negara bagian Rajastan bagian barat laut, daerah yang sebagian besar merupakan padang pasir, merupakan presiden India masa jabatan 2007-2012. Ia merupakan presiden perempuan pertama India setelah terpilih oleh anggota majelis negara bagian dan parlemen nasional pusat. Sebelumnya, India telah memiliki beberapa wanita dalam posisi yang kuat, terutama Indira Gandhi yang merupakan salah satu perdana menteri pertama di dunia pada tahun 1966.

Seperti telah disebutkan diatas, presiden India memiliki kekuatan yang tidak besar dan hanya berfokus pada masalah-masalah seremonial, tetapi presiden India dapat menentukan partai atau individu harus membentuk pemerintah pusat setelah pemilihan umum.

Manmohan Singh, seorang suku Sikh yang lahir di Punjab Barat, merupakan perdana menteri India yang telah menjabat sejak 2004 menggantikan perdana menteri sebelumnya, Atal Vajpayee. Manmohan Singh kembali terpilih menjadi perdana menteri India pada 2009. Dalam pengangkatan dirinya menjadi perdana menteri, Manmohan Singh menyatakan bahwa dirinya memiliki prioritas untuk mengurangi kemiskinan dan untuk memperbaiki kondisi ekonomi India dengan melakukan reformasi ekonomi. Ia juga menyatakan keinginan untuk terus menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga India, khususnya Pakistan.

Selama tahun pertama masa jabatannya, ia bekerja dengan partai-partai komunis dan juga bersama menteri-menteri dituduh melakukan korupsi. Namun, ia berhasil dalam mengejar kebijakan ekonomi yang baik serta melakukan rancangan terhadap undang-undang non-proliferasi nuklir. Dalam masalah perekonomian, dirinya telah mempunyai nama ketika menjabat sebagai menteri keuangan di awal tahun 1990-an di bawah pemerintahan Narasimha Rao. Pada masa itu, ia merupakan salah satu pendorong liberalisasi ekonomi. Sebelumnya, ia merupakan mantan anggota IMF, dan juga mantan gubernur Bank India.

3.2. Pakistan

Pakistan merupakan negara yang mengambil konsep sebagai Republik Islam Pakistan dengan nama resmi "*Islamic Republic of Pakistan*". Pakistan merupakan negara yang terletak di sub-kontinen India dan beribukota di Islamabad. Negara yang memiliki luas wilayah sebesar 796.095 km², belum termasuk wilayah Kashmir yang dikelola oleh Pakistan seluas 83.716 km², ini berpenduduk sebanyak 184.700.000⁷. Bahasa resmi Pakistan adalah bahasa Urdu, sementara bahasa lain yang sering dipakai dalam kesehariannya adalah bahasa Inggris, Punjabi, Sindhi, Pashto, dan Balochi. Mayoritas penduduknya, sekitar 97%, beragama Islam. Sektor perekonomian makro mengandalkan ekspor produk tekstil, beras, kulit, produk olahraga, dan lainnya.

⁷ UNdata World Information, "Pakistan, PBB, 2010
<http://data.un.org/CountryProfile.aspx?cname=Pakistan> diakses pada 21 November 2010

Di timur, Pakistan berbatasan dengan India. Di barat, berbatasan dengan Iran dan Afghanistan. Di utara, dengan Afghanistan dan Cina. Di selatan, dengan laut Arab dan teluk Oman. Pakistan memiliki luas wilayah sebesar 703.943 Km, yang terbagi atas empat propinsi: Baluchistan, Sindh, Punjab, dan wilayah Barat Daya. Dalam konstelasi politik luar negerinya, dapat dikatakan bahwa Pakistan menjalin hubungan baik dengan Barat di satu pihak⁸, sedangkan disisi lain dengan Cina yang masih berpegang pada ideologi komunis⁹.

Republik Islam Pakistan berdiri dengan jasa Muhammad Ali Jinnah yang menghendaki pendirian negara Islam sebagai tanah air bagi orang Islam dalam bangsa terpisah di anak benua India agar mampu menerapkan ajaran Islam dan hidup selaras dengan petunjuknya. Pada 23 Maret 1947 Liga Muslim India (*All Indian Moslem League*) mengeluarkan resolusi yang terkenal dengan nama Resolusi Pakistan. Dalam resolusi tersebut, kaum Muslim India yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, berjanji untuk memperjuangkan terbentuknya negara muslim.

Pendirian Liga Muslim India dimaksudkan sebagai respon terhadap gerakan nasionalisme Hindu yang disuarakan Partai Kongres Nasional India. Dan pendirian Liga Muslim India ini mengawali munculnya gerakan nasionalisme India karena dalam perkembangannya, Liga muslim India menuntut terbentuknya pemerintahan sendiri.

⁸ Hubungan dengan Barat dijadikan suatu daya tawar yang dipandang sangat baik bagi Pakistan, khususnya dalam kaitannya dengan permasalahan Terorisme dan Kontra-Terorisme. Hal ini banyak disebabkan oleh masih banyaknya kelompok militan di Pakistan, dimana pemerintah Pakistan sendiri kurang mampu melakukan upaya penanggulangan, yang erat kaitannya dengan kelompok militant internasional. Sebagaimana diketahui bahwa daerah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan merupakan *breeding ground* bagi beberapa kelompok militan, khususnya di daerah Waziristan (wilayah Afghanistan). Hal ini yang kemudian menjadikan Pakistan menjadi poin penting bagi negara-negara Barat untuk menempatkan strategi kontra terornya di wilayah Pakistan.

⁹ Kerjasama dengan Cina dilakukan oleh perwira militer Pakistan setelah pihaknya selesai dalam asistensi militer oleh Amerika. Lihat Kotera M. Bhimaya, dalam "Nuclear Deterrence in South Asia: Civil-Military Relations and Decision Making," *Asian Survey* Vol. XXXIV. No 7, July 1994.

Elit-elit muslim yang memprakarsai kemerdekaan Pakistan melihat adanya kesadaran komunal akan pentingnya negara bagi komunitas Muslim. Selain itu mereka juga memperjuangkan hak-hak warga negara yang Muslim untuk menjalankan keyakinan mereka secara aman dan tanpa ada tekanan dari pihak agama lain¹⁰. Para elit ini juga mengkhawatirkan identitas Muslim mereka dan berkembangnya kekuasaan mayoritas Hindu.

Ide mengenai negara Pakistan yang dikeluarkan oleh Ali Jinnah semakin berkembang dalam pembentukan Pakistan sebagai tujuan perjuangan. Tujuan itu menjadi kenyataan saat Pakistan diproklamkan sebagai negara merdeka pada 14 Agustus 1947 yang kedaulatannya meliputi wilayah Sind, Punjab, Baluchistan, provinsi di Barat Laut dan Benggala.

Pakistan sebagai negara yang dibentuk atas dasar Islam menunjukkan keadaan yang kurang memuaskan pada periode pascakemerdekaan hingga tahun 1970. Dalam periode tersebut, tidak terdapat adanya kestabilan politik dan kesamaan visi yang mampu memberikan sumbangan kepada perkembangan suatu ideologi Islam yang kuat dan berguna sebagai dasar dari persatuan nasional di tengah perbedaan-perbedaan bahasa dan regional yang terdapat di Pakistan.

Beberapa pengamat Pakistan menyimpulkan bahwa dari periode 1947 hingga 1970, Pakistan lebih banyak berdebat tentang bagaimana ideologi Islam itu dapat diterapkan dalam negara. Perdebatan itu meliputi tokoh modernis, nasionalis sekuler, dan kelompok Islamis tradisional yang menginginkan syari'at Islam diterapkan secara ketat.

Abul A'la Maududi merupakan individu yang mewakili kaum tradisional yang mendesak diterapkannya norma-norma syariah yang lebih ketat, sehingga pada tahun 1956, sebuah konstitusi secara resmi menjadikan Pakistan sebagai Republik Islam. Dari golongan modernis, Fazlur Rahman muncul untuk memberikan gambaran tentang negara Islam yang lebih modern berdasarkan kedaulatan rakyat.

¹⁰ Di India, nampak sekali adanya supremasi agama Hindu. Hal ini sering kali dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan yang disebut sebagai pemurnian India.

Sementara Jenderal Muhammad Ayub Khan merupakan contoh khusus dari pemikir sekularisme. Dia menasionalisasi sumbangan-sumbangan religius, membatasi pendidikan madrasah, dan mengembangkan sistem hukum sekuler. Tujuannya adalah menjadikan Islam sebagai agama sipil, yang bisa dikendalikan negara, tetapi keinginan ini menyebabkan ketegangan dengan para ahli agama Islam dan menyebabkan jatuhnya pemerintahan Ayub Khan.

Selama tahun 1970-an, kekuatan para ahli agama Islam menjadi kekuatan oposisi utama melawan pemerintahan, dan sebagai seorang beraliran kiri dan sekularis, Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto meredakan gerakan mereka dengan melarang judi dan alkohol, Tetapi pada periode ini akhirnya Pakistan tetap digerakkan dengan semangat sekuler.

Hal ini melegitimasi kenyataan, meskipun Pakistan menyatakan dirinya sebagai negara Islam, tidak satupun program yang pernah disusun untuk menerapkan Islam. Dalam rentang waktu 30 tahun itu, tidak heran muncul tuduhan bahwa Islamisasi tidak lebih hanya sebagai contoh penggunaan Islam sebagai alat oleh rezim yang berkuasa untuk menegakkan keabsahan politiknya.

Islamisasi mula-mula muncul sebagai kebijakan negara yang lahir di bawah pemerintahan Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977). Ali Bhutto datang membawa tawaran baru, yaitu mengawinkan Islam dengan Sosialisme. Upaya ini mendapat sambutan hangat dari rakyat Pakistan.

Bhutto mempergunakan ungkapan-ungkapan keagamaan yang mampu membangkitkan emosi, seperti misalnya *Musawat-i Muhammadi* (persamaan Muhammad) dan *Islami Musawat* (persamaan Islam) sebagai bagian dari kepandaian mengucapkan pidato politik untuk membenarkan kebijakan pemerintahannya yang bersifat sosialis dan untuk memperoleh dukungan massa bagi kebijakannya.

Ketika agitasi anti pemerintah¹¹ pecah di pusat-pusat pertokoan utama, pemerintah berusaha untuk mengakhiri keadaan ini dengan mengumumkan reformasi “Islam” dengan menentukan Jumat sebagai hari libur umum mingguan dan mengumumkan langkah-langkah yang melarang konsumsi alkohol, perjudian dan pacuan kuda. Manifesto pemilihan Partai Rakyat Pakistan tahun 1977 juga memasukkan persetujuan partai untuk:

- a. Menjadikan pengajaran al-Quran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum.
- b. Mengembalikan masjid ke tempat tradisionalnya selaku pusat terpenting masyarakat.
- c. Mendirikan Akademi Ulama Negeri untuk mendidik Imam dan Khatib di masjid-masjid.
- d. Menjadikan tempat keramat orang suci yang terhormat sebagai pusat pengajaran Islam.
- e. Meningkatkan fasilitas untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji.
- f. Memperkokoh Institut Penelitian Islam di Islamabad.

Ali Bhutto akhirnya dijatuhkan melalui kudeta Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan Jenderal Zia ul-Haq Juli 1977 dengan alasan tingkah lakunya yang tidak Islami dan keakrabannya dengan isu demokrasi kebarat-baratan, kemudian ia digantung dengan tuduhan terlibat konspirasi untuk membunuh ayah politisi Ahmed Reza Kasuri.

Ali Bhutto kemudian digantikan oleh Ziaul-Haq, yang mengembalikan aturan pakaian tradisional Muslim dan memberlakukan kembali hukuman yang Islami dan hukum komersial. Tetapi Presiden Zia sendiri juga menjauhkan Islam dari masalah-masalah politik dan ekonomi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan sekularis.

¹¹ Gerakan yang dipimpin oleh Persekutuan Nasional Pakistan yang pemimpin-pemimpinnya menggunakan Islam untuk menggerakkan orang-orang untuk melawan pemerintahan Bhutto

Secara populer, upaya Islamisasi Pakistan itu disebut dengan *Nizam-i-Islami*. Namun, kampanye dan program Nizam-i-Islami itu tidak lebih sebagai pendekatan politik penerapan hukum Islam yang pada akhirnya disikapi secara politis oleh kelompok oposisi. Sementara itu disisi yang lain, respon rakyat terhadap program itu biasa-biasa saja. Akhirnya program itu tidak lebih hanya perdebatan kalangan elit Pakistan.

Setelah Zia ul Haq, muncul Benazir Bhutto, putri mendiang Zulfikar Ali Bhutto, yang menjadi perdana menteri wanita pertama di Republik Islam Pakistan. Pemimpin perempuan merupakan suatu yang masih diperdebatkan terutama di Pakistan yang pada Era Zia ul-Haq diharamkan. Benazir Bhutto telah menjadi zaman peralihan dari era perdebatan mengenai identitas Islam kepada wacana hubungan Islam dan demokrasi (termasuk masalah gender), sekaligus menjadi tanda bagi kemenangan demokrasi atas rezim militer.

Platform demokrasi yang ingin ditegakkan oleh Dinasti Bhutto adalah mengkritisi dominasi militer. Akibatnya Benazir selalu berseberangan dengan para jenderal militer. Salah satu janji Benazir jika dia memenangi pemilu dan menjadi perdana menteri kembali adalah mengefisiensikan dana militer. Sebuah pilihan demokratis namun tidak populer bagi kalangan militer.

Benazir kemudian digantikan oleh Nawaz Sharif, seorang pengikut setia Zia ul-Haq. Sharif menjadi PM setelah Partai Liga Muslimin Pakistan yang dipimpinnya menang pemilu dan mempunyai kursi mayoritas di parlemen. Dalam perjalanan pemerintahannya, Sharif bersitegang dengan militer yang kemudian dikudeta oleh Musharraf yang saat itu duduk dalam struktur Dewan Keamanan Nasional.

Beberapa pemimpin senior militer lalu mendukung Musharraf dalam kudeta damai terhadap Sharif. Kepemimpinan Musharraf pun tetap bertahan setelah didukung dengan partai-partai di Pakistan. Namun, kepemimpinan Musharraf yang didukung oleh partai-partai di Pakistan tidak luput dari konflik. Bentrokan

berdarah di sejumlah wilayah Pakistan awal Maret 2007 merupakan klimaks dari krisis politik yang menimpa Presiden Pervez Musharraf.

Saat ini Pakistan dipimpin oleh Presiden Asif Ali Zardari yang memenangkan pemilihan presiden tanggal 6 September 2008 dengan suara mayoritas. Pemilu tersebut dilaksanakan oleh legislatif Pakistan setelah presiden Pakistan sebelumnya, Pervez Musharraf, mengundurkan diri di bawah ancaman impeachment. Dalam upacara pelantikannya, Zardari mengatakan bahwa ia menerima jabatan presiden tersebut atas nama istrinya, Benazir Bhutto yang terbunuh pada 2007.

Asif Ali Zardari terlahir pada 26 Juli 1955 dari pasangan keluarga terkemuka di provinsi Sindh, Pakistan. Ia memiliki satu orang anak lelaki dan dua orang anak wanita. Putranya, Bilawal Zardari, menjadi salah satu ketua dari Partai Rakyat Pakistan.

Sebelum menjabat presiden Pakistan, ia pernah memegang jabatan menteri lingkungan federal dan menteri investasi federal pada saat pemerintahan Benazir Bhutto. Zardari pun pernah mengabdikan sebelas setengah tahun masa hidupnya di penjara atas tuduhan korupsi dan pembunuhan, yang akhirnya dinyatakan tidak terbukti.

Pada bulan April 2010, Presiden Zardari dipanggil oleh parlemen Pakistan dan diperkenalkan mengenai proposal reformasi konstitusional sebagai jalan keluar dari pengurangan kekuasaan presiden sebagai hasil dari diktatorian penguasa militer selama 40 tahun. Hal ini berdampak pada penghapusan hak-hak untuk membubarkan parlemen, memecat pemerintah, dan memberikan kuasa yang berlebihan kepada kepala militer. Hal ini secara tidak langsung juga menjadikan fungsi presiden sebagai fungsi seremonial. RUU reformasi konstitusional ini kemudian diterima oleh majelis parlemen dengan dukungan yang luar biasa.

Dalam pelantikannya, Presiden Zardari berjanji untuk mengatasi masalah militansi Islam di dalam negaranya setelah India menyatakan bahwa Pakistan turut bertanggung jawab atas serangan Mumbai 2008. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Pakistan siap bekerjasama dengan negara lain dalam melakukan 'perang melawan terorisme.'

Yusuf Raza Gilani merupakan Perdana Menteri Pakistan pada saat ini. Ia menjadi kepala pemerintahan koalisi pada Maret 2008, setelah Partai Rakyat Pakistan/PPP memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan pada bulan Februari.

Gilani lahir pada tahun 1952 di Karachi. Keluarganya berasal dari Punjab dan aktif dalam politik Punjabi selama beberapa generasi. Kakeknya dan saudara kakenya merupakan anggota dari *All-India Muslim League*, dan ayahnya pernah menjabat sebagai salah satu menteri selama tahun 1950-an.

Gilani merupakan figur yang dihormati dalam PPP sejak lama. Ia bergabung dengan PPP pada tahun 1988, dan kemudian mendapatkan reputasi kesetiaan atas keluarga Bhutto. Gilani menjadi juru bicara parlemen dari tahun 1993 hingga 1996, selama masa jabatan yang kedua kalinya pemerintahan perdana menteri Benazir Bhutto. Pada tahun 2001, dua tahun setelah Pervez Musharraf merebut kekuasaan dalam kudeta militer, Gilani dinyatakan bersalah atas tuduhan membuat perjanjian ilegal pemerintah dan dipenjara selama lima tahun. Dalam pembelaannya, Gilani mengatakan bahwa tuduhan itu dilakukan agar ia keluar dari PPP.

3.3 Sejarah Eskalasi Konflik India dan Pakistan

Eskalasi konflik yang termanifestasikan dalam bentuk perang antara India dan Pakistan telah terjadi sejak Agustus 1947. Terdapat tiga perang utama dan satu perang kecil antara kedua negara. Penyebab utama tiap perang ini disebabkan oleh sengketa wilayah Kashmir yang diperdebatkan, dengan pengecualian Perang

India-Pakistan pada tahun 1971 yang disebabkan oleh masalah wilayah Pakistan Timur.

3.3.1. Perang India-Pakistan 1947¹²:

Bulan Oktober 1947, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh milisi-milisi muslim di Kashmir Barat & suku-suku dari Pakistan. Pakistan secara sepihak merebut 1/3 wilayah Kashmir dengan bantuan suku Pashtun. Niatan dari pemberontakan ini adalah pengusiran kaum Hindu dan Sikhs dari wilayah Kashmir Pakistan. Pemberontakan tersebut lalu direspon dengan pengiriman pasukan India ke sejumlah wilayah Kashmir atas permintaan dari pemimpin lokal Kashmir. Pakistan yang melihat bahwa pengiriman pasukan India merupakan bentuk intervensi militer akhirnya ikut serta mengirimkan pasukannya ke Kashmir.

Perang India-Pakistan 1947 berlangsung selama satu tahun hingga berakhir pada 1948 dengan difasilitasi oleh PBB. Perang ini merupakan perang pertama dari empat perang yang terjadi antara India dan Pakistan.

3.3.2. Sengketa di Wilayah Perbatasan 1965

Selain wilayah Kashmir, Pakistan & India juga bersengketa seputar wilayah lain di perbatasan, salah satunya daerah *Rann of Kutch* yang saat itu merupakan bagian dari Gujarat, India. Konflik terbuka atas wilayah tersebut akhirnya meletus pada bulan Maret 1965 setelah India mengklaim bahwa Pakistan melakukan provokasi terlebih dahulu.

Konflik atas wilayah *Rann of Kutch* berakhir pada bulan Juni 1965 melalui perundingan yang difasilitasi PM Inggris, Harold Wilson. Dalam perundingan itu, Pakistan mendapat wilayah bagian dari *Rann of Kutch*

¹² Maj Gen LP Sen, dalam *Slender Was the Thread: The Kashmir confrontation 1947-1948*, Orient Longmans Ltd, 1969.

sebesar 900 km². Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari klaim Pakistan dimana mereka merasa berhak atas wilayah *Rann of Kutch* seluas 9.100 km². Meskipun demikian, Pakistan menganggap militer mereka berhasil karena pasca perang, Pakistan mendapatkan sebagian wilayah yang sebelumnya dimiliki India.

3.3.3. Perang India-Pakistan 1965¹³

Perang ini disebut sebagai Perang Kashmir Kedua, adalah perang yang terjadi antara India dan Pakistan pada Agustus 1965 sampai September 1965. Perang ini adalah pertempuran kedua antara India dan Pakistan terhadap wilayah Kashmir. Perang ini dimulai dengan kegagalan Pakistan dalam operasi Gibraltar yang bertujuan untuk memasuki wilayah Kashmir India untuk memicu pemberontakan oleh warga Kashmir. Namun, penyusup yang merupakan pasukan Pakistan ditemukan oleh militer India dan terjadilah perang selama lima minggu, yang memakan ribuan korban jiwa pada dua belah pihak. PBB memprakarsai gencatan senjata diantara kedua pihak dan berujung pada resolusi pengalihan kepemilikan sedikit wilayah Pakistan kepada India.

3.3.4. Perang India-Pakistan 1971¹⁴.

Perang India-Pakistan 1971 adalah konflik utama antara India dan Pakistan. Perang ini dimulai dengan permintaan kemerdekaan oleh Bangladesh. Perang dimulai antara India dan Pakistan pada 3 Desember 1971 dan berakhir pada 16 Desember 1971. Jutaan orang mengungsi ke India. Dalam proses peperangan, India membantu elemen kemerdekaan Bangladesh, *Mukti-Bahini Bangladesh*, dalam perjuangannya melawan Pakistan Perang ini berakhir dengan kekalahan Pakistan, dan Bangladesh mendapatkan kemerdekaannya.

¹³ Global Security, "Indo-Pakistan War of 1965", Global Security, 2008
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/indo-pak_1965.htm diakses pada 18 Oktober 2010

¹⁴ Lihat Time Magazine, "India and Pakistan:Poised for War", Majalah TIME, Desember 1971

3.3.5. Konflik Siachen 1984¹⁵

Konflik Siachen atau Perang Siachen adalah konflik militer antara India dan Pakistan di wilayah Siachen, Kashmir. Perang ini dimulai pada tahun 1984 dengan dilakukannya Operasi Meghdoot oleh India. Lebih dari 4.000 orang tewas yang dikarenakan medan yang sangat tidak kondusif, yaitu berada pada ketinggian dan cuaca yang ekstrim.

3.3.6. Konflik Kargil: Perang Terbatas India-Pakistan 1999¹⁶

Perang India-Pakistan 1999 dikenal dengan istilah Perang Kargil. Perang terjadi antara Mei hingga Juli 1999 di distrik Kargil, Kashmir. Penyebab perang ini adalah masuknya pasukan Pakistan dan militan Kashmir ke wilayah India serta melakukan pendudukan terhadap pos tentara India pada *Line of Control*, yang merupakan perbatasan *de facto* antara kedua negara. Segera setelah perang, Pakistan menyalahkan pertempuran ini seluruhnya terhadap pemberontak Kashmir. Angkatan Bersenjata India, didukung oleh Angkatan Udara India, menyerang posisi Pakistan, dengan bantuan diplomatik internasional, yang memaksa membuat Pakistan untuk mundur dari distrik Kargil. Perang berakhir dengan India penguasaan India atas Kargil serta pemberlakuan isolasi diplomatik terhadap Pakistan.

3.4. Kashmir: Akar Permasalahan

Kashmir merupakan wilayah di utara sub-benua India. Wilayah ini memiliki luas 222.236 kilometer dan terletak di wilayah jantung Asia, diapit oleh China di sebelah timur, India di selatan, Pakistan dan Afghanistan di barat, serta CIS di utara. Secara politik, istilah Kashmir dapat dijelaskan sebagai wilayah yang mencakup wilayah Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Kashmir merupakan wilayah dengan mayoritas berpenduduk muslim. Sekitar 85% dari delapan juta penduduknya beragama Islam.

¹⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Konflik Siachen", wikipedia, 2009
http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Siachen diakses pada 19 Oktober 2010

¹⁶ M.K. Akbar, *Kargil Cross Border Terrorism*, South Asia Books, 1999

Dalam masa damai, wilayah Kashmir dikenal dengan sebutan “Surga Dunia”, karena keindahan alamnya yang indah. Kekayaan alam Kashmir ini sedikitnya memberikan pemasukan devisa sekitar 400 juta dolar per tahun dari para wisatawan. Seperti di ibukota Kashmir, Srinagar, yang terletak di dekat danau Dal, dan banyak dikunjungi wisatawan karena keindahan kanal dan rumah perahunya. Di luar kota Srinagar, terdapat taman yang terkenal yakni taman Shalimar yang dibuat oleh Jehangir, Kaisar Mughal pada tahun 1619. Namun, keindahan Kashmir tersebut menjadi kurang signifikan dengan adanya fakta bahwa Kashmir merupakan akar permasalahan konflik diantara dua negara: India dan Pakistan.

Daerah Kashmir dibagi kedalam penguasaan tiga negara; Pakistan mengendalikan bagian geografis barat laut yang terdiri atas Kashmir wilayah utara dan Azad Kashmir, India mengendalikan kota pusat dan bagian selatan yang meliputi Jammu dan Kashmir, serta Ladakh, dan China menguasai bagian timur laut yang meliputi Aksai Dagu dan Trans-Kakakoram, yang lebih familiar disebut dengan Aksai Chin. Meskipun wilayah ini dalam prakteknya diatur oleh ketiga negara tersebut, India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah yang dikuasai oleh Pakistan dan China. Pemerintah India juga mengklaim bahwa wilayah Kashmir adalah termasuk kedalam kedaulatan negaranya. Pakistan berpandangan bahwa wilayah Kashmir adalah wilayah yang dipertentangkan, dan tidak menganggap klaim India atas wilayah ini¹⁷.

Perselisihan berkepanjangan antara India-Pakistan yang bermuara di Kashmir ini tak lepas dari adanya konflik agama diantara Islam dan Hindu, serta permasalahan politik, baik di antara negara-negara yang bertikai, maupun negara-negara lain yang mempunyai kepentingan politik terhadap mereka, seperti Inggris, Amerika, dan Rusia.

¹⁷ UN Resolution, "Kashmir - The History", Pak-UN
<http://www.pakun.org/kashmir/history.php> diakses pada 21 November 2010

Penduduk Kashmir yang mayoritas beragama Islam sangatlah dapat dipahami apabila mereka berkeinginan untuk memisahkan dari kekuasaan pemerintahan India yang didominasi penganut agama Hindu dan bergabung kedalam kedaulatan Pakistan yang mengusung Islam sebagai dasar negaranya. Terlebih dengan adanya praktek-praktek pemaksaan dan penindasan pemerintah India yang didominasi oleh agama Hindu, terhadap penduduk muslim Kashmir¹⁸.

Jika kita melihat awal pembentukan kedua negara yang berpisah dari jajahan Inggris, pada waktu itu sebanyak 562 *Princely State* (negara kepangeranan) sub-kontinen India berhak memilih untuk bergabung dengan negara India atau Pakistan. Pemilihan tersebut mayoritas didasarkan atas kesamaan kultur dan agama, sehingga secara mayoritas tidak terdapat masalah yang berarti diantara wilayah-wilayah tersebut. Namun, terdapat tiga wilayah yang sulit menentukan pilihan mengingat di ketiga wilayah tersebut terdapat perbedaan antara agama yang dianut oleh penguasa dan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk.

Pemerintah India secara mandiri menyelesaikan permasalahan di Hyderabad dan Junagad, dimana mayoritas penduduknya beragama Hindu tetapi penguasanya beragama Islam agar menjadi bagian dari India secara paksa. Namun tidak demikian dengan wilayah Jammu dan Kashmir, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, sementara penguasanya beragama Hindu, yang tidak dapat diupayakan untuk menjadi bagian dari Pakistan. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan Pemerintah India yang memberi dukungan kepada penguasa Jammu dan Kashmir, Harry Singh yang dalam masa pemerintahannya tergolong otoratif.

Melihat pola kependudukan di wilayah Kashmir, Pakistan sebagai negara Islam berinisiatif untuk menjadi *the Mother Land* bagi kaum muslim yang tersingkir

¹⁸ Lihat M Shamsur Rabb Khan, "Kashmir: Giving Cause To Separatism", 2009, disini diungkapkan mengenai tragedi Poshpura dan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan India terhadap warga Kasmir disaat mereka mempunyai niat yang kuat dalam proses pembicaraan damai di wilayah Kashmir pada tahun 1990-an.
<http://muslimindia.in/2009/06/kashmir-giving-cause-to-separatism/> diakses pada 21 November 2010

dari India akibat tindakan politik golongan Hindu. Karenanya, Pakistan menginginkan Kashmir menjadi negeri yang kuat dalam bidang politik, ekonomi dan militer. Sementara itu, India memiliki pandangan bahwa penguasaan atas Kashmir merupakan hal yang sangat krusial karena dari segi politik, penguasaan atas Kashmir, Tibet, dan Srilangka akan memberikan keuntungan geografis yang signifikan, dengan begitu India akan mampu melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap negara-negara tetangganya. Pun juga dengan adanya fakta bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah-wilayah suci bagi umat Hindu.

Selain itu, Pakistan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kashmir. Hal ini menyangkut potensi alam yang besar di Kashmir, dan juga karena keberadaan sungai-sungai besar di Kashmir akan sangat menentukan kondisi perairan di Pakistan, yang apabila keseluruhan air sungai tersebut didominasi oleh India dan digunakan sepenuhnya oleh India, maka Pakistan akan menjadi wilayah yang tandus.

Konflik akhirnya mengalami eskalasi hingga sampai pada peperangan antara India dan Pakistan pada tahun 1947. Intervensi politik internasional akhirnya memberikan jalan tengah dengan adanya upaya PBB untuk memberikan inisiatif dengan mengajukan suatu plebisite^{19 20}. Namun usaha ini tidak pernah terlaksana. India tidak mau mengikuti resolusi PBB ini dan terus melakukan klaim Kashmir sebagai wilayah terintegrasi dengan India. Hal ini akhirnya kemudian bermetamorfosis menjadi fenomena perang terbuka antara India dan Pakistan pada tahun 1965. Perang berakhir setelah kedua pihak menandatangani deklarasi Tashken yang disponsori PBB, yang berisi komitmen kedua pihak untuk mempertahankan garis perbatasan sebelumnya (*Line of Control/LoC*)²¹. Untuk lebih menjamin keberlangsungan perdamaian maka diadakan kembali perjanjian

¹⁹ Plebisite/plebisit dalam arti lain merupakan referendum, yaitu melakukan penentuan sendiri atas nasib sendiri.

²⁰ Ashutosh Varshney, "India, Pakistan and Kashmir: Antinomies of Nationalism", *Asian Survey*, Vol. XXXI, No. 11, November 1991

²¹ "Elang dan Api Membayangi di Himalaya", dalam *Tempo* 13 Januari 2002

SIMLA di akhir 1972²². Namun konflik pecah kembali tatkala pemerintah India secara represif melakukan tindakan kekerasan, pemerkosaan terhadap penduduk Muslim Kashmir yang kemudian dikenal dengan tragedi Poshpura, Februari 1992²³.

Permasalahan antara India dan Pakistan menjadi semakin rumit ketika di dalam masyarakat Kasmir sendiri terpecah menjadi tiga faksi. Sebagian masyarakat Kasmir yang beragama Hindu, yang umumnya berada di wilayah Jammu, mendukung integrasi dengan India, sementara mayoritas muslim Kashmir mendukung integrasi dengan Pakistan yang memang berupaya mengakomodasi warga muslim di wilayah sub-kontinen India tersebut, sementara di lain pihak muncul kelompok nasionalis Kashmiri yang berjuang demi kemerdekaan Kasmir tanpa harus berintegrasi dengan Pakistan maupun India.

Upaya dalam rangka menjembatani perdamaian antara kedua negara, India dan Pakistan, tidak bisa dikatakan berjalan dengan mudah. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa ketegangan yang berujung perang terbuka terjadi pada September 1965 ketika pasukan India dan Pakistan kembali dikerahkan ke medan perang setelah adanya gencatan senjata pada awal tahun 1949 sebagai resolusi atas perang pertama pada tahun 1947. Kesepakatan damai akhirnya ditandatangani pada tahun 1966, tetapi lima tahun kemudian, tahun 1971 mereka kembali bertempur dengan alasan sengketa terhadap wilayah Pakistan Timur, yang kemudian merdeka dan menjadi Bangladesh. Perdamaian kembali terjadi pada tahun 1972, yang diikuti oleh masa tenang yang relatif panjang, hingga dilakukannya berbagai kegiatan uji coba rudal nuklir di kedua negara yang ditandai dengan deklarasi negara nuklir oleh India dan Pakistan pada tahun 1998 dengan suksesnya rangkaian uji coba senjata nuklir oleh kedua negara.

Di peridode 1990-an, Amerika Serikat berhasil melakukan tekanan Pakistan sehingga demobilisasi pasukan Pakistan dari Kashmir dapat diupayakan, namun kemudian hal ini mendapat tanggapan keras baik dari para pejuang Kashmir

²² Rusdi Hamka, *Kashmir: Nurani Dunia Diadili*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1994

²³ Khan, Loc cit, 2009

maupun dari masyarakat Pakistan. Pada akhirnya, Pemerintah Pakistan kembali melakukan mobilisasi di wilayah tersebut. Dalam menghadapi penumpukan militer Pakistan, India pun semakin menguatkan pasukannya di Kashmir. Mereka mengantisipasi makin gencarnya dukungan Pakistan terhadap pejuang Kashmir. Sementara, Jenderal Pervez Musharraf menyatakan bahwa pasukan Pakistan hanya sekedar berjaga di perbatasan untuk mengantisipasi gerakan dari pasukan India. Kedua pihak setuju untuk melakukan demobilisasi pasukan, namun India memberikan syarat yang menyudutkan Pakistan dengan penarikan mundur pasukan Pakistan terlebih dahulu dari Kashmir, dan membubarkan pasukan gerilyawan Pakistan di Kashmir. Hal tersebut ditolak oleh Pakistan dengan alasan bahwa pasukan gerilyawan tersebut merupakan penduduk asli Kashmir yang mempertahankan kemerdekaan mereka setelah selama 50-an tahun lebih mereka dijajah.

Selain PBB, intervensi politik internasional antara Pakistan dan India yang sudah hampir berusia sekitar 60-an tahun, umur yang hampir sama dengan usia kedua negara itu sendiri, juga dilakukan oleh organisasi SAARC (*South Asian Association of Regional Cooperation*), yaitu organisasi internasional regional yang didirikan pada tahun 1985 oleh negara-negara di Asia Selatan yang beranggotakan negara-negara Asia Selatan, dimana India dan Pakistan juga merupakan anggota dari SAARC, merupakan dua negara besar, dan merupakan dua negara yang menerapkan strategi utilitas nuklir sebagai strategi pertahanan militernya. Pun, akan sangat tidak baik bagi forum regional apabila negara-negara yang berada dalam satu organisasi terlibat konflik dan atau kembali mendeklarasikan perang dengan negara lain sesama anggota. Karenanya, dalam kaitan itu konflik yang terjadi antara India dan Pakistan menjadi agenda penting SAARC untuk ikut membantu menyelesaikannya yaitu sebagai mediator dari India dan Pakistan.

Melalui SAARC, pada KTT SAARC ke-sepuluh, Juli 1998 di Colombo, Srilanka, Perdana Menteri India Atal Vajpayee dan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Syarif setuju untuk menjalin hubungan kerjasama dan mengadakan perundingan

selanjutnya di Lahore, Pakistan. Kemudian, dalam pertemuan KTT SAARC yang ke-sebelas, pada Januari 2002 di Kathmandu, Nepal, India dan Pakistan kembali bertemu untuk membahas konflik kedua negara. Namun, hal ini terhambat akibat timbulnya kembali ketegangan diantara kedua pihak setelah terjadinya insiden penyerangan terhadap gedung parlemen India di New Delhi pada 2001. Hasil positif diperoleh pada KTT SAARC ke-duabelas di Islamabad, Pakistan. India dan Pakistan akhirnya sepakat untuk memulai dialog menyeluruh pada bulan Februari 2002, mereka berjanji pertemuan mereka pada akhirnya juga akan menyelesaikan sengketa Kashmir. Pun akhirnya upaya perdamaian kembali terputus akibat insiden Mumbai 2008.

Dalam KTT SAARC di Bhutan, pada April 2010, Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Perdana Menteri Pakistan Yousuf Raza Gilani kembali mengadakan pembicaraan upaya damai bagi kedua negara dan memulai kembali dialog melalui menteri-menteri luar negeri mereka. Pertemuan ini merupakan pertemuan resmi pertama mereka sejak Juni 2009²⁴.

3.5. Terorisme sebagai Aktor Pemicu Ketegangan Dua Negara

Di India tercatat telah terjadi banyak sekali rangkain kekerasan yang terorganisir. Hal ini tentu tidak dapat lepas dari sejarah negara tersebut yang sarat dengan kekerasan radikal. Tercatat telah terjadi sebanyak 4,100 kejadian terorisme di India sejak 1970 hingga 2004²⁵, dengan detail sebagai berikut²⁶:

Telah terjadi sebanyak 4.108 insiden terorisme yang terjadi di India sejak tahun 1970 hingga tahun 2004. Selama periode ini, India menduduki peringkat ke-enam di antara negara-negara yang memiliki tingkat serangan teroris yang tinggi setelah Peru, Kolombia, El Salvador, Inggris—termasuk Irlandia Utara—dan Spanyol.

²⁴ VOA News, "PM India, Pakistan Sepakat Upayakan Normalisasi Hubungan", VOA News, 2010 <http://www1.voanews.com/indonesian/news/asia/PM-India-Pakistan-Sepakat-Upayakan-Normalisasi-Hubungan-92453524.html> diakses pada 30 April 2010

²⁵ Global Terrorism Database/GTD, "Background Information on Terrorism in India", Study of Terrorism and Responses to Terrorism/START, Desember 2008

²⁶ *ibid*

Sebanyak 12.539 orang telah tewas akibat serangan teroris di India selama 1970 dan 2004, yang menjadikan rata-rata hampir sebanyak 360 kematian per tahun sebagai akibat dari serangan terorisme di India. Angka kematian ini memuncak pada tahun 1991 dan 1992, dimana angka kematian akibat kegiatan terorisme mencapai 1.184 pada 1991 dan sebanyak 1.132 pada 1992.

Aksi terorisme di India menggunakan berbagai jenis serangan: sebanyak 38,7% serangan memiliki target serangan terhadap fasilitas umum/instalasi vital, 29,7 persen% aksi pemboman guna menghancurkan fasilitas tertentu, dan 25,5% merupakan aksi pembunuhan. Terkait mengenai aksi 26/11 Mumbai, aksi tersebut diklasifikasikan sebagai rangkaian serangan terkoordinasi terhadap fasilitas umum.

Sementara dalam konteks kekinian, beberapa perkembangan dapat diberikan diantaranya yang dapat disajikan dalam tabel kejadian aksi terorisme besar di India periode 1990-an hingga 2010²⁷ berikut ini:

| Tanggal | Kejadian | Korban Tewas |
|------------------|---|-----------------|
| 7 Juli 1987 | Pembunuhan Punjab 1987 | 34 |
| 15 Juni 1991 | Pembunuhan Punjab 1991 | 88 |
| 12 Maret 1993 | Pemboman Mumbai 1993 | 257 |
| 30 Desember 1996 | Pengeboman kereta api Brahmaputra Mail | 33 |
| 14 Februari 1998 | Pemboman Coimbatore | 46 |
| 22 Desember 2000 | Serangan Red Fort | 3 |
| 1 Oktober 2001 | Serangan atas lembaga legislative Jammu dan Kashmir | 38 |
| 13 Desember 2001 | Serangan terhadap gedung parlemen di New Delhi | 10 |

²⁷ Wikipedia, "Chronology of terrorist incidents in India", Wikipedia Org, 2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_major_terrorist_incidents_in_India diakses pada 7 Desember 2010

| | | |
|-------------------|--|-----|
| 13 Mei 2002 | Pemboman kereta Jaunpur | 12 |
| 6 Desember 2002 | Pemboman bus Mumbai | 2 |
| 21 Desember 2002 | Pemboman kereta Kurnool | 20 |
| 10 September 2002 | Pemboman rel kereta Rafiganj | 130 |
| 24 September 2002 | Serangan terhadap kuil Akshardham di Gujarat | 31 |
| 27 Januari 2003 | Bom sepeda meledak di Vile Parle, Mumbai | 1 |
| 13 Maret 2003 | Pemboman terhadap kereta komuter di Mulund, Mumbai | 11 |
| 28 Juli 2003 | pemboman bus di Ghatkopar, Mumbai | 4 |
| 25 Agustus 2003 | Dua bom mobil meledak di dekat <i>Gateway of India</i> dan <i>Zaveri Bazaar</i> | 52 |
| 5 Juli 2005 | Kelompok LeT menyerang Ram Janmabhoomi atas pembalasan perubahan masjid di Babri, Ayodhya. Enam teroris tewas setelah terjadi kontak senjata selama dua jam. | 15 |
| 28 Juli 2005 | Pengeboman kereta Jaunpur | 13 |
| 29 Oktober 2005 | Tiga ledakan bom di New Delhi di tempat yang berbeda | 70 |
| 7 Maret 2006 | Tiga serangan teroris di wilayah Varanasi: Sankatmochan, Shri Mandir, dan Varanasi <i>Cantonment Railway Station</i> | 21 |
| 11 Juli 2006 | Pengeboman jalur kereta api malam di Mumbai | 209 |
| 8 September 2006 | ledakan di sekitar sebuah masjid di Malegaon, Maharashtra | 37 |
| 18 Februari 2007 | Pemboman gerbong kereta Samjhauta Express | 68 |
| 18 Mei 2007 | Pemboman di Masjid Mekah, Hyderabad. | 13 |
| 25 Agustus 2007 | Dua ledakan di taman Lumbini Hyderabad dan sebuah restoran | 42 |
| 11 Oktober 2007 | Pemboman di kuil orang suci sufi di kota Ajmer | 3 |
| 14 Oktober 2007 | Pemboman di sebuah bioskop di kota Ludhiana | 6 |

| | | |
|-------------------|---|-----|
| | pada saat hari raya Idul Fitri | |
| 24 November 2007 | Serangkaian ledakan di dekat kompleks gedung pengadilan di kota Lucknow, Varanasi, dan Faizabad | 16 |
| 13 Mei 2008 | Sembilan ledakan bom di enam daerah di Jaipur | 63 |
| 25 Juli 2008 | Peledakan bom di Bangalore | 2 |
| 26 Juli 2008 | Sejumlah 17 ledakan bom di Ahmedabad | 29 |
| 13 September 2008 | Peledakan lima bom di pasar Delhi | 21 |
| 27 September 2008 | Dua pemboman di pasar bunga Delhi, wilayah Mehrauli | 1 |
| 29 September 2008 | Pemboman di Maharashtra (termasuk Malegaon) dan Gujarat | 10 |
| 1 Oktober 2008 | Pemboman Agartala | 4 |
| 21 Oktober 2008 | Pemboman Imphal | 17 |
| 30 Oktober 2008 | Pemboman Assam | 77 |
| 26 November 2008 | Serangan terkoordinasi di Mumbai | 171 |
| 1 Januari 2009 | Pemboman di Guwahati | 6 |
| 6 April 2009 | Pemboman Assam | 7 |
| 13 Februari 2010 | Ledakan bom di sebuah toko roti Jerman di Pune | 17 |
| 7 Desember 2010 | Ledakan di Varanasi yang diklaim oleh kelompok militan India, Mujahidin India | 1 |

Tabel 3.1. Kejadian Aksi Terorisme Besar di India Periode 1990-an hingga 2010

Sementara, berikut merupakan daftar organisasi yang dinyatakan sebagai kelompok teroris di India berdasarkan pernyataan Departemen Dalam Negeri India²⁸

1. *United Liberation Front of Assam (ULFA)*
2. *National Democratic Front of Bodoland (NDFB)* di Assam
3. *People's Liberation Army*
4. *United National Liberation Front (UNLF)*

²⁸ Departemen Dalam Negeri India, "Banned Organisations", Ministry of Home Affairs, 2008 http://www.mha.gov.in/uniquepage.asp?Id_Pk=292 diakses pada 21 November 2010

5. *People's Revolutionary party of Kangleipak (PREPAK)*
6. *Kangleipak Communist Party (KCP)*
7. *Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL)*
8. *Manipur People's Liberation Front (MPLF)*
9. *Revolutionary People's Front (RPF) di Manipur*
10. *All Tripura Tiger Force (ATTF)*
11. *National Liberation Front of Tripura (NLFT) di Tripura*
12. *Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC)*
13. *Achik National Volunteer Council (ANVC) di Meghalaya*
14. *Babbar Khalsa International*
15. *Khalistan Commando Force*
16. *International Sikh Youth Federation*
17. *Lashkar-e-Taiba/Pasban-E-Ahle Hadis*
18. *Jaish-e-Mohammed/Tahrik-E-Furqan*
19. *Harkat-ul-Mujahideen/Harkar-UI-Ansar/Karkat-UI-Jehad-E-Islami*
20. *Hizb-ul-Mujahideen/Hizb-UI-Mujahideen Pir Panjal Regiment*
21. *Al-Umar-Mujahideen*
22. *Jammu And Kashmir Islamic Front*
23. *Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)*
24. *Students Islamic Movement of India (SIMI)*
25. *Deendar Anjuman*
26. *Communist Party of India (Marxist-Leninist)-People's War*
27. *Maoist Communist Centre (MCC)*
28. *Al-Badr*
29. *Jamiat-UI-Mujahidde*
30. *Al-Qaida*
31. *Dukhtaran-E-Millat (DEM)*
32. *Tamil Nadu Liberation Army (TNLA)*
33. *Tamil National Retrieval Troops (TNRT)*
34. *Akhil Bharat Nepali Ekta Samaj (ABNES)*

Dari 34 organisasi tersebut diatas, terdapat tiga aktor utama yang bermain di wilayah Kashmir yang utamanya menyulut ketegangan diantara dua negara, yaitu *Harkat-ul-Mujahideen (HuM)*, *Jaish-e-Mohammed (JeM)*, *Lashkar-e-Taiba (LeT)*. Diantara ketiga organisasi ini, LeT telah menjadi pihak ketiga yang menjadikan kedua negara berada pada posisi siap perang, yaitu pada tahun 2001 sebagai reaksi India atas serangan terhadap gedung parlemen India, dan pada 2008 dimana Mumbai diserang oleh sepuluh orang bersenjata lengkap.

Terkait dengan dua serangan besar LeT, yang pertama berupa serangan pada 13 Desember 2001. Pada saat itu, sekelompok teroris menyerang gedung parlemen India di New Delhi. Kelompok ini terdiri dari lima orang yang mengenakan seragam komando dan masuk ke dalam gedung parlemen dengan menggunakan mobil melalui pintu gerbang VIP. Mereka dapat lolos dari pemeriksaan fisik karena mereka mempunyai stiker tanda anggota kementerian dalam negeri.

Kelompok ini kemudian membuat ledakan besar di gedung parlemen India, dan melakukan kontak senjata selama 45 menit yang menewaskan sembilan polisi dan seorang staff parlemen. Selain dengan ledakan bom, mereka menggunakan senapan AK-47 dan granat tangan untuk menyerang. Serangan kemudian diakhiri dengan tewasnya kelima penyerang tersebut yang belakangan diidentifikasi sebagai warga Pakistan.

Pada serangan besar LeT yang terjadi pada Desember 2008, pihak internasional sepakat menyatakan bahwa serang tersebut merupakan sebuah serangan yang terkoordinir dengan metoda yang kompleks.

Serangan Mumbai 2008, sering juga disebut sebagai serangan 26 November atau 26/11 merupakan serangan yang dilakukan oleh sepuluh orang bersenjata di Mumbai, India yang berlangsung hingga 29 November dan menewaskan sekitar 175 orang dan melukai 308 orang lainnya.

Serangan tersebut dilakukan di beberapa tempat seperti Stasiun Chatrapati Shivaji Terminus (CST), Hotel Trident Oberoi , Hotel Taj Mahal Palace and Tower, Leopold Cafe, Rumah Sakit Cama, Nariman House, Bioskop Metro, dan jalur belakang gedung *Indian Times*, serta Perguruan St Xavier's. Juga terdapat sebuah ledakan di Mazagaon, dan dalam sebuah taksi di Vile Parle . Peristiwa penyerangan berakhir dengan kematian sembilan orang penyerang oleh Pasukan Garda Keamanan Nasional setelah dilakukan penyerbuan dibawah operasi *Black Tornado* pada 29 November 2008.

Ajmal Kasab merupakan satu-satunya penyerang yang tertangkap dalam keadaan hidup. Oleh pihak keamanan India, kesepuluh orang ini dituduh sebagai anggota *Lashkar-e-Taiba* (LeT), sebuah organisasi militan yang berbasis di Pakistan, dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh India, Pakistan, Amerika Serikat, Inggris, dan PBB²⁹. Lebih lanjut, pemerintah India juga mengatakan bahwa para penyerang berasal dari Pakistan, tinggal dan dilatih oleh Lashkar-e-Taiba dalam safehouse di Azizabad, Pakistan, dan dalam melakukan operasinya, mereka didukung oleh pengendali yang berada di Pakistan³⁰.

Pada awal pernyataannya, pemerintah Pakistan menolak segala tuduhan atas keterlibatan penyerang dengan negaranya, termasuk kewarganegaraan para penyerang. Namun, pada tanggal 7 Januari 2009 Menteri Informasi Pakistan, Sherry Rehman menyatakan secara resmi kewarganegaraan Ajmal Kasab sebagai seorang Pakistan³¹.

²⁹ Schmitt, Eric; Somini Sengupta, Jane Perlez (2008-12-03). "U.S. and India See Link to Militants in Pakistan". *New York Times*, 2008.

<http://www.nytimes.com/2008/12/03/world/asia/03mumbai.html?bl&ex=1228453200&en=a32b625bf9928825&ei=5087%0A> diakses pada 18 Oktober 2010

³⁰ Somini Sengupta and Eric Schmitt (2008-12-03). "Ex-U.S. Official Cites Pakistani Training for India Attackers". *The New York Times*, 2008

<http://www.nytimes.com/2008/12/04/world/asia/04india.html> diakses pada 18 Oktober 2010

³¹ Dawn, "Surviving gunman's identity established as Pakistani", *Dawn*, 2009.

<http://www.dawn.net/wps/wcm/connect/Dawn%20Content%20Library/dawn/news/pakistan/surviving-gunnmans-identity-established-as-pakistani-ss> diakses pada 12 September 2010

3.6. Kronologi Serangan Aksi Terorisme Mumbai 26/11

Menurut penyelidikan, para penyerang melakukan perjalanan lewat laut dari Karachi, Pakistan, melintasi Laut Arab. Peristiwa dimulai pada 26 November 2008 sekitar pukul 20:00 waktu India. Sepuluh orang membajak kapal nelayan berbendera India "Kuber" dan membunuh empat awak kapalnya, dan kemudian memaksa kapten untuk berlayar ke Mumbai³². Ketika mendekati garis pantai, mereka membunuh sang kapten—Amar Singh Solanki, sebelumnya telah dipenjarakan selama enam bulan di penjara Pakistan untuk penangkapan ikan secara ilegal di perairan Pakistan—mereka meninggalkan kapal Kuber dengan dua perahu speedboat karet dan mendarat di Colaba. Disana mereka sempat bertemu dengan nelayan lokal yang menanyakan urusan orang-orang tersebut karena membawa senjata, yang kemudian dijawab bahwa hal tersebut bukan merupakan urusan nelayan tersebut. Nelayan ini kemudian sempat melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian Mumbai, namun laporan nelayan tersebut diabaikan oleh pihak kepolisian³³.

Selain itu, pada proses penyelidikan lanjutan, sebuah perahu yang penuh dengan senjata dan bahan peledak ditemukan oleh pihak kepolisian India di dermaga Mazgaon, Mumbai³⁴.

3.6.1. Chatrapati Shivaji Terminus

Stasiun Chatrapati Shivaji Terminus (CST) diserang oleh dua pria bersenjata yang salah satunya adalah Ajmal Kasab. Serangan dimulai sekitar pukul 21:30 ketika dua orang tersebut memasuki ruang penumpang dan melepaskan tembakan secara membabi buta dengan menggunakan

³² The Economic Times, "Slain navigator of Porbandar trawler was imprisoned in Pak", The Economic Times, 2008
http://economictimes.indiatimes.com/News/Politics/Nation/Slain_navigator_of_Porbandar_trawler_was_imprisoned_in_Pak/articleshow/3777132.cms diakses pada 18 Oktober 2010

³³ Moreau, Ron, "The Pakistan Connection", Newsweek, 2008
<http://www.newsweek.com/id/171056>

³⁴ Evening Standard, "Timeline: one night of slaughter and mayhem", Evening Standard, 2008
<http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23593839-details/Timeline:+one+night+of+slaughter+and+mayhem/article.do> diakses pada 20 Oktober 2010

senapan AK-47³⁵. Serangan ini menewaskan 58 orang dan melukai 104 lainnya. Serangan berakhir pada sekitar pukul 22:45. Dua penyerang tersebut kemudian keluar dari CST dan menembaki pejalan kaki dan polisi di jalanan. Para teroris kemudian menuju ke Rumah Sakit Cama dan berniat untuk membunuh pasien, namun niatan mereka gagal karena semua bangsal pasien telah dikunci sebelumnya oleh staff rumah sakit. Lepas dari Rumah Sakit Cama, dua orang tersebut keluar dan bertemu dengan kepala Grup Anti Teror Mumbai, Hemant Karkare. Karkare tewas bersama anak buahnya dalam kontak bersenjata dengan dua orang tersebut. Mobil polisi yang ada dirampas dan digunakan untuk menuju rally point mereka selanjutnya, namun mereka kemudian mengganti mobil tersebut dengan sebuah mobil sipil. Dalam perjalanannya, dua orang tersebut bertemu dengan barikade kepolisian dan terjadi kontak senjata diantara dua pihak. Seorang teroris terbunuh, dan Ajmal Kasab terluka, dan kemudian ditangkap.

3.6.2. Cafe Leopold

Cafe Leopold merupakan sebuah restoran dan bar yang populer di Mumbai Selatan. Dua penyerang menembaki kafe tersebut pada 26 November malam dan menewaskan sedikitnya 10 orang, dan melukai banyak korban lainnya. Sambil menuju sasaran mereka selanjutnya, dua orang tersebut menembakan senjatanya secara membabibuta ke arah jalanan.

3.6.3. Ledakan bom di dalam taksi

Ada dua ledakan di taksi yang disebabkan oleh bom yang dilengkapi dengan timer. Yang pertama terjadi di Wadi Bunder pada sekitar pukul 22:20. Tiga orang terbunuh dan sekitar 15 orang lainnya luka-luka, sementara ledakan kedua terjadi di Vile Parle pada pukul 22:40, menewaskan pengemudi dan penumpangnya.

3.6.4. Hotel Taj Mahal Palace dan Oberoi Trident

³⁵ The News International, "Photographer recalls Mumbai attacks", The News International, 2009. <http://www.webcitation.org/5hg3Sz06d> diakses pada 18 Oktober 2010

Hotel Taj Mahal dan Oberoi Trident merupakan dua hotel yang dijadikan lokasi utama peristiwa penyerangan tersebut. Tercatat terjadi enam ledakan di hotel Taj Mahal dan satu ledakan di Oberoi Trident³⁶. Para penyerang kemudian membakar lantai utama Hotel Taj Mahal dan Oberoi Trident.

Selama serangan, kedua hotel ini dikepung oleh personil *Rapid Action Force*, *Marine Commandos*, dan komando Penjaga Keamanan Nasional (NSG). Sebelumnya, pihak otoritas India kesulitan dalam melakukan penyerangan karena pihak teroris seperti mengetahui taktik mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya akses terhadap media tentang situasi diluar hotel secara komprehensif dari media televisi. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memutus saluran televisi kepada hotel tersebut. Pada 29 November pagi, pasukan keamanan menyerbu kedua hotel tersebut dan menewaskan para teroris yang menduduki hotel tersebut.

3.6.5. Nariman House

Nariman House, yang juga dikenal dengan Mumbai Chabad House, merupakan sebuah tempat tinggal bagi para warga Yahudi di Mumbai, India. Nariman house ini diserang oleh dua orang teroris dan pada akhirnya menyandra beberapa penghuninya, seperti pemimpin Nariman house, Rabi Gavriel Holtzberg dan istrinya Rivka Holtzberg yang ditemukan tewas pada 29 November 2008. Dalam perlawanannya, dua penyerang tersebut melemparkan granat ke sebuah jalan di dekatnya. Aksi penyanderaan diakhiri dengan serangan cepat oleh NSG yang mengakibatkan tewasnya dua penyerang tersebut³⁷.

³⁶ NDTV, "Taj Hotel Attacked", TTKN News, 2008.

<http://www.ftkn.com/world/terror-attacks-army-stormed-taj-hotel-mumbai-217.html> diakses pada 18 Oktober 2010

³⁷ The Times of India, "NSG ends reign of terror at Nariman", Times of India, 2008

http://timesofindia.indiatimes.com/India/NSG_ends_reign_of_terror_at_Nariman/articleshow/3771314.cms diakses pada 18 Oktober 2010

Pada akhirnya, didapatkan sepuluh orang tersangka, sembilan tewas dan satu tertangkap hidup. Pada 9 Desember, pihak kepolisian India menyatakan nama-nama pelaku penyerangan antara lain: Ajmal Kasab dari Faridkot, Abu Ismail Dera Ismail Khan dari Dera Ismail Khan, Hafiz Arshad dan Babr Imran dari Multan, Javed dari Okara, Shoaib dari Narowal, Nazih dan Nasr dari Faisalabad, Abdul Rahman dari Arifwalla, dan Fahad Ullah dari Dipalpur Taluka. Dera Ismail Khan dari *North-West Frontier Province (NWFP)*³⁸.



³⁸ Jeremy Kahn dan Robert F. Worth, "Mumbai Attackers Called Part of Larger Band of Recruits". *The New York Times*, 2008.
<http://www.nytimes.com/2008/12/10/world/asia/10mumbai.html> diakses pada 18 Oktober 2010

BAB IV
ANALISA KETERKAITAN AKSI TERORISME
YANG MELIBATKAN PAKISTAN TERHADAP
HUBUNGAN BILATERAL INDIA DAN PAKISTAN

4.1. Terorisme di India dan Pakistan

Klasifikasi gerakan teroris dinyatakan oleh Oemar Kader dalam kapasitasnya sebagai Konsultan Perencana Anti Teroris Amerika Serikat, sebagai berikut;

- a. Etnonasionalis¹, yaitu kelompok teroris yang dipersatukan oleh bahasa, agama, dan wawasan teritorial. Kelompok yang tercakup didalamnya adalah gerakan IRA (Tentara Republik Irlandia), PLO (Pejuang Pembebasan Palestina), ETA dan lain lain.
- b. Motivasi Idiologis, yaitu kelompok terorisme yang digerakkan oleh motivasi idiologi. Termasuk didalamnya adalah pasukan Brigade Merah, Tupamaros Uruguay yang merupakan sebuah kelompok pasukan teror sayap kanan di Amerika Latin, dan lainnya.

Sementara lembaga CFR, *Council on Foreign Relation*² secara lebih spesifik membagi bentuk terorisme kedalam enam jenis, yaitu: terorisme nasionalis , terorisme religius, *state sponsored terrorism*, terorisme sayap kiri, terorisme sayap kanan dan terorisme anarkhis.

a. Terorisme nasionalis.

Terorisme nasionalis bercita-cita membentuk negara terpisah untuk bangsa mereka. Contoh pergerakan tipe ini, antara lain: IRA, LEHI, Irgun, *Organosis Kyprion Agoniston* (EOKA).

b. Terorisme Religius.

Pergerakan terorisme religius mempergunakan kekerasan untuk tujuan-tujuan yang mereka anggap diperintahkan oleh Tuhan. Terorisme tipe ini

¹ Pendapat Kader agak bertentangan dengan pendapat Wilkinson yang memisahkan gerakan etnonasionalis dari gerakan terorisme. Wilkinson cenderung memasukan kelompok etnonasionalis kepada golongan freedom fighter, walaupun pada prakteknya mereka menggunakan motoda terorisme dalam aksi-aksinya. Hal ini masih terus menjadi perdebatan hingga kini.

² <http://www.cfr.org/>

ditemui pada semua agama besar, juga pada sekte-sekte kecil. Bagi teroris religius, kekerasan adalah sebuah tindakan suci yang diperkenankan oleh Tuhan. Agama disini berperan sebagai sebuah kekuatan yang meligitimasi penggunaan kekerasan. Contoh pergerakan teroris tipe ini mencakup : Hamas di Palestina, Hisbullah di Lebanon, kelompok Israel yang terafiliasi dengan Rabbi Meï Kahane, ekstrimis-ekstrimis Israel seperti Barauch Goldstein (pelaku pembantaian muslim di Masjid Hebron, 1994) dan Yigal Amir (pelaku pembunuhan Perdana Menteri Yitzhak Rabin, 1995), sekte Aum Shinrikyo di Jepang, dan lainnya. Hampir semua pakar yang mendalami terorisme sepakat bahwa tipe terorisme ini tengah tumbuh pesat.

c. *State Sponsored Terrorism.*

Tipe terorisme ini mendapatkan dukungan yang aktif dan seringkali secara diam-diam (*clandestine support*) dari negara-negara tertentu. Contoh kelompok teroris yang dianggap disponsori negara mencakup Hizbullah (disponsori Iran), *Abu Nidal Organization* (disponsori Irak), Japanese Red Army (yang dituduh sering bekerja untuk Libya), dan lainnya.

d. Terorisme Sayap Kiri

Tipe terorisme ini secara jelas memiliki target kapitalisme dan berkeinginan untuk menggantinya dengan rezim komunis atau sosialis. Kebanyakan pengikut pergerakan teroris ini berasal dari golongan proletar miskin, terobsesi dan memiliki keyakinan yang fanatis. Mereka melihat terorisme sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial yang mereka alami. Kelompok-kelompok ini biasanya mempersepsikan sipil sebagai entitas yang menderita dibawah eksploitasi kapitalis. Metode mereka seringkali membatasi pemakaian kekerasan dan memfokuskan diri pada taktik-taktik seperti penculikan konglomerat atau pengeboman monumen sebagai tindak simbolis. Terorisme tipe ini banyak ditemui pada akhir dekade 1960-an hingga akhir dekade 1970-an. Beberapa kelompok yang termasuk dalam katagori ini antara lain; *American Weather Underground*, *Baader-*

Meinhof Groups (Faksi Tentara Merah Jerman), *Italian Red Brigades*, *French Direct Action*, dan *17 November Group*.

e. Terorisme Sayap Ultra Kanan

Terorisme tipe ini merupakan terorisme yang menggunakan segala cara demi mencapai tujuannya, yang pada umumnya menggunakan jalan kekerasan. Umumnya yang menjadi target teror adalah imigran dan pengungsi dari negara berkembang. Terorisme tipe ini banyak mengungkap isu rasisme dan *xenophobic* (kebencian terhadap orang asing). Terorisme tipe ini banyak ditemui di Eropa, terutama Jerman Timur dan negara-negara bekas anggota Blok Timur. Ideologi yang dianut mengarah ke fasisme dan menjadikan Nazi sebagai model ideal. Biasanya kelompok teroris semacam ini bersembunyi di balik slogan-slogan nasionalis.

f. Terorisme Anarkhis

Tipe terorisme ini ditemui sebagai fenomena global pada gelombang pertama terorisme di mana kelompok revolusioner berupaya menjatuhkan pemerintah melalui rangkaian aksi pengeboman dan pembunuhan pejabat atau kepala negara.

Dengan melihat keadaan di India dan Pakistan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan terorisme yang berada di wilayah dua negara tersebut, khususnya di Pakistan, merupakan gerakan terorisme yang menganut gerakan etno-nasionalis, dimana para pejuang Kashmir yang beragama muslim berjuang demi terwujudnya integrasi dengan negara Pakistan yang mewadahi warga muslim di wilayah sub-kontinen India.

Sementara secara spesifik, Departemen Pertahanan Amerika menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok militan Islam yang aktif di Kashmir dan mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris internasional: *Harakat ul-Mujahideen*, *Jaish-e-Mohammed*, dan *Lashkar-e-Taiba*. *Harakat ul-Mujahideen* telah terdaftar sebagai kelompok militan sejak lama, sementara *Jaish-e-*

Mohammed dan *Lashkar-e-Taiba* ditambahkan berdasarkan usulan Pemerintah India pascaterjadinya insiden penyerangan terhadap gedung parlemen India pada Desember 2001. Kelompok-kelompok tersebut merekrut anggota dari Pakistan, juga para veteran Afghanistan dan Arab yang pernah ikut berperang melawan invasi Soviet di Afghanistan tahun 1980-an³:

- a. *Harakat ul-Mujahidin* (HuM) didirikan pada pertengahan 1980-an. HuM memiliki markas pertama kali di Pakistan, kemudian melakukan ekspansi ke Afghanistan, kini, HuM memiliki ratusan pendukung bersenjata di Pakistan dan Kashmir. Kelompok ini bertanggung jawab atas pembajakan pesawat India pada Desember 1999 dan beberapa serangan terhadap tentara India dan warga sipil India di wilayah Kashmir. Anggota HuM yang tergabung dalam *Harakat Jammu Kashmir Liberation Front* disinyalir telah ikut berpartisipasi dalam operasi-operasi pemberontakan dan terorisme di Myanmar, Tajikistan, dan Bosnia.
- b. *Jaish-e-Mohammed* (JeM) didirikan pada tahun 2000 oleh Maulana Masood Azhar yang merupakan seorang ulama Pakistan. Kelompok ini berusaha untuk menggabungkan wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India sebagai bagian integral negara Pakistan, juga secara terbuka menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. JeM melakukan aksi militannya dengan penyerangan terhadap sasaran antara lain segala sesuatu yang berhubungan dengan India, pemerintah Pakistan, dan berbagai kelompok sekte-sekte Islam minoritas di Pakistan. Kelompok ini dinyatakan bertanggungjawab atas serangan bom Parlemen India Desember 2001 dan juga dinyatakan bertanggung jawab atas serangkaian serangan situs Kristen di Pakistan pada tahun 2002. Pemerintah Pakistan juga menyatakan bahwa JeM terlibat dalam dua kali upaya percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf. Hingga 2008, kelompok ini memiliki setidaknya ratusan pendukung bersenjata serta puluhan ribu pengikut⁴.

³ Laporan Departemen Pertahanan Amerika, Country Reports on Terrorism 2008, Departemen Pertahanan Amerika, April 2009

⁴ Ibid

- c. *Lashkar-e-Taiba* (LeT), merupakan sebuah organisasi yang aktif sejak tahun 1993, dibentuk sebagai sayap militer dari organisasi Islam-baik *Markaz-ad-Dawa-wal-Irshad*, sebuah organisasi yang didanai oleh Pakistan⁵. Kelompok ini merupakan kelompok militan terbesar dan paling berpengalaman dari berbagai kelompok militan/teroris yang berbasis di wilayah Kashmir. LeT mengaku bertanggung jawab atas sejumlah serangan berskala besar terhadap India di wilayah Jammu dan Kashmir, juga beberapa serangan di dalam wilayah negara India. Kelompok ini juga dituduh bertanggung jawab atas serangkaian pemboman di kereta api komuter Mumbai pada 11 Juli 2006, meskipun jurubicara LeT membantah bahwa pihaknya terlibat dalam aksi tersebut. Pemerintah India juga menuduh LeT sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam serangan Mumbai tahun 2008. Lebih lanjut tentang LeT akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

Walaupun Pemerintah Pakistan telah melakukan pelarangan terhadap kelompok-kelompok tersebut, berbagai serangan di Kashmir dan Pakistan terus terjadi dan dilakukan oleh kelompok tersebut dengan menggunakan organisasi samaran sebagai taktik untuk menghindari deteksi penegakan hukum dari pemerintah Pakistan, walaupun tetap menggunakan kepemimpinan dan ideologi yang sama. Seperti dalam kasus organisasi al-Qanoon atau *Lashkar-e-Omar* yang dianggap sebagai koalisi anggota-anggota dari JeM, LeT, dan berbagai kelompok militan Islam yang berbasis di Pakistan, termasuk organisasi anti Syiah yang menyebut dirinya *Lashkar-e -Jhangvi*.

4.2. *Lashkar-e-Taiba*

Lashkar-e-Taiba (LeT) secara harfiah berarti "tentara murni". Kelompok militan ini telah aktif sejak tahun 1993. LeT merupakan sayap militer dari organisasi Islam yang didanai *Markaz-ad-Dawa-wal-Irshad*, organisasi keagamaan yang

⁵ Ibid

didirikan pada tahun 1989, berbasis di Pakistan dan merupakan organisasi Sunni anti missionaris Amerika yang secara aktif merekrut relawan untuk berjuang bersama Taliban, baik di Pakistan, maupun di Afghanistan. LeT adalah salah satu dari empat kelompok petarung yang sangat terlatih di Kashmir, disamping *Jaish-e-Mohammad*, *Harkatul Mujahideen* dan *Hezbul Mujahideen*. LeT tidak terhubung dengan partai politik manapun.

Pemerintah India sering menuduh kelompok LeT dalam setiap serangan teroris, termasuk serangan Mumbai 2008 (26/11) yang menewaskan hampir dua ratus orang dan melukai lebih dari tiga ratus lainnya. LeT adalah satu diantara beberapa kelompok militan Pakistan yang dituduh menerima dukungan dari badan intelijen Pakistan, ISI, untuk berperang di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India. Kelompok LeT ini terus dapat beroperasi dengan bebas di Pakistan dan pascaperistiwa 26/11, LeT telah menjadi sebuah organisasi teroris global. Pada kurun waktu 1990-an, ISI dituduh memberikan instruksi dan dana kepada LeT untuk memerangi kaum Hindu di Jammu dan Kashmir serta melatih ekstremis Muslim di tanah India⁶. Namun tentu saja, Pemerintah Pakistan berulang kali membantah tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa Pemerintah Pakistan tidak pernah melakukan dukungan terhadap kegiatan terorisme.

LeT dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 2002. Hal ini dikarenakan pengakuan LeT yang bertanggungjawab atas banyak serangan, diantaranya serangan⁷ terhadap barak tentara di Red Fort, Delhi pada tahun 2000, yang menewaskan tiga orang, serangan terhadap bandara Srinagar yang menewaskan lima orang India pada Januari 2001, dan serangan terhadap pasukan keamanan perbatasan India yang menewaskan sedikitnya empat orang pada April 2002. Namun, pascapelarangan organisasi tahun 2002, LeT tidak pernah mengakui serangan terhadap beberapa tempat di India. Meskipun dituduh bersalah oleh Pemerintah India atas serangan terhadap gedung parlemen India pada tahun 2001,

⁶ Bajoria, Jayshree, *the ISI and Terrorism: Behind the Accusation*, 2010, diakses pada 21 November 2010

http://www.cfr.org/publication/11644/isi_and_terrorism.html

⁷ Gul, Imtiaz, *The Al Qaeda Connection: The Taliban and Terror in Pakistan's Tribal Areas*, 2009

serangan terhadap jalur kereta api komuter Mumbai pada Juli 2006, peledakan kereta api India-pakistan pada Februari 2007, dan serangan 26/11 di Mumbai pada 2008, LeT membantah bertanggungjawab atas serangan-serangan tersebut.

LeT memiliki kantor pusat di Muridke, kota di dekat Lahore, Pakistan. LeT diketuai oleh Hafiz Muhammad Saeed, seorang mantan profesor kajian Islam. Pada bulan Desember 2008, India menuntut kepada Pakistan untuk menyerahkan Saeed sebagai tersangka atas tuduhan berbagai tindak terorisme di India, termasuk serangan Mumbai 26/11. Walaupun memang pada akhirnya pada bulan Februari 2009 Pemerintah Pakistan mengakui bahwa serangan 26/11 telah direncanakan di Pakistan, dan pada bulan November 2009 pengadilan Pakistan menghukum tujuh orang konspirator perencana serangan 26/11 termasuk kepala operasi LeT, Zakiur-Rehman Lakhvi, Saeed tidak pernah didakwa bersalah dan tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah India dengan alasan tidak memiliki bukti yang cukup.

Markas LeT merupakan sebuah kompleks yang terdiri atas rumah-rumah, sebuah madrasah yang terpisah antara lelaki dan perempuan, rumah sakit, pasar, asrama untuk sarjana dan anggota fakultas, sebuah peternakan ikan, dan lahan pertanian. Selain itu, Markaz-ad-Dawa-wal-Irshad memiliki 16 lembaga-lembaga Islam, 135 sekolah menengah, sebuah pelayanan ambulans, klinik keliling, bank darah, dan beberapa madrasah di Pakistan⁸. LeT memiliki media publikasi website, jurnal bulanan berbahasa Urdu; Al-Dawa, tabloid mingguan berbahasa Urdu, Gazwa, dan menerbitkan beberapa majalah, termasuk Voice of Islam, media bulanan berbahasa Inggris.

LeT mengumpulkan sumbangan dari komunitas ekspatriat Pakistan di Teluk Persia dan Inggris, LSM Islam, dan sumbangan pengusaha Kashmir Pakistan. Dituduhkan juga bahwa LeT menerima dana dari ISI dan Arab Saudi⁹. LeT juga menyelenggarakan kegiatan amal melalui organisasi Jamaat-ud-Dawa (Jud).

⁸ Ibid

⁹ Afridi, Jamal, *Kashmir Militant Extremists*, CFR, 2009

Pascatahun 2002, LeT bekerja dibawah tanah dan dalam beberapa tahun terakhir, LeT telah terpecah menjadi dua faksi, al-Mansurin dan al-Nasirin¹⁰. Disamping tekanan AS pada 2002 yang menyatakan bahwa LeT merupakan organisasi terlarang, pemerintah Pakistan masih enggan untuk bertindak terhadap LeT maupun Jamaat-ud-Dawa. Hal ini dikarenakan oleh masih diunggungkannya Pemerintah Pakistan atas serangan bersenjata pasukan lapangan LeT melawan India di daerah Kashmir. Pada tahun 2005, ketika terjadi gempa besar di wilayah Kashmir di tahun 2005, Jamaat-ud-Dawa menjadi pemain utama dalam upaya pemberian bantuan dan rekonstruksi¹¹. Sejak saat itu, secara resmi kelompok JuD kembali diizinkan untuk secara terbuka melakukan penggalangan dana di Pakistan. Namun, pihak Pemerintah Amerika melalui PBB tetap menyatakan JuD sebagai bentuk nyata dari LeT, dan masih tetap dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Namun hingga 2008, JuD masih terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi di Pakistan barat laut melalui organisasi Yayasan amal Falah-i-Insaniyat.

Pada 2002, seorang anggota senior al-Qaeda, Abu Zubaydah, ditangkap di sebuah safehouse LeT di Faisalabad, Pakistan. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya keterkaitan antara LeT dan al-Qaeda pada masa-masa awal dengan adanya beberapa anggota LeT yang memfasilitasi pergerakan anggota al-Qaeda di Pakistan. Selanjutnya, departemen luar negeri Amerika mengatakan bahwa pada tahun 2007, kelompok militan Kashmir selalu mendukung kegiatan serangan di Afghanistan, dan selalu melakukan pelatihan bagi para pejuang lapangan guna melakukan dukungan terhadap al-Qaeda.

http://www.cfr.org/publication/9135/kashmir_militant_extremists.html diakses pada 21 November 2010

¹⁰ Kronstadt, Alan K., "Pakistan-US Relation", Congressional Report Service Report for Congress, RL33498, Februari 2009

¹¹ Haqqani, Husein, *the Ideology of South Asian Jihadi Groups*, Carnegie Endowment for International Peace, 2005

4.3. Dukungan Pemerintah Pakistan terhadap Militansi Kashmir

Terlepas dari upaya Pemerintah Pakistan dalam memerangi terorisme sebagai kebijakan keamanannya, Pakistan masih terus dituduh sebagai pendukung kelompok-kelompok militan yang beroperasi di wilayah Kashmir. Tuduhan ini diberikan khususnya oleh Pemerintah India. Hubungan diantara India dan Pakistan yang sifatnya positif kemudian tampak pada momen pascaserangan 11 September 2001 di Amerika dan janji mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf pada 2002 dalam upaya memerangi kegiatan terorisme di perbatasan India dan Pakistan. Dalam tahun-tahun berikutnya, India meyakini bahwa dukungan Pemerintah Pakistan terhadap militansi telah menurun.

Namun, pandangan tersebut berubah pascaserangan Mumbai 2008. Bahkan sejak 2009, aktivitas militan di wilayah Kashmir telah mengalami peningkatan. Pembicaraan damai dihentikan secara sepihak oleh pihak India, tetapi kembali dilanjutkan pada bulan Februari 2010, dengan catatan bahwa isu dukungan Pemerintah Pakistan kepada kelompok-kelompok militan merupakan isu yang krusial dalam agenda India. Tentu saja, Pemerintah Pakistan menyangkal segala campur tangan mereka terhadap kelompok-kelompok militan Kashmir, khususnya tuduhan mengenai dukungan.

Pada awalnya, kelompok militan di Kashmir melakukan kegiatan operasi insurjensi atas inisiatif dan usaha mereka sendiri. Namun, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa mereka berada di bawah perlindungan badan intelijen Pakistan, atau difasilitasi olehnya. Ada beberapa hal yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kamp pelatihan bagi para militan banyak didirikan di wilayah Kashmir yang dikendalikan Pakistan, dan kamp-kamp tersebut beroperasi tanpa adanya gangguan yang berarti dari pemerintah.
- b. Proses rekrutmen banyak terjadi di provinsi Punjab Pakistan. Wilayah tersebut terkenal telah memberikan kontribusi terhadap individual yang

bertekad untuk syahid, atau bersedia untuk menjadi martir demi kepentingan para kelompok militan.

- c. Pada pertengahan Januari 2010, kelompok-kelompok militan berkumpul secara resmi dalam aliansi yang disebut sebagai *United Jihad Council* (UJC) sebagai wadah persatuan bagi para kelompok militan¹². Pertemuan pertama pada Januari 2010 tersebut dilakukan di Muzaffarabad, Pakistan. Salah satu pimpinan dalam pertemuan adalah mantan kepala badan intelijen Pakistan, *Inter-Services Intelligence* (ISI), Letjen Hamid Gul. Dalam pertemuan ini, dibahas mengenai upaya kebangkitan jihad sebagai perang suci hingga wilayah Kashmir bebas sepenuhnya dari pendudukan India.

Pada awalnya, sejarah insurjensi kemerdekaan Kashmir pada awalnya berlangsung dengan cara-cara damai. Hal ini dimulai pada tahun 1980-an. Namun, kemudian bermetamorfosis menjadi pemberontakan bersenjata dalam beberapa tahun setelahnya. Kelompok *Jammu dan Kashmir Liberation Front* (JKLF) merupakan kelompok insurjen bersenjata pertama yang muncul di wilayah Kashmir, yang anggotanya adalah warga lokal wilayah Jammu dan Kashmir, setelah itu, kelompok-kelompok militan Islam muncul dengan sangat cepat, baik di wilayah Kashmir yang dikuasai India, maupun yang dikuasai oleh Pakistan.

Kelompok-kelompok militan baru ini merupakan kelompok yang berisi alumni dari perang Afghanistan dan Soviet yang baru saja berakhir (pada tahun 1980-an) dan melahirkan para 'pejuang suci', yang penuh dengan semangat keagamaan, dan berupaya secara kontinu untuk melakukan jihad di seluruh dunia. Operasi insurjensi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini aktif dilakukan sampai dengan terjadinya peristiwa 11 September 2001.

Berbasis di wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, kelompok-kelompok ini melakukan pendanaan, perekrutan, pelatihan, dan operasi insurjensi di Pakistan.

¹² Indian Daily, "Kashmir Crisis 2010", the Indian Daily, 2010
<http://www.theindiadaily.com/kashmir-crisis-2010/> diakses pada 21 November 2010

India dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut telah dibantu dan dibimbing oleh badan intelijen Pakistan, ISI. Namun, pascaperistiwa 9/11 dimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militan muslim menjadi sorotan dunia, kegiatan bersenjata militan Kashmir akhirnya mengalami penurunan. Ditambah dengan pernyataan dan janji Presiden Pakistan Pervez Musharraf pada tahun 2002, yang akhirnya menyatakan pelarangan organisasi kelompok militan yang paling canggih pada masa itu. Lebih lanjut ia juga memerintahkan pengurangan dukungan terbuka oleh Pakistan untuk kelompok dan kegiatan militan Kashmir. Hal ini termasuk dengan melakukan restrukturisasi pada ISI yang menangani wilayah Kashmir, dan juga lebih aktif dalam membatasi gerakan militan dalam melintasi perbatasan untuk menuju ke India. Secara implisit, hal ini menyatakan bahwa memang pemerintah Pakistan, dalam hal ini pihak ISI, memiliki andil dalam hal 'pembolehan' kegiatan militansi dan insurjensi di wilayah Kashmir dan India. Namun, kala itu Pemerintah India seakan mengamini proses pembenahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pakistan dan mengakui bahwa selama 2002 hingga 2005, kegiatan infiltrasi ke wilayah India oleh militan Kashmir dan Pakistan telah menjadi minimal dan mendekati nol sama sekali. Kebijakan mengenai hal ini terus berlangsung hingga turunya pemerintahan Presiden Musharraf.

Pascapemerintahan Presiden Musharraf, Sejak itu aparat intelijen Pakistan dengan alasan tidak jelas, kembali diizinkan untuk melakukan dukungan terhadap militansi Kashmir. Dukungan ini diberikan pada beberapa elemen vital kelompok militan yang masih sama, dan juga kepada kelompok-kelompok baru yang muncul kemudian. Namun, seperti yang telah disebutkan dan dibahas sebelumnya, fokus dukungan diberikan pada tiga organisasi utama; *Hizbul Mujahidin* (HuM), *Lashkar-e-Taiba* (LeT) dan *Jaish-e-Muhammad* (JeM). Kolaborasi diantara organisasi tersebut dan berbagai kelompok militan lainnya belum dapat dibuktikan secara nyata, namun diduga keempat organisasi tersebut bergabung sebagai anggota dalam *United Jihad Council* (UJC).

Mayoritas anggota militan Kashmir memiliki pandangan politik yang pro-Pakistan. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan keyakinan. Namun

terdapat pihak yang memutuskan untuk tetap membuka jalur dialog dengan Pemerintah India. Segmen politik ini diwakili oleh *All Parties Huriyat Conference* (APHC). Pun, didalam partai politik tersebut terbagi dua kubu, yang mendukung negosiasi dengan pemerintah India, dan kubu yang menentang dialog tersebut¹³. Perbedaan ideologi tersebut pada akhirnya mengakibatkan gesekan antara faksi-faksi gerakan separatis.

Ketidakpercayaan diantara dua negara merupakan penyebab disharmonisasi hubungan bilateral India dan Pakistan selama ini yang kemudian dimanifestasikan dalam konflik, baik yang terbuka maupun tertutup, baik yang meluas, maupun yang terbatas, dengan menjadikan militan Kashmir dan isu-isu Kashmir sebagai garis depan.

Dalam keterlibatan India di Afghanistan, Pemerintah Pakistan berkali-kali menuduh India memprovokasi dan melakukan dukungan terhadap insurjen di wilayah Balochistan, dan dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Amerika Serikat, Pemerintah India juga terus dituduh dengan aksi pemicu pemberontakan di sepanjang perbatasan Afghanistan dan Pakistan di bagian barat¹⁴, yang tentu saja ditolak oleh India.

4.4. Hubungan India dan Pakistan Pascaperistiwa 26/11

Pascaperistiwa serangan Mumbai 26/11, hubungan India dan Pakistan kembali mengalami ketegangan. Hal ini merupakan ketegangan ke-dua antara dua negara tersebut dengan faktor pemicu adanya kegiatan teror di wilayah India dengan aktor yang sama, *Lashkar-e-Taiba* (LeT). Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, pada Desember 2001, sekelompok orang bersenjata melakukan serangan terhadap gedung parlemen India di New Delhi. Pemerintah India kemudian melakukan investigasi yang berujung pada penyimpulan bahwa LeT

¹³ Lihat artikel "Oposisi Kashmir Tolak Tawaran India", Okezone International, 2010
<http://international.okezone.com/read/2010/09/27/18/376212/18/oposisi-kashmir-tolak-tawaran-india> diakses pada 27 September 2010

¹⁴ Ahmed Rashid, "Descend Into Chaos: How the War Against Islamic Extremism is being Lost in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia", 2008.

berada dibalik serangan tersebut, dan kemudian Pemerintah India menuduh Pakistan berada di balik serangan tersebut.

Hal yang sama kembali terjadi pada serangan Mumbai 26/11. Dalam setiap pernyataannya terhadap kasus penyerangan Mumbai 26/11, Pemerintah India selalu menuduh Pakistan terlibat dalam hal dukungan terhadap kelompok LeT¹⁵.

Hal ini didasari oleh beberapa indikator yang dapat diambil antara lain:

- a. Dalam penyelidikan, diketahui bahwa setiap penyerang dilatih di Pakistan¹⁶, dan dalam perjalanan menuju Mumbai, masing-masing dari penyerang dibekali dengan sebuah *blackberry* dan perangkat GPS. Dalam melakukan operasinya pun, ke sepuluh orang tersebut diarahkan dari dalam Pakistan melalui *blackberry* dan layanan VoIP¹⁷. Penolakan Pakistan terhadap tuduhan India melunak setelah pengakuan kewarganegaraan Ajmal Kasab pada Januari 2009 dan pada bulan Juli 2009, pemerintah Pakistan kembali mengeluarkan pernyataan dan menegaskan bahwa LeT merencanakan dan membiayai serangan dari kamp LeT di Karachi dan Thatta¹⁸. Namun tetap menolak tuduhan bahwa pemerintah Pakistan terlibat dengan LeT, khususnya pada dukungan terhadap peristiwa 26/11¹⁹, dan terus melimpahkan tuduhan bahwa peristiwa 26/11 merupakan hasil dari perbuatan kelompok militan kriminal India dan Bangladesh²⁰.

¹⁵ Eric Schmitt, Somini Sengupta, dan Jane Perlez, "U.S. and India See Link to Militants in Pakistan". New York Times, 2008.
<http://www.nytimes.com/2008/12/03/world/asia/03mumbai.html?bl&ex=1228453200&en=a32b625bf9928825&ei=5087%0A> diakses pada 16 Oktober 2010.

¹⁶ Eric Schmitt dan Somini Sengupta, "Ex-U.S. Official Cites Pakistani Training for India Attackers". The New York Times, 2008.

<http://www.nytimes.com/2008/12/04/world/asia/04india.html?hp> diakses pada 16 Oktober 2010

¹⁷ Jane Perlez dan Salman Masood "Terror Ties Run Deep in Pakistan, Mumbai Case Shows", New York Times, 2009.

<http://www.nytimes.com/2009/07/27/world/asia/27pstan.html> diakses pada 16 Oktober 2010

¹⁸ Zahid Hussain, "Islamabad Tells of Plot by Lashkar". Wall Street Journal, 2009.

http://online.wsj.com/article/SB124872197786784603.html?mod=googlenews_wsj diakses pada 16 Oktober 2010

¹⁹ Ibid

²⁰ Syed Baqir Sajjad dan Mohammad Asghar, "Investigators see Bangladesh link in Mumbai terror attacks", Dawn, 2009

<http://www.dawn.com/2009/02/05/top2.htm> diakses pada 16 Oktober 2010

- b. Keterlibatan David Headley. Pada 3 Oktober 2009, pemerintah Amerika Serikat melalui FBI menangkap David Headley, warga negara Amerika asal Chicago, dengan tuduhan terlibat dalam aksi terorisme, salah satunya terkait dengan perencanaan serangan Mumbai 26/11. Headley memiliki nama lengkap David Coleman Headley. Ia lahir di Washington DC pada 30 Juni 1960 dengan nama Daood Gilani. Ayahnya merupakan seorang diplomat Pakistan, Sayeed Salim Gilani, dan ibunya seorang warga negara Amerika, Sherrill Headley. Headley pernah mengikuti training militer formal *Hasan Abdal Cadet College* di Pakistan. Ia mengubah namanya menjadi David Coleman Headley pada tahun 2006 agar mudah melakukan perjalanan antarnegara²¹.

Headley pernah terlibat dalam kasus narkoba, dan pernah ditangkap pada tahun 1997. Sejak saat itu ia bekerja menjadi informan DEA (*Drug Enforcement Agency*/badan narkotik Amerika) untuk menjalin kontak dengan pengedar obat bius di Pakistan dan Afghanistan. Penangkapan oleh DEA ini menjadi titik tolak ekstrimisme Headley. Dalam periode ini dicurigai Headley juga menjalin kontak dengan kelompok radikal Lashkar-e-Taiba dan seorang anggota al-Qaeda, Ilyas Kashmiri²².

Pada 18 Maret 2010, Headley memberikan pernyataan bekerjasama dengan pengadilan dan mengakui kegiatannya antara lain²³:

- 1) Pada 2005, Headley mengikuti training militer Lashkar-e-Taiba di Pakistan dan diberikan perintah untuk pergi ke India untuk melakukan pengintaian/survey. Ia kemudian melakukan lima kali perjalanan ke India dengan tujuan Taj Mahal Hotel, the Oberoi Hotel, Stasiun Kereta Api Chatrapati Shivaji Terminus (CST), dan Gedung Chabad (*Nariman House*).
- 2) Pada 2008, anggota senior Lashkar-e-Taiba Karachi memberikan instruksi untuk melakukan stakeout terhadap kantor berita

²¹ Laporan Informasi Badan Intelijen Negara Nomor R-/Lapin/15.1/III/2010, BIN, 2010

²² Ibid

²³ Ibid

Morgenavisen Jyllands-Posten (kantor berita yang menerbitkan kartun Nabi Muhammad) di Kopenhagen, Denmark.

- 3) Ia juga menyebutkan menjalin kontak dengan pemimpin Harakat-ul Jihad Islami, Ilyas Kashmiri, yang juga merupakan anggota senior al-Qaeda. Ia memerintahkan penyerangan terhadap kantor berita Morgenavisen Jyllands-Posten. Ia juga mengatakan akan memberi dukungan anak buah, dana, dan senjata melalui kontak Ilyas di Eropa. Namun rencana penyerangan ditunda, dan gagal direalisasikan.
- c. Pemerintah India terus menekan Pakistan dengan mengatakan bahwa lembaga intelijen Pakistan, *Inter Service Intelligence* (ISI) mendukung penuh aksi 26/11. Berdasar pada penyelidikan dan pengakuan Hadley, pihak India mengeluarkan sebuah nama, Mayor Iqbal, seorang perwira ISI memberikan USD 25.000 secara tunai kepada Headley pada tahun 2006 untuk melakukan pengintaian/survey di Mumbai, melakukan asistensi terhadap sistem komunikasi dalam perencanaan serangan, dan membantu mengamati denah Hotel Taj Mahal Palace agar para penyerang mampu memahami prosedur penyerangan secara efektif dalam hotel tersebut²⁴. Melalui Headley, pemerintah India juga menuduh bahwa pihak ISI juga telah melakukan perekrutan agen di dalam militer India untuk senantiasa memberikan informasi mengenai jumlah dan pergerakan pasukan militer India²⁵.
 - d. Kesan bahwa pemerintah Pakistan tidak peduli dan tidak mau bekerjasama dengan Pemerintha India. Beberapa kali pemerintah India meminta agar pemerintah Pakistan untuk lebih serius dalam menangani permasalahan 26/11 ini, termasuk tuntutan melauai PBB mengenai penangkapan beberapa anggota Jamaat ud-Dawa, namun beberapa hari kemudian mereka

²⁴ Jane Perlez, Eric Schmitt, dan Ginger Thompson, "U.S. Had Warnings on Plotter of Mumbai Attack," *New York Times*, 2010
http://www.nytimes.com/2010/10/17/world/asia/17headley.html?pagewanted=1&_r=1&ref=global-home diakses pada 17 Oktober 2010

²⁵ Ibid

dibebaskan dari status tahanan²⁶. Hal ini tentu saja menimbulkan keluhan dari pihak kepolisian India dimana pihak berwenang Pakistan dikeluhkan tidak mau bekerja sama dengan memberikan informasi untuk penyelidikan mereka.

- e. Pada laporan resmi yang diterbitkan pada bulan Oktober 2010²⁷, badan intelijen India menyatakan bahwa ISI telah memberikan dukungan atas serangan 26/11 dengan menyediakan dana untuk misi pengintaian/survey di Mumbai. Laporan tersebut juga menyatakan klaim David Headley bahwa komandan sayap militer LeT, Zaki-ur-Rahman Lakhvi, memiliki hubungan dan ikatan yang sangat dekat dengan Direktur Jendral ISI, Jendral Ashfaq Kiani. Zaki-ur-Rahman dikatakan merupakan agen binaan dibawah seorang handler bernama Brig. Riyaz. Sementara oleh Lt. Col. Hamza, Hadley diberikan kepada Mayor Iqbal²⁸. Lebih lanjut dinyatakan bahwa setiap tindakan besar yang dilakukan oleh LeT, merupakan hasil kerjasama dengan ISI, termasuk serangan 26/11.
- f. Sebelum melakukan serangan, para penyerang tinggal dan dilatih oleh Lashkar-e-Taiba dalam safehouse di Azizabad dekat Karachi selama 18 bulan²⁹ sebelum kemudian mereka menaiki sebuah perahu kecil untuk menuju ke Mumbai³⁰.
- g. Para penyerang menggunakan setidaknya tiga kartu SIM yang dibeli di India, di daerah perbatasan dengan Banglades , dan juga indikasi bahwa

²⁶ James Rupert "Pakistan's Partial Crackdown Lets Imams Preach Jihad", Bloomberg, 2009 <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=aF44YOpTiIJK> diakses pada 16 Oktober 2010

²⁷ Ravi Nessman dan Ashok Sharma, "Indian gov't: Pakistan spies tied to Mumbai siege". Yahoo News, 2010 http://news.yahoo.com/s/ap/20101019/ap_on_re_as/as_india_mumbai_attack diakses pada 19 Oktober 2010

²⁸ Ibid

²⁹ Jayshree Bajoria, "Profile: Lashkar-e-Taiba (Army of the Pure) (a.k.a. Lashkar e-Taiba, Lashkar e-Toiba; Lashkar-i-Taiba)", Council on Foreign Relations (CFR). 2008 <http://www.cfr.org/publication/17882/#5> diakses pada 16 Oktober 2010.

³⁰ Diwakar, "Terror boat was almost nabbed off Mumbai", The Economic Times, 2008 <http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/3816639.cms> diakses pada 16 Oktober 2010.

sebuah kartu SIM yang dibeli di New Jersey, Amerika Serikat³¹. Selain itu, mereka menggunakan beberapa peralatan seperti menggunakan GPS dan google earth untuk navigasi. Apabila dilakukan analisis finansial dapat diberikan deskripsi sebagai berikut:

- 1) pelatihan selama 18 bulan³², dengan estimasi minimum bahwa pelatihan untuk 10 orang selama satu bulan mencapai 1000 USD. Total minimum untuk 18 bulan sejumlah 18.000 USD³³.
- 2) perahu karet standar militer yang digunakan menggunakan mesin Mator bertenaga 60 tenaga kuda, yang dapat dibeli dengan biaya 250.000 USD³⁴.
- 3) sepuluh senapan AK-47, di Pakistan dapat dibeli dengan bebas yang masing-masing berharga sekitar 1.500 USD³⁵. Sementara amunisi sebanyak 1.500 peluru seharga 800 USD³⁶. Total sebanyak 15.800 USD.
- 4) dua bom dengan timer, masing-masing 250-350 USD³⁷. Total 500-700 USD.
- 5) logistik lapangan para penyerang (baju baru, celana kargo baru, makanan ringan) sekitar 100 USD per orang. Total 1.000 USD³⁸.
- 6) GPS sebanyak lima buah yang diberikan pada setiap grup, masing-masing bernilai 150-200 USD. Total 750-1.000USD.
- 7) sepuluh buah *blackberry*, masing-masing bernilai 250-300 USD. Total 2.500-3.000 USD.

³¹ Tom Morgan, "Arrested Mumbai gunmen 'of British descent'", The Independent, 2008. <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/new-claims-of-britons-amongst-mumbai-gunmen-1039452.html> diakses pada 16 Oktober 2010.

³² Bajoria, Op. cit., 2008

³³ Diktat Badan Intelijen Australia, ASIO pada CTITP, April 2010.

³⁴ Ibid

³⁵ Sajjad Tarakzai, "Kalashnikov Demand Soars With Violence in Pakistan", the Jakarta Globe, 2009.

<http://thejakartaglobe.com/afp/kalashnikov-demand-soars-with-violence-in-pakistan/319480> diakses pada 16 Oktober 2010

³⁶ Ibid

³⁷ Diktat ASIO, Op. cit., 2010

³⁸ Ibid

- 8) granat tangan Norinko tipe 86, masing-masing orang membawa delapan buah. Harga per granatnya sekitar 15 USD³⁹. Total 1.200 USD.
- 9) dalam darah para penyerang terdapat kandungan LSD dan steroid serta kandungan halusinogen guna menengkan pikiran mereka dan untuk menjaga agar energy tetap berada dalam waktu 50 jam⁴⁰.

Dengan kompleksitas teknologi dan besarnya biaya yang dikeluarkan yang diperkirakan mencapai sekitar 290.500-291.000 USD—yang bukan merupakan dana yang sedikit, kecurigaan atas dukungan negara atas LeT menjadi semakin kuat.

- h. Rentetan penangkapan terkait dengan serangan Mumbai 26/11 yang hampir semuanya merupakan warga negara Pakistan. Antara lain dua warga negara Pakistan yang berperan dalam memfasilitasi transfer uang atas serangan 26/11, Javed Iqbal dan Hamad Ameen Sadiq, juga warga negara Pakistan yang juga dituduh memberikan dukungan logistik terhadap serangan tersebut, Khan dan Riaz⁴¹. David Coleman Headley dan Tahawwur Hussain Rana ditangkap oleh pemerintah Amerika atas keterlibatannya dalam suplay informasi dan pengintaian terhadap objek-objek serangan Mumbai 26/11, sementara Abdur Rehman Hashim Syed, pensiunan militer Pakistan dengan pangkat Mayor dituduh oleh FBI sebagai konspirator serangan dan sebagai rekan dari Hadley⁴². Dan pada 15 Januari 2010, badan intelijen India, *Research and Analysis Wing* (RAW), menangkap Syeikh Abdul Khwaja kepala operasi HuJI India yang juga merupakan salah satu handler dari serangan 26/11⁴³.

³⁹ Norinco Corp, www.norinco.com, diakses pada 16 Oktober 2010

⁴⁰ Damien McElroy, "Mumbai attacks Terrorists took cocaine to stay awake during assault", *The Daily Telegraph*, 2008

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/3540964/Mumbai-attacks-Terrorists-took-cocaine-to-stay-awake-during-assault.html> diakses pada 18 Oktober 2010

⁴¹ ET Bureau, "FBI nails Pak Major for Mumbai attacks", *India Times*, 2009.

<http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/FBI-nails-Pak-Major-for-Mumbai-attacks/articleshow/5317076.cms> diakses pada 16 Oktober 2010

⁴² Ibid

⁴³ Abhishek Sharan dan Ashok Das, "26/11 Attacks Handler Arrested", *Hindustan Times* 2010 <http://www.hindustantimes.com/News-Feed/hyderabad/26-11-attacks-handler-arrested/Article1-499019.aspx> diakses pada 16 Oktober 2010

Beberapa bukti dan hasil penyelidikan diatas, ditambah fakta-fakta yang telah diberikan pada sub-bab sebelumnya, merupakan dasar-dasar yang memang mampu memberikan dukungan terhadap tuduhan bahwa Pakistan, melalui sayap intelijennya, melakukan dukungan terhadap LeT, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Tentu saja tuduhan ini dapat dengan mudah ditolak oleh pemerintah Pakistan (*plausible denial*). Pun, dikarenakan oleh peristiwa Mumbai 26/11 yang merupakan kali kedua Pemerintah Pakistan dikenakan tuduhan menyokong terorisme oleh LeT sebagai aktor non-pemerintah, maka India memiliki hak yang besar apabila kemudian melakukan eskalasi konflik dan bersitegang dengan negara tetangganya itu.

Sekarang, kita dapat melihat pola yang tergambar dari sejarah hubungan kedua negara teriat dengan aksi terorisme sebagai pemicu. Hal ini tentu saja terjadi pada era pascatahun 1998, dimana pada tahun tersebut kedua negara melakukan deklarasi kapabilitas nuklir mereka, sementara kegiatan terorisme yang beraliran etno-nasionalisme Kashmir makin menguat.

Pola ketegangan antara dua negara pascatahun 1998 yang diakibatkan oleh aksi terorisme di India oleh kelompok militan Pakistan⁴⁴ dapat kita lihat pada tahun 2001, 2002, dan 2008.

a. Desember 2001

Pada bulan Desember 2001, India memobilisasi sekitar 700.000 pasukan di sepanjang perbatasan India- Pakistan atas respons terhadap serangan atas Parlemen India di New Delhi. Aksi India ini kemudian memicu mobilisasi militer Pakistan di tempat yang sama⁴⁵. Kontak senjata terjadi antara pasukan India dan Pakistan dan menewaskan banyak korban militer dan sipil. Ketegangan bilateral ini bermula setelah terjadinya serangan bunuh diri atas Gedung Parlemen India pada 13 Desember 2001. Dalam serangan

⁴⁴ Pada tahun 1999 terjadi eskalasi konflik diantara dua negara yang dikenal dengan peristiwa kargil. Walaupun terjadi perang terbatas, ketegangan/konflik Kargil tidak dimasukkan dalam konteks sub-bab ini karena pemicu utamanya bukanlah merupakan aksi terorisme, melainkan adanya prajurit Pakistan yang masuk ke dalam wilayah India.

⁴⁵ Bajoria, Loc. Cit., 2008

itu 15 orang tewas, termasuk lima pelaku penyerangan. Pemerintah India menuding Gerilyawan LeT dan *Jaish-e-Mohammad* bertanggung jawab atas serangan itu, sementara pemerintah Pakistan tidak menindak kedua organisasi dari Pakistan tersebut karena belum ada bukti⁴⁶. Mantan Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee menyatakan secara resmi bahwa perang antara India dan Pakistan bisa terjadi bila Pakistan tidak tegas menghadapi kelompok separatis Kashmir. Langkah eskalasi diambil oleh India dengan menarik pejabat India setingkat duta besar di Islamabad, Pakistan ke New Delhi, serta pengusiran seorang diplomat Pakistan dari India oleh Kementerian Luar Negeri India. Dalam tuntutananya, India akan menarik pasukannya apabila Pemerintah Pakistan melakukan tindakan tegas dalam mencegah segala aksi infiltrasi lintas batas militan Islam Pakistan ke India.

Konflik ini diselesaikan dengan bantuan Pemerintah Amerika yang menyatakan secara resmi untuk pertama kalinya bahwa terdapat hubungan antara kelompok teroris Kashmir yang beroperasi di Pakistan dengan negara Pakistan. Lebih lanjut Amerika Serikat memaksa Jenderal Musharraf berjanji bahwa biro intelijen Pakistan dan tentaranya akan menghentikan pemberian makanan, senjata dan bantuan logistik lainnya kepada para infiltrator yang melakukan serangan-serangan teroris ke India dan Kashmir yang dikuasai India. Tentara Pakistan juga tidak akan lagi memberikan serangan mortir untuk melindungi para penyusup⁴⁷.

b. Mei 2002

Pada bulan Mei 2002, terjadi aksi serangan bom bunuh diri di wilayah Jammu-Kashmir yang diduduki India, menewaskan 35 orang militer Angkatan Darat India. Hal ini kembali membuat Pemerintah India marah

⁴⁶ Liputan6, "Ketegangan India-Pakistan Memuncak", 2001.

<http://berita.liputan6.com/luar neger i/200112/26084/class=%27vidico%27> diakses pada 16 Oktober 2010

⁴⁷ Jackson Diehl, "Musharraf's Stale Promises", Washington Post, 2007.

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/04/AR2007020400653.html> diakses pada 16 Oktober 2010

dan pada waktu itu, Perdana Menteri India, Atal Behari Vajpayee kembali mengeluarkan ancaman perang terhadap Pakistan. India kemudian memobilisasi sekitar 1.2 juta tentaranya ke garis perbatasan (*Line of Control/LoC*) di Kashmir dan sepanjang perbatasan India-Pakistan⁴⁸. Vajpayee menyatakan ancamannya tersebut tidak lepas dari insiden penyerangan pemboman Parlemen India pada Desember 2001 dan gagalnya Pemerintah Pakistan dalam membasmi dan menghentikan *cross-border terrorism* atau aksi penyusupan kelompok militan dari wilayah Pakistan ke Kashmir-India, yang dijanjikan Presiden Pakistan kala itu, Jenderal Musharraf, dalam pidato resminya pada Januari 2002. Langkah India selanjutnya adalah dengan menyerahkan komando keamanan di Kashmir yang biasanya dipegang oleh kementrian dalam negeri kepada militer angkatan darat India. Hal yang sama kemudian direspons oleh militer Pakistan. Namun, perang tidak pernah terjadi.

c. Desember 2008

Pada bulan Desember 2008, terkait dengan peristiwa serangan 26/11, hubungan bilateral India dan Pakistan kembali menegang. Perdana Menteri Pakistan, Yousuf Raza Gilani, menyatakan bahwa negaranya tidak menginginkan untuk berperang dengan India. Pakistan ingin hidup bersahabat dengan negara tetangga itu, dan dalam menyikapi ketegangan, negaranya juga tidak akan mengambil aksi, melainkan hanya akan bereaksi dan jika dibutuhkan negaranya akan bertindak dengan tegas. Pernyataan Gilani tersebut dikeluarkan setelah terdapat Indikasi pergerakan pasukan India menuju Kashmir. Hal ini dikuatkan juga dengan tuduhan Pakistan bahwa jet-jet tempur India melanggar wilayah Udara Pakistan, masuk ke dalam wilayah Pakistan dan sudah dalam kondisi siap menyerang Pakistan. Namun, tentu saja hal tersebut dibantah Menteri Luar Negeri India, Pranab Mukherjee. Atas agitasi tersebut, Pemerintah Pakistan merespons dengan mobilisasi pasukan dari daerah kesukuan yang berbatasan dengan Afganistan, ke wilayah di dekat perbatasan dengan India. Juga pemerintah

⁴⁸ BBC News, "India Rules Out Kashmir Talk", 2002.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2003615.stm diakses pada 18 Oktober 2010

Pakistan telah menetapkan larangan cuti bagi semua anggota angkatan bersenjata⁴⁹.

Sebagai reaksi atas pergerakan pasukan Pakistan, Perdana Menteri India, Manmohan Singh mengumpulkan semua pimpinan militernya untuk membicarakan strategi eskalasi. Pemerintah India juga menganjurkan warganya untuk tidak pergi ke Pakistan. Pemerintah India juga meningkatkan tekanan diplomatis melalui jalur forum internasional. Menteri Luar Negeri India, Pranab Mukherjee menyerukan Cina dan Arab Saudi yang menjadi sekutu penting Pakistan agar memaksa Pemerintah Pakistan untuk mengambil tindakan keras terhadap terhadap kelompok militan dan teroris yang berkembang di negaranya. Ketegangan kembali reda setelah difasilitasi oleh Pemerintah Amerika yang menyerukan agar Pemerintah India dan Pakistan untuk menahan diri, serta bekerjasama dalam penyelidikan serangan Mumbai, serta dalam masalah kerjasama pemberantasan terorisme. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan positif oleh kedua negara.

Dengan melihat pola ketegangan bilateral dua negara yang disebabkan oleh terorisme sebagai *non-state actor* pada tiga kejadian kunci diatas, maka pola konflik antara India dan Pakistan selalu mengikuti pola sebagai berikut:



Model 4.1. Pola Eskalasi Konflik Faure

Dimana pada periode pra-2000, jalur dari eskalasi tidak lebih dulu menuju ke negosiasi, seperti yang ditawarkan oleh pandangan realis, dimana eskalasi akan berkembang menuju perang, seperti terlihat pada perang India-Pakistan pada 1947, 1965, 1971, 1984, dan konflik Kargil pada 1999.

⁴⁹ Deutsche Welle, "Ketegangan Antara India dan Pakistan", Deutsche Welle, 2008. <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3904859,00.html> diakses pada 16 Oktober 2010

Namun, pada periode pascatahan 2000, terlihat dengan jelas bahwa hubungan kedua negara mengikuti pola Zartman dan Faure (2005), dimana pola bagan tersebut diatas terapkan. Eskalasi dalam konflik internasional akan menuju ke negosiasi tanpa melalui perang terbuka, seperti yang dapat dilihat pada pola konflik India-Pakistan periode 2000-2010. Walaupun mobilisasi pasukan di kedua pihak sudah dilakukan dan dua kondisi tersebut diatas sudah sangat siap untuk berperang, namun perang tidak pernah terjadi.

Hal ini dapat dipahami dengan adanya kekuatan penangkal (deterrence) yang baik diantara kedua pihak. Walaupun secara de facto pasukan militer India merupakan pihak yang lebih superior, namun jumlah statistik tersebut akan kurang signifikan jika dihadapkan pada kekuatan nuklir kedua belah pihak. Berikut diberikan *overview* mengenai komposisi kekuatan nuklir Pakistan dan India.

Sebagai sebuah negara yang memiliki kemampuan nuklir, India didukung oleh kondisi alam yang sangat potensial dengan adanya sumber uranium yang sangat berlimpah. Perkembangan nuklir India telah dimulai sejak negara tersebut belum memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Saat ini India mempunyai 22 reaktor nuklir dan pada tahun 2014 akan membuka 14 reaktor nuklir untuk pemeriksaan internasional.

India telah mengadakan program nuklir sebagai senjata sejak 1974 yang ditandai dengan uji coba peledakan nuklir pertama yang diberi nama "*The Smiling Buddha*". Setelah itu secara regular India mengadakan percobaan nuklir yang secara umum ditujukan untuk maksud- maksud damai seperti PLTN, teknologi radiasi, menghasilkan isotop-isotop untuk diaplikasikan dalam bidang kedokteran, pertanian dan industri.

India tidak pernah menjadi anggota Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT). Justru proyek "*The Smiling Buddha*" merupakan proyek uji coba "alat nuklir damai"—sebagaimana digambarkan oleh pemerintah India pada 1974—yang pertama kali dikembangkan setelah pendirian program NPT. Hal ini menunjukkan

bahwa teknologi nuklir sipil dapat dikembangkan untuk kepentingan persenjataan. Motivasi utamanya diperkirakan adalah untuk melawan Cina⁵⁰.

India banyak mendapatkan asistensi pengembangan nuklir dan teknologinya dari Russia. Namun pasca tumbanganya rezim komunis di Uni Soviet, India mulai mengadakan kerjasama dengan Amerika Serikat untuk pengembangan teknologi nuklirnya.

Saat ini, India dilaporkan memiliki sekitar 40 hingga 50 buah hulu ledak nuklir aktif⁵¹ dan diketahui telah melakukan pengetesan hulu ledak nuklir sebanyak enam kali, yang dimuali dengan Operasi *Smiling Buddha* pada 18 Mei 1974 dengan menggunakan tipe plutonium berkekuatan 6 hingga 20 kiloton. Dilanjutkan dengan tiga percobaan di bawah tanah daerah Pokhran di Gurun Thar, Propinsi Rajasthan, India secara berurutan pada 11 Mei 1998 yang diberi nama operasi *Shakti I, II, dan III*. Sementara terpaut dua hari kemudian, pada 13 Mei 1998, kembali dilakukan dua ujicoba hulu ledak nuklir bawah tanah secara berurutan⁵² dan terus dinyatakan sebagai pernyataan kesuksesan India dalam program nuklirnya.⁵³

Walaupun pada ujicoba Operasi Sakti sebuah hulu ledak termonuklir⁵⁴ yang bekerja dengan reaksi fusi sukses diledakkan, percobaan pada tahun 1998 tersebut mengakibatkan India harus menerima sanksi dari AS. Sanksi ini berlaku sampai Juli 2005 dan setelahnya tercapai kesepakatan antara India dan Amerika Serikat, dimana India secara resmi diakui sebagai sebuah negara dengan teknologi nuklir

⁵⁰ Lihat konflik India – Cina yang berakhir pada penyerahan wilayah perbatasan India kepada Cina pada tahun 1962

⁵¹ Norris, Robert S. dan Hans M. Kristensen. "India's Nuclear Forces, 2005," *Bulletin of the Atomic Scientists* 2005

⁵² Nuclear testing - Definition

http://www.wordiq.com/definition/Nuclear_testing diakses pada 19 Oktober 2010

⁵³ Lihat pernyataan Ketua Komisi Energi Atom India, Anil Kakodkar pada artikel "Kakodkar says Pokhran-II tests fully successful", *Times of India*, 24 September 2009

<http://timesofindia.indiatimes.com/news/india/Kakodkar-says-Pokhran-II-tests-fully-successful-/articleshow/5052234.cms> diakses pada 18 Oktober 2010

⁵⁴ India's Nuclear Weapons Program: Operation Shakti: 1998.

<http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaShakti.html> diakses pada 18 Oktober 2010

maju yang bertanggungjawab dan setuju untuk melakukan kerjasama nuklir di antara kedua negara⁵⁵.

Sama dengan India, Pakistan bukan merupakan anggota Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT). Pakistan selama beberapa dekade secara diam-diam mengembangkan senjata nuklirnya dimulai pada akhir 1970-an dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Cina. Pakistan pertama kali berkembang menjadi negara nuklir setelah pembangunan reaktor nuklir pertamanya di dekat Karachi dengan peralatan dan bahan yang disediakan oleh negara-negara barat pada awal 1970-an. Setelah uji coba senjata nuklir India, Pakistan secara bertahap memulai program pengembangan senjata nuklirnya dan secara rahasia membangun fasilitas nuklirnya kebanyakan berada di bawah tanah dekat ibu kota Islamabad. Beberapa sumber mengatakan Pakistan telah memiliki kemampuan senjata nuklir pada akhir 1980-an⁵⁶. Hal tersebut masih bersifat spekulatif sampai pada 1998 ketika Pakistan melakukan uji coba pertamanya di Pegunungan Chagai, Chagai District, dan Gurun Kharan, Kharan District, Propinsi Baluchistan, Pakistan, beberapa hari setelah India melakukan uji cobanya⁵⁷.

Hingga saat ini dilaporkan Pakistan mempunyai 30-52 buah hulu ledak nuklir aktif⁵⁸ dan telah melakukan enam kali uji coba hulu ledak nuklir sebagai respons atas ujicoba nuklir India. Lima ujicoba nuklir dilakukan secara berurutan pada 28 Mei 1998, dan satu ujicoba pada 30 Mei 1998^{59 60}.

Dengan berpedoman pada strategi penangkalan nuklir dan utilisasi nuklir, dalam konflik antara India dan Pakistan periode pascatahun 1998, terdapat satu pengecualian pada konflik Kargil, dimana kedua negara mendeklarasikan bahwa

⁵⁵ Miriam Rajkumar, "Proliferation Analysis: A Nuclear Triumph for India", Carnegie Endowment for International Peace, tanpa tahun
<http://www.carnegieendowment.org/npp/publications/index.cfm?fa=view&id=17215> diakses pada 18 Oktober 2010

⁵⁶ Norris, Robert S. dan Hans M. Kristensen. "Pakistan's nuclear forces, 2001," *Bulletin of the Atomic Scientists*, 2002

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Nuclear testing - Definition http://www.wordiq.com/definition/Nuclear_testing

⁶⁰ Lihat juga Pakistan's Nuclear Weapons Program - 1998: The Year of Testing
<http://nuclearweaponarchive.org/Pakistan/PakTests.html>

negaranya merupakan negara yang memiliki kekuatan nuklir pada tahun 1998, sementara konflik Kargil terjadi pada tahun 1999. Walaupun konflik Kargil hanya merupakan sengketa terbatas, namun tetap saja hal ini agak keluar dari aturan main negara-negara yang menjalankan strategi nuklir sebagai penangkal. Namun, sepertinya hal ini merupakan pola yang jelas terjadi pada negara-negara dengan kekuatan nuklir, seperti yang terjadi pada perang Yom Kippur, dimana pada saat itu Israel telah memiliki teknologi nuklir yang dikembangkan di Dimona, dan telah memiliki beberapa hulu ledak nuklir setahun sebelum perang Yom Kippur berlangsung⁶¹. Pun, konflik Kargil hanya berlangsung dalam konteks perang terbatas dan dapat diselesaikan dengan adanya campur tangan Amerika Serikat. Kini, jika mau berpikir secara rasional dengan landasan pandangan realisme, dengan adanya kekuatan nuklir di kedua negara, maka skenario terburuk akan terbentuk dengan kehancuran kedua belah pihak.

Di atas kertas, kekuatan militer India jauh lebih unggul dibandingkan dengan Pakistan. Dari segi jumlah, anggota militer India tiga kali lipat banyaknya dibanding Pakistan^{62 63 64}. Begitu juga dari segi persenjataan, India berada di atas Pakistan. Angkatan Laut India merupakan yang terbesar di urutan keempat di dunia⁶⁵. Dari segi statistic, tentu saja Pakistan tidak akan mampu menandingi kekuatan militer India. Namun, apabila memang terjadi peperangan diantara kedua negara, maka India sebagai pihak *aggressor* hanya akan mengembangkan perang terbatas (*limited war*) daripada pertempuran berskala luas (*unlimited scale war*). Disini, India hanya akan menyerbu daerah Kashmir yang dikuasai Pakistan dengan tujuan untuk menghancurkan markas-markas kelompok militan yang selama ini menyusup ke wilayah India.

⁶¹ Panji Dewanata, "Teori Konspirasi Pengungkapan Fasilitas Nuklir Negev di Dimona sebagai Deterrence Strategy dan Strategi Nuclear Utilization Theory oleh Israel", 2009

⁶² "India vs Pakistan: Evaluation on Military Strength", <http://www.abytheliberall.com/military/india-pakistan-military-strength> diakses pada 13 November 2010

⁶³ Nation Master, "Pakistani Military Statistic", Nation Master <http://www.nationmaster.com/country/pk-pakistan/mil-military> diakses pada 13 November 2010

⁶⁴ Wikipedia, "Indian Army", Wikipedia, tanpa tahun http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Army diakses pada 13 November 2010

⁶⁵ Indian Navy, "Naval Combatants", Indian Navy, tanpa tahun <http://indiannavy.nic.in/> diakses pada 13 November 2010

Namun, berdasar atas pernyataan Pemerintah Pakistan yang telah siap dan akan menghadapi segala macam agresi dengan langkah yang tegas memberikan arah kepada peperangan yang berkepanjangan. Pun didukung dengan langkah Pakistan sebagai negara bertahan (*defender*) yang tentu saja akan menggunakan nuklirnya sebagai alat bertempur guna menandingi statistik pasukan yang tidak berimbang. Dalam skenario yang realistis, India akan melakukan serangan awal dengan menggerakkan pasukan infanterinya menyeberangi perbatasan dengan didukung oleh serangan udara India yang lebih superior daripada Pakistan. Agresi ini kemudian akan dibalas oleh Pakistan dengan membuat front di sepanjang perbatasan India, dan mungkin juga akan masuk ke dalam wilayah India. Hal ini akan merubah kebijakan agresi India yang semula hanya merupakan peperangan terbatas, kemudian terus merambat ke arah pertempuran berskala tak terbatas (*unlimited scale war*). Ketika perang benar-benar berubah status menjadi berskala tak terbatas, Pakistan tentu saja akan kewalahan dalam menghadapi kemampuan militer konvensional India, seperti yang terjadi pada periode perang India – Pakistan tahun 1947, 1965 dan 1971.

Disini dimulai utilisasi senjata nuklir oleh Pakistan guna mengimbangi kekuatan militer India. Militer Pakistan memungkianan akan mengirim langsung senjata nuklir tersebut menuju sasaran yang telah ditentukan ke sejumlah kota besar di India. Jika demikian langkah kebijakan perang yang diambil oleh Pakistan, maka New Delhi, Mumbai, dan beberapa kota besar lainnya hancur. Dan apabila India kemudian berkesempatan membalas seperti dalam konsep MAD⁶⁶, maka Islamabad, Lahore, dan Karachi akan bernasib serupa.

Menurut Schelling (1980, 1996), ada tiga parameter yang dapat dipakai guna menentukan apakah sebuah negara bersedia menggunakan utilitasnya terhadap senjata nuklir; kecerdasan para pembuat kebijakan dan pemegang strategi pertahanannya, level ketegangan antarnegara, dan keberanian dalam mengambil resiko kehancuran dari hasil retaliasi. Berdasarkan penelitian singkat tak

⁶⁶ Mutual Assured Destruction, sebuah konsep yang meyakini bahwa ketika dua negara yang memiliki nuklir sebagai strategi militer kemudian berperang, maka kehancuran diantara kedua negara itu sudah dapat dipastikan.

terdokumentasi dari penulis pada Januari 2010 di India, sebagian besar masyarakat India memiliki pola pikir yang keras, dimana ketika terjadi sesuatu atas dirinya, maka mereka akan dengan sangat berani dalam melakukan eskalasi konflik, walaupun tidak ada situasi ketegangan sebelumnya ataupun situasi ketegangan tercipta dalam waktu yang singkat. Disini, jika kita mengabaikan faktor lain, maka utilisasi nuklir oleh India akan dengan mudah terjadi. Walaupun suara pemerintah terkadang berlawanan dengan suara mayoritas masyarakatnya, parlemen India akan lebih berhati-hati dalam melakukan aksi utilitas nuklir. Dari sisi Pakistan, berulang kali dinyatakan bahwa Pakistan akan dengan tegas bereaksi atas segala agresi dari India. Utilisasi nuklir oleh India pun tentu saja akan segera dibalas dengan utilisasi nuklir oleh Pakistan.

Namun, tentu saja kita tidak bisa mengesampingkan campur tangan dari politik internasional. Amerika, Cina, Rusia, dan negara-negara Asia tentunya memiliki kepentingan dalam mencegah kemungkinan tersebut. Dan jika kita melihat pola yang telah disajikan diatas, didukung dengan apapun level ketegangan diantara dua negara tersebut, aksi terorisme hanya akan mempertajam ketegangan, penarikan perwakilan diplomatik dari masing-masing negara, dan eskalasi yang lain, namun tidak pernah dan kemungkinan besar tidak akan meluas menjadi perang diantara kedua negara karena sifatnya yang berupa *non-state actor*, yang mana tuduhan akan kegiatan dukungan terhadap *non-state actor* tersebut akan dengan mudah disangkal dengan melakukan *plausible denial*.

4.5. Pola Hubungan Ideal antara India dan Pakistan dalam Penangan Permasalahan Terorisme

Untuk menangani permasalahan terorisme, terdapat banyak sekali jalan yang diajukan oleh para ahli, mulai dari perang melawan terorisme, *terror management theory*, kerjasama antarinstansi, hingga deradikalisasi. Dalam keterkaitannya mengenai penanganan kegiatan terorisme di India dan Pakistan, yang melibatkan dua negara, ada dua upaya yang perlu diperhatikan untuk mengatasi permasalahan terorisme tersebut.

Pertama adalah dengan menerapkan konsep *terror management theory*, sebuah teori yang dikeluarkan oleh Sheldon Solomon, Tom Pyszczynski, dan Jeff Greenberg (1997) yang menyatakan bahwa manusia umumnya seragam dan serupa dalam menghindari bencana atau ketakutan untuk berubah atau menjadi berbeda. Karena itulah manusia kemudian membentuk suatu pranata, suatu aturan yang mengatur norma-norma, dan kemudian hidup dengan menaati aturan-aturan tersebut. Hal ini semata-mata dilakukan karena manusia berusaha mengatur ketakutannya atas kematian dan hal-hal buruk yang mungkin terjadi.

Dikaitkan dengan permasalahan dengan aktor-aktor militan Kashmir, TMT menyatakan bahwa kelompok radikal Islam Kashmir memandang bahwa konsep norma-norma yang dibuat masyarakat India yang mengusung kehidupan Hindu bertentangan dengan pemahaman pribadi mereka tentang kehidupan, karenanya kemudian mereka keluar dari norma-norma tersebut dan membentuk norma-norma baru yang bersifat radikal dan bertentangan dengan norma-norma India.

Keluarnya jalur hidup mereka dari tatanan masyarakat tersebut mengalami ketakutan dengan norma-norma Hindu-India, dan mereka membentuk norma mereka sendiri dan hidup berdasar aturan norma tersebut. Hal tersebut kemudian dimanifestasikan dalam eksistensi kelompok-kelompok militan di Kashmir.

Dalam kaitannya ini, budaya dan agama merupakan faktor yang sangat kuat. Budaya dan agama mengembangkan konsep realita simbolik yang berfungsi membantu individu mengelola teror dengan memelihara keyakinan dan hidup sesuai standar nilai yang menjadi bagian pandangan tersebut. Dalam TMT hal ini disebut sebagai *cultural anxiety-buffer* (penyangga kecemasan budaya) yang menjadi dasar psikologis dan rasa aman individu. Kemudian, hal ini dipersepsikan oleh kelompok militan Kashmir bahwa India dan budaya Hindu merupakan setan yang merusak, dan harus diperangi sebagai manifestasi akumulasi pemerintahan India yang represif atas penduduk muslim Kashmir. Menurut mereka, mereka

tidak dapat hidup dengan dua budaya yang bertentangan, salah satu harus hilang dan digantikan dengan budaya sesuai dengan paradigma mereka.

Adanya komunikasi dan edukasi yang baik dari kedua budaya dan kepercayaan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh kedua pihak, khususnya di dalam Kashmir yang dikontrol oleh India. Hal ini secara normatif akan menyelaraskan cara pandang budaya yang satu dengan yang lainnya agar tidak serta merta saling merusak dan menghancurkan. Dengan pendidikan diharapkan bahwa pemikiran dan cara pandang masyarakat muslim Jammu dan Kashmir dapat hidup berdampingan antara norma kehidupan Islam dengan Hindu.

Yang lebih penting untuk diterapkan adalah pendapat Michael Chandler⁶⁷ yang menyatakan bahwa kerjasama antaragensi dan antarorganisasi merupakan kunci penting dalam upaya memerangi segala upaya terorisme. Dengan melihat karakteristik terorisme India dan Pakistan yang *trans-national*, maka Chandler menyarankan kerjasama, koordinasi dan kegiatan sharing informasi yang baik diantara organisasi keamanan harus mutlak dilakukan guna menghindari kegiatan teror yang mungkin terjadi dimasa depan.

Seperti telah disebutkan diatas, koordinasi dan kerjasama tersebut harus dilakukan dengan efektif. Kerjasama ini harus meliputi segala bidang, termasuk militer, kehakiman, kepolisian, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan ini termasuk juga lembaga intelijen. Prinsip *Command, Control, Communications*, dan *Intelligence* sudah seharusnya diubah menjadi *Cooperation, Communication, Coordination*, dan *(the sharing of) Information* guna menghadapi dan menumpas aksi terorisme.

Informasi yang didapatkan oleh sebuah organisasi hendaknya dianalisa secara cermat sebelum dibagikan kepada organisasi-organisasi lain. Informasi tersebut hendaknya tidak mencantumkan sifat rahasia dari informasi tersebut yang mampu membuat informasi itu kontra produktif, seperti penggunaan bukti yang sulit

⁶⁷ Lihat Chandler, Michael dalam "Counterterrorism Policies and Strategies: Keys to Effective Interagency Cooperation and National Security."

dijadikan bukti absah di pengadilan, dan informasi yang diperoleh dari kegiatan tertutup yang akan membongkar jaringan rahasia pemerintah dalam organisasi teroris yang akan terbongkar apabila sumbernya dijadikan saksi dalam sebuah pengadilan.

Ada tiga tahap yang harus dilalui agar terjalin kerjasama yang kuat dalam upaya penanganan kegiatan kontrateror, khususnya di wilayah Pakistan dan India:

- a. Mendefinisikan ancaman;
- b. Membangun sumber daya guna menghadapi ancaman-ancaman tersebut;
- c. Memberikan kesempatan pada sumber daya tersebut untuk melakukan spesialisasi mereka dalam menangani kegiatan kontrateror.

Disini, mutlak diperlukan kesamaan pandangan antara pemerintah India dan Paksistan, bahwa para kelompok militan di Kashmir merupakan ancaman terhadap keamanan bersama. Terlepas dari berbagai tuduhan terhadap ISI yang melakukan dukungan terhadap kegiatan militan di Pakistan guna melakukan gangguan keaman di India, pada Oktober 2009, kepala ISI, Ahmad Shuja Pasha mengatakan bahwa ISI merupakan lembaga profesional yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan kelompok militan manapun, termasuk dengan kelompok Taliban⁶⁸. Itikad dan pernyataan baik telah dilakukan oleh ISI tersebut pada dasarnya merupakan dasar yang baik guna melakukan hubungan antara ISI dan RAW. Namun, pemahaman akan konsep ancaman kelompok militan tersebut tetap harus disamakan antara kedua pihak.

Kemudian, hal penting selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang harus dibuat sesederhana mungkin. Kebijakan bilateral yang terlalu kompleks hanya akan menjadikan kebijakan itu akan menjadi kontraproduktif dan hanya memusingkan organisasi-organisasi yang terkait, khususnya jika sudah berbicara tentang hubungan dua negara. Pun, kebijakan tersebut haruslah bersifat efektif. Tidak perlu membentuk suatu *task force* baru setiap ada kejadian tindak terorisme karena hal tersebut hanya merupakan pemborosan dana. Bentuk kerjasama antara

⁶⁸ Daily Times Pakistan, 'ISI has no links with Taliban', Daily Times Pakistan, 2009
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2009\10\02\story_2-10-2009_pg1_9 diakses pada 21 Oktober 2010

ISI dan RAW dituntut untuk terus melakukan adaptasi terhadap ancaman-ancaman yang mereka hadapi. Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua pihak. Selain itu, untuk lebih menunjang keefektifan, ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dan koordinasi lembaga-lembaga yang berbeda negara tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan hubungan non-formal antaragensi yang sudah ada dan telah berjalan sebelumnya dengan dasar kepercayaan;
2. Mengadakan pertukaran *liaison officer* (LO);
3. Mengadakan *joint information* dan/atau *operation center* yang berisi para ahli dari berbagai agensi dalam kondisi yang kuat dan bersatu dengan dasar kepercayaan dan saling pengertian. Namun, langkah ini dipandang akan memakan banyak dana dan sangat rawan terhadap serangan. Sebuah serangan terhadap bangunan *joint center* ini akan melumpuhkan para ahli-ahli yang dikumpulkan dari berbagai agensi dari kedua negara, yang akhirnya dapat menimbulkan ketegangan kembali.

4.6. India dan Pakistan Sebagai Refleksi Terhadap Keadaan Indonesia dan Malaysia

Dalam beberapa konteks, fenomena yang terjadi di India dan Pakistan mempunyai beberapa kemiripan dengan fenomena yang terjadi Indonesia dan Pakistan. Beberapa sengketa dan konflik yang terjadi diantara Indonesia dan Malaysia berupa sengketa atas wilayah perbatasan. Beberapa pelaku yang menjadi *mastermind* berbagai tindak terorisme di Indonesia berasal dari Malaysia, seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top, yang keduanya telah tewas dalam penyerangan pihak kepolisian, namun legasi dari kedua tokoh tersebut menyisakan tokoh-tokoh lain yang tidak kalah berbahaya seperti Dul Matin (tewas), Upik Lawanga, Taufik Bulaga, dan lainnya.

Malaysia pun pernah dijadikan sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh garis keras muslim⁶⁹ dan juga dijadikan tempat pelarian bagi buronan kasus terorisme

⁶⁹ Lihat sejarah berdirinya organisasi Jamaah Islamiyah

di Indonesia⁷⁰. Dari segi tiga persamaan telah terpenuhi, yaitu pelaku yang berasal dari Malaysia, tempat kejadian perkara yang berlangsung di Indonesia, dan pemicunya berupa terorisme, tetapi ketegangan diantara dua negara antara Indonesia dan Malaysia tidak terjadi.

Ketegangan di antara Indonesia dan Malaysia justru banyak diakibatkan oleh provokasi militer, yang mana dari provokasi militer kemudian tampak beberapa sentimen-sentimen rencana tindak kekerasan yang mengatasnamakan nasionalisme, seperti dengan aksi *cyber terrorism* dari kedua pihak, rencana pengerahan massa seperti yang hendak dilakukan oleh ormas BENDERA, dan lainnya. Disini nampak bahwa terjadi pola yang terbalik, dimana terorisme di Pakistan dan India menjadi faktor pemicu timbulnya provokasi militer, dan ketegangan kedua belah pihak, namun di dalam hubungan Indonesia dan Malaysia, ketegangan dua negara mengakibatkan adanya provokasi militer dan timbulnya upaya untuk menggunakan aksi kekerasan, yang salah satunya dengan menggunakan aksi terorisme.

Hal ini kemudian dapat dipahami dengan adanya fakta bahwa

- a. Bentuk kegiatan terorisme di Pakistan dan India berbeda dengan terorisme yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Di Pakistan dan India, pola gerakannya lebih ke arah etno-nasionalis, sementara di Indonesia dan Malaysia lebih ke arah terorisme religius.
- b. Pemerintah Malaysia menggunakan undang-undang *Internal Security Act/ISA* sebagai payung dalam setiap kegiatan kontra terorismenya. Hal ini mempersempit ruang gerak bagi para radikal dan kelompok militan untuk berkembang di negaranya. Namun karena adanya ISA ini, dikhawatirkan bahwa para pemain di dunia teror Malaysia berpindah menuju Thailand dan Indonesia untuk melakukan proses rekrutmen dan

⁷⁰ Lihat berita penangkapan Fadli Sadama, anggota jaringan teroris dan pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan, pada 4 Desember 2010, <http://www.antaraneews.com/berita/1291467224/pelaku-terorisme-fadli-tiba-di-indonesia> diakses pada 4 Desember 2010

pelatihan. Hal ini senada dengan yang dikatakan Nasir Abbas⁷¹, bahwa Malaysia dan Singapura merupakan sumber finansial bagi jaringan teroris Asia Tenggara, sementara Indonesia menjadi *breeding ground* dan pelatihan bagi anggotanya.

- c. Kedekatan aktor-aktor terorisme di Indonesia lebih mengarah pada kekuatan di Filipina dibandingkan dengan di Malaysia jika dikaitkan dengan aksi-aksi teror dan logistik lapangan.

Ketiga hal di atas merupakan argumen yang menyangkal adanya korelasi antara apa yang terjadi di Pakistan dan India dengan yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, namun, penanganan permasalahan terorisme yang bersifat transnasional di Indonesia dan Malaysia dapat digunakan dengan baik sebagaimana penyelesaian permasalahan terorisme di Pakistan dan India. Penggunaan konsep *terror management theory* dan kerjasama antarlembaga di kedua pemerintahan harus diaplikasikan dengan optimal. Tentu saja pemahaman mengenai konsep ancaman dan pengesampingan terhadap rasa superioritas satu negara terhadap negara lain harus dibuang guna pencapaian penanganan kegiatan terorisme secara efektif, optimal, dan efisien.

⁷¹ Peter Taylor, "The Jihadi who Turned 'supergrass'", BBC News, 2006
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/5334594.stm> diakses pada 23 Oktober 2010

BAB 5

PENUTUP

Dengan tercapainya analisis di bab sebelumnya, maka kita sampai pada bagian akhir yang dapat merangkai apa yang telah disampaikan pada empat bab sebelumnya.

5.1. Kesimpulan

- a. Dalam prakteknya, kegiatan terorisme di India dan Pakistan banyak terjadi di wilayah India, dengan pelaku terror berasal baik dari dalam India sendiri, maupun dari Pakistan. Aksi terorisme yang melibatkan Pakistan dalam terorisme di India banyak dilakukan oleh gerakan militan Kashmir yang berupaya untuk memisahkan diri dari wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India untuk merdeka, atau bergabung dengan negara Pakistan yang memang berdiri untuk mewadahi warga muslim di wilayah sub-kontinen India.
- b. Aksi terorisme yang terjadi di wilayah Pakistan dan India, khususnya yang terjadi di wilayah India akibat aktor terorisme Pakistan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.
- c. Dalam beberapa kesempatan, India selalu menuduh bahwa Pakistan melakukan tindakan dukungan terhadap terorisme, baik itu yang terjadi di wilayah Pakistan sendiri, maupun di wilayah India. Dukungan terhadap pada kelompok teroris ini mencakup pemberian kesempatan untuk berkembang, melakukan perekrutan, dan memberikan fasilitas pelatihan, hingga pemberian finansial untuk melakukan aksi mereka, serta melakukan koordinasi agar serangan yang dilakukan dapat dilakukan dengan sempurna.
- d. Meskipun segala bukti hasil penyelidikan dan data-data analisis terkait dengan keterlibatan pemerintah Pakistan melalui lembaga intelijennya, ISI,

dengan kelompok militan yang melakukan kegiatan terorisme di wilayah Pakistan dan India, diberikan dan dipaparkan secara lugas, pemerintah Pakistan tetap mampu melakukan pembantahan dengan melalui proses *plausible denial* dan tetap menjadi *state actor* yang menyatakan senantiasa berupaya melakukan kegiatan pemberantasan terorisme di negaranya secara kontinu. Hal ini kemudian memberikan gambaran bahwa aksi pelemparan tuduhan diantara dua negara hanyalah menjadi kegiatan yang membuang-buang waktu dan kontra produktif. Investigasi dan revelasi semacam ini hanya dapat digunakan sebagai daya tawar, tetapi tidak dapat digunakan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas suatu aksi terkait tindakan kejahatan transnasional, termasuk terorisme.

- e. Kondisi ketegangan diantara India dan Pakistan pascatahun 1998 yang diakibatkan oleh terorisme sebagai *non-state actor* yang menciptakan gangguan kemanan di wilayah India terus berulang dengan pola yang sama. Pola ini berujung pada eskalasi konflik yang di akhiri dengan proses negosiasi tanpa melalui perang terbuka. Pun kemudian dengan prakarsa dari pihak-pihak ketiga dalam percaturan politik internasional, kembali melakukan pembicaraan damai yang polanya juga terus berulang. Dengan menggunakan dasar tersebut, hubungan diantara kedua negara yang dipengaruhi oleh aksi terorisme yang dilakukan oleh aktor-aktor yang sama di wilayah yang sama hanya akan menimbulkan naiknya ketegangan dan unsur ketidakpercayaan diantara dua negara tersebut, menimbulkan provokasi militer dari kedua pihak, penarikan sementara perwakilan diplomatik oleh kedua negara, namun tidak akan sampai ke arah peperangan. Dengan catatan parameter-parameter tersebut tidak berubah, aktor dan wilayahnya.
- f. Guna menangani permasalahan terorisme di India dan Pakistan, perlu diadakan pemahaman dan pengenalan budaya yang komprehensif bagi kedua pihak, khususnya di wilayah Kashmir secara merata. Juga perlu dilakukan penguatan kerjasama diantara kedua negara dan lembaga-

lembaga yang tergabung di dalamnya. Dengan penekan bahwa penyamaan konsep terhadap ancaman keamanan harus dilakukan oleh kedua pihak agar didapatkan hasil kerjasama yang kuat dan bersifat saling mendukung. Pola hubungan kekuatan yang seperti ini akan menjamin peningkatan hubungan bilateral diantara kedua pihak dengan berpegang pada satu prinsip: keamanan kawasan, khususnya kawasan Kashmir, baik yang dikuasai oleh India maupun Pakistan.

- g. Walaupun pola aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dan Malaysia tidak bisa disamakan dengan pola yang terjadi di India dan Pakistan, pola kerjasama dan relasi kekuatan diantara dua pihak dapat digunakan sebagai upaya guna memerangi aksi terorisme di kedua negara. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya keuntungan bersama bagi kedua negara dengan adanya kerjasama antarnegara dan lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya pada dua negara tersebut.

5.2. Saran

- a. Walaupun kecil, ancaman akan terjadinya perang nukir di wilayah sub-kontinen India dapat terjadi. Karenanya Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam benua Asia harus turut pro-aktif dalam penanganan konflik di kedua negara. Hal ini juga mengingatkan bahwa Pakistan merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, dan diharapkan bahwa masyarakat muslim Indonesia juga memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap Pakistan. Sementara itu, India merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Perekonomian India pun menjadi salah satu indikator tingkat perekonomian yang semakin mantap. Karenanya, kerjasama ekonomi diantara India dan Indonesia dapat menjadi salah satu faktor yang menjanjikan.
- b. Pembentukan aliansi terhadap dua negara Asia tersebut merupakan hal yang sangat strategis bagi Indonesia, karena kemudian Indonesia dapat

memperoleh sekutu berupa dua negara yang berkemampuan nuklir sekaligus.

- c. Dengan melihat pola diantara Pakistan dan India, dimana Pakistan secara internasional dituduh sebagai aktor pendukung gerakan terorisme yang kemudian dilakukan di Indonesia, sebagai warga negara Indonesia kita juga seharusnya berhati-hati terhadap kemungkinan serupa dari pihak lain, dimana kelompok militan tertentu dapat digunakan oleh negara lain sebagai aktor non-negara guna menyerang kepentingan nasional kita. Atau, justru Indonesia mengembangkan dukungan terhadap kelompok militan yang mampu diatur guna digunakan sebagai komponen cadangan-non-formal, dan rahasia, dalam melakukan gangguan atau serangan terhadap negara lain yang mencoba mengusik kedaulatan dan atau mencoba merusak kepentingan nasional negara Indonesia. Hal ini merupakan langkah yang riskan, namun akan mudah untuk disanggah apabila dilakukan dengan benar. Pengorbanan dapat dilakukan dan kemudian dapat digunakan prinsip *plausible denial* untuk memutus mata rantai antara kelompok tersebut dengan pemerintah, yang selama ini telah dipraktikkan dengan baik oleh Pemerintah Pakistan.
- d. Terkait dengan faktor kerjasama, dalam menyikapi fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, pemerintah Indonesia hendaknya memperkuat satuan anti terror dan secara kontinu mendukung terbentuknya undang-undang anti terror sebagai payung tegaknya stabilitas keamanan di Indonesia. Sebagaimana ISA yang ditetapkan di Singapura dan Malaysia, juga *Patriot Act* yang ada di Amerika, maka apabila ditetapkan undang-undang serupa di Indonesia, dan didukung oleh pelaksanaan perundangan tersebut secara kontinu dan efektif, maka diharapkan Indonesia tidak lagi menjadi *breeding ground* bagi terorisme. Pembentukan *joint force* guna menanggulangi terorisme transnasional dapat juga digunakan sebagai proses alih teknologi yang dapat dilakukan

oleh lembaga Indonesia, karena dalam Bergeraknya, Malaysia akan dibantu oleh Singapura dan Inggris dalam hal teknologi anti-terornya.



DAFTAR REFERENSI

- Borradori, Giovanna, *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida*, The University of Chicago Press, Chicago: 2004
- Chandler, Michael dan Gunaratna, Rohan, *Countering Terrorism: Can We Meet the Threat of Global Violence*, London: Reaktion Books, 2007
- Dinstein, Yoram, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge: 2005
- Echols, John M., dan Shadily, Hassan., *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia: 1996
- Gardam, Judith, *Necessity, Proportionality, and the Use of Force by States*, Cambridge University Press, Cambridge: 2005
- Gul, Imtiaz, *The Al Qaeda Connection: The Taliban and Terror in Pakistan's Tribal Areas*, Penguin Group, New Delhi: 2009
- Gunaratna, Rohan, dan Iqbal, Khuram, *Pakistan: Terrorism Ground Zero*, London: Reaktion Books, 2010
- Holsti, K.J., *Taming the Sovereign*, Cambridge University Press, Cambridge: 2004
- Kegley, Charles W dan Eugene R. Wittkoff, *World Politics: Trend and Transformation*, edisi ke empat. New York: St Martin's Press, 1993
- Kegley, Charles W dan Eugene R. Wittkoff. *The Global Agenda: Issues and Perspectives*. New York: McGraw-Hill Inc, 1995
- Kim, Sung Hee, "The Role of Vengeance in Conflict Escalation" dalam *Escalation and Negotiation in International Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge: 2005
- McCoubrey, Hilaire, *International Conflict and Security Law*, Cambridge University Press, Cambridge: 2005
- Migdal, Joel S., *Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices*, Cambridge University Press, New York: 2004
- Morgan, Patrick M., "Deterrence, Escalation, and Negotiation" dalam *Escalation and Negotiation in International Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge: 2005

- Morrow, J.D., *Game Theory for Political Scientist*, Princeton University Press, New Jersey: 1994
- Nayar, Baldev Raj, dan Paul, T.V., *India in the World Order: Searching for Major-Power Status*, Cambridge University Press, Cambridge: 2003
- Paris, Roland, *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*, Cambridge University Press, New York: 2006
- Pruitt, D. G. dan Kim, Sung Hee, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, edisi ketiga, McGraw-Hill, New York: 2004
- Rashid, Ahmed, *Descend Into Chaos: How the War Against Islamic Extremism is being Lost in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia*, Penguin Group, New Delhi: 2008
- Rusdi Hamka, *Kashmir: Nurani Dunia Diadili*, Pustaka Panjimas, Jakarta: 1994
- Sen, L.P., *Slender Was The Thread: The Kashmir confrontation 1947-1948*, Orient Longmans Ltd, New Delhi: 1969
- Tan, Andrew dan Ramakrishna, Kumar, *The New Terrorism: Anatomy Trends and Counter Strategies*, Eastern University Press, Singapore: 2002
- Wibisono, Makarim, *Tantangan Diplomasi Multilateral*, Pustaka LP3S, Jakarta: 2006.
- Wilkinson, Paul, *Terrorism and the Liberal States*, University Press, New York: 1987.
- Wilkinson, Paul, *Terrorism Versus Democracy: The Liberal States Response*, cetakan ke dua, Routledge, London: 2006

Jurnal

- Ashutosh Varshney, "India, Pakistan and Kashmir: Antinomies of Nationalism", *Asian Survey*, Vol. 31, No.11 (November 1991)
- Friedman, George, "Pakistan and the U.S. Exit From Afghanistan", *STRATFOR Journal* (September 2010)
- Greenberg, J., Solomon, S., dan Pyszczynski, T., *Terror Management Theory of Self-esteem and Cultural Worldviews: Empirical Assessments*". *Journal of Personality and Social Psychology* Vol. 72, No.1 (Februari 1997)
- Kotera M. Bhimaya, dalam "Nuclear Deterrence in South Asia: Civil-Military Relations and Decision Making," *Asian Survey* Vol. 34. No 7 (Juli 1994)

Norris, Robert S. dan Hans M. Kristensen. "India's Nuclear Forces, 2005,"
Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 61, No.5 (September 2005)

Norris, Robert S. dan Hans M. Kristensen. "Pakistan's nuclear forces, 2001,"
Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 58, no.1 (Februari 2002)

Stephen Walt, "International Relations: One World, Many Theories," Foreign
Policy No. 110 (Spring 1998)

Widjajanto, Andi. "Dinamika Keamanan Pasca Orde Baru", Global: Jurnal Politik
Internasional, Vol.1, No.7 (Februari 2001)

Widjajanto, Andi. "Etika Perang dan Resolusi Konflik", Global: Jurnal Politik
Internasional, Vol.1, No.6 (September 2000)

Zeihan, Peter, "Three Points of View: The United States, Pakistan and India",
STRATFOR Journal (April 2010)

Halaman Media Elektronik

Abhishek Sharan dan Ashok Das, "26/11 Attacks Handler Arrested", Hindustan
Times 2010

<http://www.hindustantimes.com/News-Feed/hyderabad/26-11-attacks-handler-arrested/Article1-499019.aspx> diakses pada 16 Oktober 2010

Afridi, Jamal, Kashmir Militant Extremists, CFR, 2009

http://www.cfr.org/publication/9135/kashmir_militant_extremists.html diakses pada 21 November 2010

Antara, "Pelaku Terorisme Fadli Tiba di Indonesia", Antara, 2010

<http://www.antaraneews.com/berita/1291467224/pelaku-terorisme-fadli-tiba-di-indonesia> diakses pada 4 desember 2010

BBC News, "India Rules Out Kashmirs Talk", 2002.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2003615.stm diakses pada 18 Oktober 2010

Daily Times Pakistan, 'ISI has no links with Taliban', Daily Times Pakistan, 2009

http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2009\10\02\story_2-10-2009_pg1_9 diakses pada 21 Oktober 2010

Damien McElroy, "Mumbai attacks Terrorists took cocaine to stay awake during assault", The Daily Telegraph, 2008

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/3540964/Mumbai-attacks-Terrorists-took-cocaine-to-stay-awake-during-assault.html> diakses pada 18 Oktober 2010

Dawn, "Surviving gunman's identity established as Pakistani", Dawn, 2009.

<http://www.dawn.net/wps/wcm/connect/Dawn%20Content%20Library/dawn/new>

[s/pakistan/surviving-gunmans-identity-established-as-pakistani-ss](#) diakses pada 12 September 2010

Departemen Dalam Negeri India, "Banned Organisations", Ministry of Home Affairs, 2008
http://www.mha.gov.in/uniquepage.asp?Id_Pk=292 diakses pada 21 November 2010

Deutsche Welle, "Ketegangan Antara India dan Pakistan", Deutsche Welle, 2008.
<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3904859,00.html> diakses pada 16 Oktober 2010

Diwakar, "Terror boat was almost nabbed off Mumbai", The Economic Times, 2008 <http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/3816639.cms> diakses pada 16 Oktober 2010.

Eric Schmitt dan Somini Sengupta, "Ex-U.S. Official Cites Pakistani Training for India Attackers". The New York Times. 2008.
<http://www.nytimes.com/2008/12/04/world/asia/04india.html?hp> diakses pada 16 Oktober 2010

Eric Schmitt, Somini Sengupta, dan Jane Perlez, "U.S. and India See Link to Militants in Pakistan". New York Times, 2008.
<http://www.nytimes.com/2008/12/03/world/asia/03mumbai.html?bl&ex=1228453200&en=a32b625bf9928825&ei=5087%0A> diakses pada 16 Oktober 2010.

ET Bureau, "FBI nails Pak Major for Mumbai attacks", India Times, 2009.
<http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/FBI-nails-Pak-Major-for-Mumbai-attacks/articleshow/5317076.cms> diakses pada 16 Oktober 2010

Evening Standard, "Timeline: one night of slaughter and mayhem", Evening Standard, 2008
<http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23593839-details/Timeline:+one+night+of+slaughter+and+mayhem/article.do> diakses pada 20 Oktober 2010

Global Security, "Indo-Pakistan War of 1965", Global Security, 2008
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/indo-pak_1965.htm diakses pada 18 Oktober 2010

India vs Pakistan: Evaluation on Military Strength",
<http://www.abtheliberall.com/military/india-pakistan-military-strength> diakses pada 13 November 2010

Indian Daily, "Kashmir Crisis 2010", the Indian Daily, 2010
<http://www.theindiadaily.com/kashmir-crisis-2010/> diakses pada 21 November 2010

Indian Navy, "Naval Combatants", Indian Navy, tanpa tahun
<http://indiannavy.nic.in/> diakses pada 13 November 2010

India's Nuclear Weapons Program: Operation Shakti: 1998.
<http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaShakti.html> diakses pada 18 Oktober 2010

Jackson Diehl, "Musharraf's Stale Promises", Washington Post, 2007.
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/04/AR2007020400653.html> diakses pada 16 Oktober 2010

James Heitzman dan Robert L. Worden, "India: A Country Study", Federal Research Division, 1995
<http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/intoc.html> diakses pada 21 November 2010

James Rupert "Pakistan's Partial Crackdown Lets Imams Preach Jihad", Bloomberg, 2009
<http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=aF44YOpTiLJk> diakses pada 16 Oktober 2010

Jane Perlez dan Salman Masood "Terror Ties Run Deep in Pakistan, Mumbai Case Shows", New York Times, 2009.
<http://www.nytimes.com/2009/07/27/world/asia/27pstan.html> diakses pada 16 Oktober 2010

Jane Perlez, Eric Schmitt, dan Ginger Thompson, "U.S. Had Warnings on Plotter of Mumbai Attack," New York Times, 2010
http://www.nytimes.com/2010/10/17/world/asia/17headley.html?pagewanted=1&_r=1&ref=global-home diakses pada 17 Oktober 2010

Jayshree Bajoria, "Profile: Lashkar-e-Taiba (Army of the Pure) (a.k.a. Lashkar e-Taiba, Lashkar e-Toiba; Lashkar-i-Taiba)", Council on Foreign Relations (CFR). 2008
<http://www.cfr.org/publication/17882/#5> diakses pada 16 Oktober 2010.

Jeremy Kahn dan Robert F. Worth, "Mumbai Attackers Called Part of Larger Band of Recruits". The New York Times, 2008.
<http://www.nytimes.com/2008/12/10/world/asia/10mumbai.html> diakses pada 18 Oktober 2010

Liputan6, "Ketegangan India-Pakistan Memuncak", 2001.
<http://berita.liputan6.com/luarnegeri/200112/26084/class=%27vidico%27> diakses pada 16 Oktober 2010

M Shamsur Rabb Khan, "Kashmir: Giving Cause To Separatism", 2009,
<http://muslimindia.in/2009/06/kashmir-giving-cause-to-separatism/> diakses pada
 21 November 2010

Miriam Rajkumar, "Proliferation Analysis: A Nuclear Triumph for India",
 Carnegie Endowment for International Peace, tanpa tahun
<http://www.carnegieendowment.org/npp/publications/index.cfm?fa=view&id=172>
 15 diakses pada 18 Oktober 2010

Moreau, Ron, "The Pakistan Connection", Newsweek, 2008
<http://www.newsweek.com/id/171056>

Nation Master, "Pakistani Military Statistic", Nation Master
<http://www.nationmaster.com/country/pk-pakistan/mil-military> diakses pada 13
 November 2010

NDTV, "Taj Hotel Attacked", TTKN News, 2008.
<http://www.ttkn.com/world/terror-attacks-army-stormed-taj-hotel-mumbai-217.html> diakses pada 18 Oktober 2010

Norinco Corp,
<http://www.norinco.com>, diakses pada 16 Oktober 2010

Nuclear testing - Definition
http://www.wordiq.com/definition/Nuclear_testing diakses pada 19 Oktober 2010

Okezone Internasional, "Oposisi Kashmir Tolak Tawaran India", Okezone, 2010
<http://international.okezone.com/read/2010/09/27/18/376212/18/oposisi-kashmir-tolak-tawaran-india> diakses pada 27 September 2010

Pakistan's Nuclear Weapons Program - 1998: The Year of Testing
<http://nuclearweaponarchive.org/Pakistan/PakTests.html>

Peter Taylor, "The Jihadi who Turned 'supergrass'", BBC News, 2006
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/5334594.stm> diakses pada 23 Oktober
 2010

Ravi Nessman dan Ashok Sharma, "Indian gov't: Pakistan spies tied to Mumbai
 siege". Yahoo News, 2010
http://news.yahoo.com/s/ap/20101019/ap_on_re_as/as_india_mumbai_attack
 diakses pada 19 Oktober 2010

Rukmini Shrinivasan, "55% of India's population poor: Report", Times of India,
 2010 <http://timesofindia.indiatimes.com/india/55-of-Indias-population-poor-Report/articleshow/6169549.cms> diakses pada 21 November 2010

Sajjad Tarakzai, "Kalashnikov Demand Soars With Violence in Pakistan", the
 Jakarta Globe, 2009.

<http://thejakartaglobe.com/afp/kalashnikov-demand-soars-with-violence-in-pakistan/319480> diakses pada 16 Oktober 2010

Schmitt, Eric; Somini Sengupta, Jane Perlez, "U.S. and India See Link to Militants in Pakistan". New York Times, 2008
<http://www.nytimes.com/2008/12/03/world/asia/03mumbai.html?bl&ex=1228453200&en=a32b625bf9928825&ei=5087%0A> diakses pada 18 Oktober 2010

Somini Sengupta and Eric Schmitt, "Ex-U.S. Official Cites Pakistani Training for India Attackers". The New York Times, 2008
<http://www.nytimes.com/2008/12/04/world/asia/04india.html> diakses pada 18 Oktober 2010

Syed Baqir Sajjad dan Mohammad Asghar, "Investigators see Bangladesh link in Mumbai terror attacks", Dawn, 2009
<http://www.dawn.com/2009/02/05/top2.htm> diakses pada 16 Oktober 2010

The Economic Times, "Slain navigator of Porbandar trawler was imprisoned in Pak", The Economic Times, 2008
http://economictimes.indiatimes.com/News/PoliticsNation/Slain_navigator_of_Porbandar_trawler_was_imprisoned_in_Pak/articleshow/3777132.cms diakses pada 18 Oktober 2010

The News International, "Photographer recalls Mumbai attacks", The News International, 2009.
<http://www.webcitation.org/5hg3Sz06d> diakses pada 18 Oktober 2010

The Times of India, "NSG ends reign of terror at Nariman", Times of India, 2008
http://timesofindia.indiatimes.com/India/NSG_ends_reign_of_terror_at_Nariman/articleshow/3771314.cms diakses pada 18 Oktober 2010

The Times of India, "Kakodkar says Pokhran-II tests fully successful", Times of India, 2009
<http://timesofindia.indiatimes.com/news/india/Kakodkar-says-Pokhran-II-tests-fully-successful-/articleshow/5052234.cms> diakses pada 18 Oktober 2010

Tom Morgan, "Arrested Mumbai gunmen 'of British descent'", The Independent, 2008.
<http://www.independent.co.uk/news/world/asia/new-claims-of-britons-amongst-mumbai-gunmen-1039452.html> diakses pada 16 Oktober 2010.

UN Resolution, "Kashmir - The History", Pak-UN
<http://www.pakun.org/kashmir/history.php> diakses pada 21 November 2010

UNdata World Information, "India", PBB, 2010
<http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=INDIA> diakses pada 21 November 2010

UNdata World Information, "Pakistan, PBB, 2010

<http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crname=Pakistan> diakses pada 21 November 2010

Wikipedia Bahasa Indonesia, "Konflik Siachen", wikipedia, 2009

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Siachen diakses pada 19 Oktober 2010

Wikipedia bahasa Inggris: Leviathan,

[http://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_\(book\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(book)) diakses pada 10 Oktober 2010

Wikipedia, "Chronology of terrorist incidents in India", Wikipedia Org, 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_major_terrorist_incidents_in_India diakses pada 7 Desember 2010

Wikipedia, "Indian Army", Wikipedia, tanpa tahun

http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Army diakses pada 13 November 2010

VOA News, "PM India, Pakistan Sepakat Upayakan Normalisasi Hubungan", VOA News, 2010

<http://www1.voanews.com/indonesian/news/asia/PM-India-Pakistan-Sepakat-Upayakan-Normalisasi-Hubungan-92453524.html> diakses pada 30 April 2010

Zahid Hussain, "Islamabad Tells of Plot by Lashkar". Wall Street Journal, 2009.

http://online.wsj.com/article/SB124872197786784603.html?mod=googlenews_ws_j diakses pada 16 Oktober 2010

